



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PEMIKIRAN SATRIA EFFENDI M. ZEIN TENTANG HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH

DISERTASI

Diajukan Guna Melengkapi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor (Dr.) Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)



AHMAD ROZA'I AKBAR
NIM. 31790515817

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441/2020

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama Ahmad Roza'i Akbar
Nomor Induk Mahasiswa 31790515817
Gelar Akademik Dr. (Doktor)
Judul Analisis Pemikiran Satria Effendi M. Zein tentang Hukum Keluarga Islam di Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syari'ah.

Tim Penguji

Prof. Dr. Afrizal M, MA
Penguji I / Ketua / Co- Promotor

Dr. Tuti Andriani, S. Ag., M. Pd
Penguji II / Sekretaris

Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D
Penguji III

Prof. Dr. Alaidin Koto, MA
Penguji IV

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
Penguji V / Promotor

Dr. H. Zulkayandri, MA
Penguji VI

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
Penguji VII

Tanggal Ujian/
Pengesahan

10 Maret 2020




PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi berjudul : **“Analisis Pemikiran Satria Effendi M.Zein Tentang Hukum Keluarga Islam di Indonesia Ditinjau dari Maqasashid Syari’ah”**, yang ditulis oleh Sdr/i. Ahamad Roza’i Akbar NIM. 31790515817 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Disertasi Ujian Tertutup pada tanggal 27 November 2019 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)
Dr. Jumni Nelli, M.Ag


Tanggal :

Penguji II (Sekretaris)
Dr. H. Abu Anwar, M.Ag


Tanggal :

Penguji III
Prof. Dr. Alaidin Koto, MA

Tanggal :

Penguji IV (Promotor)
Prof. Dr. KH. Said Aqil Husin Al Munawarrah, MA


Tanggal :

Penguji V
Dr. H. Zulkayandri, MA,


Tanggal :

Penguji VI (Co-Promotor)
Prof. Dr. Afrizal M, MA


Tanggal : 27-2-2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing disertasi dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul : *"Analisis Pemikiran Satria Effendi M-Zein Tentang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syari'ah"* yang ditulis oleh:

: Ahmad Roza'i Akbar
: 31790515817
: Hukum Keluarga

Nama
NIM
Program Studi

Untuk diajukan dalam sidang **Ujian Terbuka** pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Februari 2020
Co. Promotor

Promoter

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
NIP : 19540126198803

Prof. Dr. Afrizal M, MA
NIP :195910151989031001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsyah)

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP. 197206282005012004

1. Dilarang mengump sebagai atau

Gifts

4. Jelaskan dan menyebutkan sumber:

5. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau..

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Ahmad Roza'i Akbar

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap disertasi saudara :

Nama	: Ahmad Roza'i Akbar
NIM	: 31790515817
Program Studi	: Hukum Keluarga (<i>Ahwal al-syakhshiyah</i>)
Judul	: Analisis Pemikiran Satria Effendi M.Zein Tentang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syari'ah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 27 Februari 2020
Promotor,

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
NIP. 19540126198803

1. Disertasi Saudara Ahmad Roza'i Akbar
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. Afrizal M, MA

**DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Ahmad Roza'i Akbar

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap disertasi saudara :

Nama	: Ahmad Roza'i Akbar
NIM	: 31790515817
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal al-syakhshiyah)
Judul	: Analisis Pemikiran Satria Effendi M.Zein Tentang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syari'ah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 27 Februari 2020
Co. Promotor,

Prof. Dr. Afrizal M, MA
NIP :19591015 1989031001

1. Disertasi Saudara Ahmad Roza'i Akbar, NIM 31790515817, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-syakhshiyah), Judul Analisis Pemikiran Satria Effendi M.Zein Tentang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syari'ah, telah diterima dan disetujui untuk diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Roza'i Akbar
NIM : 31790515817
Tempat/ Tanggal Lahir : Sungai Alam / 12 Oktober 1970
Program Studi : Hukum Keluarga (*ahwal al-syakhshiyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul : "Analisis Pemikiran Satria Effendi M.Zein Tentang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syari'ah" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Disertasi yang telah saya susun ini, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu saya kutip, saya cantumkan refrensi berdasrkan aturan kaidah dan etika penuilisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 27 Februari 2020



Ahmad Roza'i Akbar

UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Penulis ucapkan *Al-Hamdu lillahi robbil' alamin* kehadiran Allah, SWT., Shalawat dan Salam tidak pernah luput Penulis kirimkan keharibaan junjungan alam yakni, Nabi Besar Muhammad SAW., (*Allahumma Sholli A'la Muhammadin, Wa 'ala Ali Muhammad*), akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi dengan judul : **“Analisis Pemikiran Satria Effendi M. Zein Tentang Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Dintinjau Dari *Maqasyid Syari'ah*”**.

Penulisan disertasi ini, adalah sebagai upaya penggalian mutiara pemikiran Satria Effendi M. Zein (Al-Marhum), yakni seorang ahli *Ushul Fikih*. Beliau, selalu memberikan masukan dan catatan, dalam setiap kasus yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama, dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam setiap analisisnya, *Satria*, selalu menemukan sisi-sisi yang terdalam dari semua kasus yang dibahasnya berlandaskan pada ‘maksud syara’ (*Maqasyid Syari'ah*) dalam *menta'lif*-kan dan menetapkan hukum-hukum-Nya. Dan oleh karenanya, tidak jarang Beliau (*Satria*), ‘meyerang’ dari sesuatu yang *tersurat* kepada yang *tersirat*, dan beralih dari teks *Mantua* ke *Mafhum*, bahkan, berpindah dari sesuatu yang bersifat normatif menuju kepada realitas (*Teks ke konteks*), dan lain sebagainya. Itulah sebabnya, maka hasil analisa *Satria* kadang-kala bertolak belakang , kadang-kala cocok/sesuai dengan hasil Putusan Peradilan Agama, dalam setiap kasus-kasus hukum keluarga yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama di Indonesia.



Hak Cipta Ditundukkan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disertasi ini dapat dirampungkan dengan bantuan dari banyak pihak. Untuk itu, seyogya-nya lah pada kesempatan ini Penulis menghatur sembah dan ucapan terima-kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ayah H. Akbar Bin Ali (ALM), Ibu HJ. Aisyah Binti H. Usman (ALMH), yang sedari Penulis kecil, semasa hidupnya mengharapkan, mendorong dan mendo'a-kan akan kesuksesan Penulis, semoga Allah SWT., mengampuni dosa keduanya serta menempatkan pada tempat yang sebaik-baik nya. Ayah dan Ibu, senentiasa hidup dalam untaian do'a dan munajat- ku kehadhirat Ilahirrobi..
2. Istri-ku tercinta, Erni Darlis, S.Sy., yang senentiasa melayani dan menyuguhkan senyuman yang menyejukan kepada ku. Walaupun kesibukannya sangat menyita waktu santai dan istirahat, terutama dalam menjalankan tugas sebagai PNS, dan mengurus masalah pendidikan anak-anak Ku; *Meissya Ilma Auliya, Muhammad Izza Irfan Akbari dan Salwa Marwah Amanda*, Semoga Allah SWT., senentasia melindungi dan melimpahkan nikmat-Nya untuk kesuksesan Keluarga kita.
3. Civitas Akademika Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, yang banyak mmemberikan bantuan baik materil maupun sapoting dalam penyelesaian program Doktor (Strata 3) ini. Dan khusus kepada Ketua Yayasan Tafaqquh Fiddin, DR. H.M. Rizal Akbar, SSi. M. Phil.
4. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau, beserta jajarannya, dalam memberikan pelayanan administrasi yang baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau, beserta jajarannya, dalam memberikan pelayanan administrasi yang baik.
6. Dr. Jumni Nelli, M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syaksyiah*) Pascasarjana UIN suska Riau,
7. Prof. Dr. KH. Said Aqil Husen Al-Munawwar, MA selaku Promotor, yang senantiasa mengarah dan membimbing untuk penyempurnaan Penulisan Disertasi ini.
8. Prof. DR. Afrizal M. MA., selaku Co-Promotor. Yang sering Penulis temui untuk berkonsultasi dalam penyelesaian penulisan ini.
9. Prof. DR. H. Alaidin Koto, MA., yang dengan keramahannya sering Penulis 'cegat' untuk bertanya kepadanya tentang persoalan hukum Islam di Indonesia.
10. Deni Febriansyah, SSy, M. Lit, dan Zikri Fahmi S.Pi, yang menyiapkan waktunya untuk membaca, dan mengedit tulisan disertasi ini.

Akhirnya, Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kepada semua pihak atas selesainya penulisan Disertasi ini. Semoga Allah SWT., senantiasa membalas amal baik dan menjadikan upaya ini sebagai amal jariyah untuk kita semua.. *Amin ya Robbal 'Alamin....*

Wallahu'alam bi Al-Shawwab

Pekanbaru, 20 Februari 2020

Ahmad Roza'i Akbar
NIM. 31790515817



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN NOTA DINAS	
HALAMAN PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan	17
D. Kajian Perpustakaan.....	18
E. Kerangka Teoritis Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Landasan Maqashid Syaria'h.....	24
B. Sejarah Maqashid Syaria'h	41
C. Pembagian Maqashid Syaria'h.....	56
D. Cara Mengetahui Maqashid Syaria'h	59
E. Peranan Maqashid Syaria'h dalam Kehidupan	76
F. Hubungan Antara Maqâshid Al-Syarî‘Ah Dengan Beberapa Metode Istinbath Hukum Islam	83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	99
A. Biografi Satria Effendi M. Zein	99
B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	123
C. Subjek Penelitian	137
D. Langkah-langkah Penelitian	138
E. Teknik Pengumpulan Data	140
F. Teknik Analisis Data	142
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	150
A. Pemikiran Satria Effendi M. Zein Dalam Hukum Keluarga	
Islam di Indonesia	151
1. Pernikahan Melalui Telfon.....	154
2. Perkara Pembatalan Nikah	172
3. Pernikahan di Bawah Tangan.....	188
4. Wali Anak di Bawah Umur	212
5. Gugat Cerai Akibat Suami Tidak Memberi Nafkah	229
6. Cerai Akibat Suami Poligami	243
7. Cerai Akibat Tidak Ada Keturunan	263
8. Syarat Beragama Islam Bagi Yang Melakukan Hadanah	289
9. Hukum Kewarisan Kriteria Harta Tirkah.....	301
B. Analisa Pemikiran Satria Effendi M. Zein Dalam Konteks	
Maqashid Syari'ah	317
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	327
A. Kesimpulan.....	327
B. Saran	332
DAFTAR PUSTAKA	334

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

De (dengan titik di bawah)	D{	D}ad	د
Te (dengan titik di bawah)	T{	T{a	- د
Zet (dengan titik di bawah)	Z{	Z}a	- د
apostrof terbalik	'	'Ain	ء
Ge	G	Gain	- د
Ef	F	Fa	ف
Qi	Q	Qof	ق
Ka	K	Kaf	ك
El	L	Lam	- ل
Em	M	Mim	م
En	N	Nun	ن
We	W	Wau	و
Ha	H	Ha	ه
Apostrof	'	Hamzah	ء
Ye	Y	Ya	ي

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>Fath{ah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>D{ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
	Fath}ah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

: *kaifa*

: *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ...	<i>fath}ah dan alif atau ya</i>	a>	a dan garis di atas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ḍ	i dan garis di atas
	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

: *ma>ta*

: *rama*

: *qi>la*

: *yamu>tu*

4. *Ta marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

: *raud}ah al-at}fa>l*

: *al-mad}nah }ilah*

: *al-h}ikmah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Syaddah (Tasydiḍ)*

Syaddah atau *tasydiḍ* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydiḍ* (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*..

Contoh:

: *rabbana*

: *najjai>na*

: *al-h}aqq*

: *al-h}ajj*

: *nu,ima*

: *‘aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>).

Contoh:

: *‘Ali* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

: *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

: *al-falsafah*

: *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

: *ta'muru>na*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'a*ﻥ), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fi Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Iba>ra>l bi 'umu>m al-lafz la> bi khus}u>s} al-sabab

9. Lafz al-Jala>lah ()

Kata ,Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudla>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

di>nulla>h

billa>h

Adapun *ta marbu>ta* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fi> rah}matilla>h

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallazib> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-lazib> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li

Al-Munqiz min al-D}ala>l



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis pemikiran *Satria Effendi M. Zein*, dalam problematika hukum keluarga Islam di Indonesia yang berkaitan dengan analisis yurisprudensi dengan pendekatan *Ushuliyah*. Ada sepuluh Keputusan Pengadilan Agama dari berbagai tingkatannya di Indonesia, khusus-nya dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia, yang telah dianalisis oleh *Satria Effendi M. Zein*. Dalam analisisnya, *Satria*, menggunakan pendekatan Muqoronah/Perbandingan Mazhab. Adakalanya ia mengungkap pendapat ahli fikih dari berbagai mazhab secara *qauli*, tetapi juga terkadang ia mengungkap pendapat mereka secara *Manhaji*. Terhadap kedua cara ini akhirnya beliau harus menunjuk-kan semacam preferensi atau tarjih, mana di antara pendapat para fukaha terdahulunya yang dapat diterima dan dijadikan sebagai pendapat yang terpilih. Namun, cara tarjih yang dilakukan oleh beliau mempunyai “kelebihan”, jika dibandingkan dengan cara tarjih yang biasa dipakai ahli fikih lainnya. Salah satu kriteria tarjih yang digunakan beliau adalah sejauh mana pendapat itu mengacu pada *Maqasid al-Syariah*. Beliau menegaskan, bahwa apabila Hakim melihat adanya pendapat para Ulama’ atau Fuqaha’ yang bertentangan dengan kemaslahatan dan tujuan syariat, maka, Hakim boleh memilih pendapat yang lain, selama pendapat itu sejalan dengan tujuan syariat (*Maqasyid al-Syari’ah*).

Upaya membangun *Fikih Lintas Mazhab*, terlihat jelas dalam warna analisis *Satria Effendi M. Zein*, terhadap berbagai masalah hukum keluarga Islam di Indonesia. Oleh Karena itulah, dalam setiap analisisnya, Beliau, tidak pernah meninggalkan perbandingan pendapat dikalangan Mazhab, dengan catatan, bahwa pendapat tersebut, sejalan dengan tujuan Syari’at, dan sejiwa dengan perkembangan zaman dan masa. Dalam menganalisis kasus-kasus seperti tersebut, Beliau, terlebih dahulu mencari dan menyajikan dalil nas yang ada, baik Al-Qur’an maupun hadis, kemudian membandingkan pendapat-pendapat ulama yang ada yang dikutip dari berbagai sumber, setelah itu ia melakukan *qiyas* dan menguji *Maslahat* serta *Maqasyid al-Syari’ah* yang ada dalam masalah itu, barulah kemudian ia menyimpulkannya. Di sinilah letak kedalaman dan kontribusi pemikiran *Satria Effendi M. Zein*, mengenai hukum Islam dan hukum keluarga Islam di Indonesia.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This paper analyzes the thoughts of Satria Effendi M. Zein, in the problems of Islamic family law in Indonesia relating to jurisproductive analysis with the Ushuliyah approach. There are ten Decisions of the Religious Courts at various levels in Indonesia, specifically in the realm of Islamic family law in Indonesia, which have been analyzed by Satria Effendi M. Zein. In his analysis, Satria, used the Muqorinah / Comparative School approach. Sometimes he expresses the opinions of fiqh experts from various schools in qauli, but also sometimes he expresses their opinions in Manhaji. Towards both of these methods, he must finally show a kind of preference or tarjih, which among the opinions of the earlier jurists can be accepted and used as the chosen opinion. However, the method of tarjih performed by him has "advantages", when compared to the method of tarjih that is commonly used by other Juridians. One of the criteria of tarjih that he uses is the extent to which that opinion refers to Maqasid al-Sharia. He asserted, that if the Judge saw the opinions of 'Ulama' or Fuqaha 'that were contrary to the benefit and purpose of the Shari'a, then the Judge may choose another opinion, as long as the opinion was in line with the objectives of the Shari'a (Maqasyid al-Shari'ah).

The effort to build the Jurisprudence of the Schools, is clearly seen in the color of Satria Effendi M. Zein's analysis of various Islamic family law issues in Indonesia. Therefore, in every analysis, he, never left the comparison of opinions among the School, with the note, that opinion, in line with the objectives of the Shari'ah, and in accordance with the development of times and times. In analyzing cases such as this, he first sought and presented the propositions of the texts, both the Qur'an and the hadith, then compared the opinions of existing scholars quoted from various sources, after which he conducted qiyas and tested Maslahat and Maqasyid al-Shari'ah who are in the problem, only then he concludes. Herein lies the depth and contribution of Satria Effendi M. Zein's thoughts on Islamic law and Islamic family law in Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تحلل هذه الورقة أفكار ساتريا أفندي زين ، في مشاكل قانون هناك عشرة قرارات للمحاكم او صليه إندونيسيا فيما يتعلق بالتحليل القضائي مع نهج الدينية على مختلف المستويات في إندونيسيا ، وتحديدًا في مجال قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا ، والتي تم تحليلها بواسطة ساتريا أفندي م. زين. في تحليله ، ساتريا استخدم مقارنة المقرونة / المدرسة المقارنة. يعبر أحيانًا عن آراء خبراء الفقه من مختلف المدارس في قاولي ، ولكنه يعبر أيضًا عن آرائهم في منهجي. تجاه كلتا الطريقتين ، يجب عليه أخيرًا إظهار نوع من التفضيل أو الطريقة التي يمكن قبولها واستخدامها في الرأي التي يؤديها له مختار من بين آراء الفقهاء السابقين. ومع ذلك ، فإن طريقة الحكمة القانونية التي يشيع استخدامها من قبل "مزايا" ، بالمقارنة مع طريقة الآخرين. أحد معايير الترجيح التي يستخدمها هو إلى أي مدى يشير هذا الرأي إلى مقاصد الشريعة. وأكد أنه إذا رأى القاضي آراء "الفقهاء" أو "الفقهاء" مخالفة لمنفعة الشريعة والغرض منها ، فيحق للقاضي اختيار رأي آخر طالما كان الرأي متفقًا مع أهداف الشريعة (المقاصد الشرعية).

يظهر الجهد المبذول لبناء فقه المدارس بوضوح في لون تحليل ساتريا أفندي زين لمختلف قضايا قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا. لذلك ، في كل تحليل ، لم يترك مقارنة الآراء بين المدرسة ، مع الملاحظة ، هذا الرأي ، تمشيا مع أهداف الشريعة ، ووفقًا لتطور الأوقات والأوقات. في تحليل مثل هذه الحالات ، سعى أولاً إلى تقديم لكريم أو الحديث الشريف ، ثم قارن آراء العلماء الحاليين المقتبسة من مصادر مختلفة ، وبعد ذلك أجرى القياس واختبره مصلحات ومقاصد الشريعة الذين هم في المشكلة ، عندها فقط يختتم. وهنا يكمن عمق ومساهمة أفكار ساتريا أفندي زين في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الإسلام إندونيسيا.



B A B I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perjalanan sejarah pemikirannya, hukum Islâm merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya gerakan pemikiran hukum Islam mulai yang diawali dari masa *Khulafâ' al-Râsyidîn* (Sejak Tahun 632-661 M) telah dimotori oleh *Umar ibn al-Khaththâb*, era *Sighar* Sahabat dan *Tabi'in* (735 M) yang ditandai dengan munculnya *Ahl al-Ra'y* yang dimotori oleh *Ibrâhîm al-Nakhâ'ie* hingga munculnya madzhab fiqh pada era *Tabi'ut al-Tâbi'in* (110 – 120 H) yang memiliki corak tersendiri sesuai dengan latar belakang sosio-kultural dan politik di mana madzhab fiqh itu tumbuh dan berkembang.

Perkembangan yang dinamis-kreatif ini, setidaknya-didorong semangat keagamaan, yakni eksistensi umat Muslim sebagai umat terbaik yang diutus untuk manusia, menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana dinyatakan oleh ayat al-Quran, Surat Ali Imran ayat 110 :

خَيْرَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ مِنْهُمْ وَتَنْهَوْنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
بِاللَّهِ ۖ أَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

Artinya: “ Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”. (Q.S. Ali Imran: 110)¹

Implikasinya, mereka diharapkan dapat membawa misi perubahan bagi kemanusiaan. Ini bisa dilakukan dengan pencarian makna Islâm sesuai dengan konteksnya dan menjadikan Islâm sebagai ajaran terbuka bagi munculnya beragam penafsiran.

Hukum Islam dengan kedua sumber utamanya, *Al-Qur`an* dan hadis merupakan hukum yang sempurna, karenanya, Islam selalu fleksibel, lentur. Elastis dan mampu menjawab berbagai macam persoalan yang muncul baik yang sedang dihadapi dan yang akan terjadi pada masa mendatang.

Menurut *standard normatif* Islam, *Al-Quran* adalah jawaban Tuhan —dalam bentuk kalam literal— melalui Nabi *Muhammad SAW.*, terhadap situasi moral, sosial dan politik di Jazirah Arab pada masa Nabi. Respon ini seringkali singkat dan terkadang hanya berupa isyarat tanpa memberi petunjuk yang jelas tentang nama individu, tempat maupun waktu ketika ayat-ayat Al-quran itu diturunkan.

Secara sekilas, ayat-ayat hukum dalam Al-Qur`an tidak begitu banyak, yang dalam hitungan *Syaikh Abdul Wahhab Khallaf* (W. 1956 M) sebagaimana dikutip oleh Harun Nasution hanya 5,8 persen dari 6360 ayat dalam Al-Qur`an. Secara rinci, menurutnya 140 ayat yang berbicara ibadah shalat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain, 70 ayat yang bicara tentang hidup keluarga, perkawinan, perceraian, hak waris, 70

¹ *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia (RI)., PT., Karya Toha Putra, Semarang, Hlm., 80, Tahun 2002.



ayat tentang perdagangan, jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam, 30 ayat tentang kriminal, 25 ayat tentang hubungan Islam dan bukan Islam, 13 ayat tentang peradilan, 10 ayat tentang kaya dan miskin, dan 10 ayat tentang politik kenegaraan, jadi jumlah semuanya hanya 368 ayat hukum.²

Keterbatasan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur`an bukanlah hambatan dalam menjawab persoalan yang muncul ke permukaan, karena dalam kesepakatan seluruh ulama dan kaum Muslimin, bahwa setelah Al-Qur`an ada sumber lain yakni *al-hadis* Nabi Muhammad Shallallāhu `Alaihi Wasallam, *ijmā`* dan *qiyās*. Kesepakatan ini didasari oleh penegasan Allah Subhānahû wata.ala Qura'an : Surat An-Nisa. Ayat :

59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa': 59).³

Perintah menaati Allah berarti perintah untuk mengikuti hukum dalam *al-Quran*;

Perintah mengikuti Rasul berarti perintah untuk melaksanakan hukum yang terdapat

² Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*, Jilid II, Jakarta, UI Pres, Hlm, 7-8.

³ *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia (RI), PT. Karya Toha Putra Semarang, Hlm, 114, Tahun 2002.



dalam *al-Sunnah* dan perintah untuk *menaati Ulil amri* berarti perintah untuk mengikuti hukum hasil *ijma' Ulama'*. Sedangkan kata-kata diakhir ayat yang berbunyi :

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

(Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (*al-Quran*) dan Rasul (*al-Sunnah*), berarti perintah untuk mengikuti *qiyas* dalam hal-hal yang terdapat perbedaan pendapat. Ini memberi penjelasan bahwa pengembalian itu berlaku atas perintah Allah dan Rasul. Tidak mungkin dikatakan bahwa kata “*Ruju*” itu berarti mengembalikan kepada *al-Quran dan Sunnah*, karena “*Ruju*” kepada *qiyas* itu berlaku setelah adanya perbedaan pendapat. Sedangkan perintah mengamalkan *al-Quran dan Al-Sunnah* tanpa disangkut-kan kepada adanya perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat diantara umat islam tentang hukum syara' jarang terjadi pada sesuatu yang telah ditetapkan dengan *nash al-Quran dan Sunnah*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud perbedaan pendapat pada ayat diatas adalah tentang hukum yang tidak terdapat dalam *nash syara'*. Makna ayat diatas, dengan demikian dapat dipahami sebagai suruhan/perintah untuk menghubungkan kepada *al-Quran dan Sunnah* dengan cara pemikiran mendalam untuk mencari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesamaannya dengan yang ada pada *nash-nash syara'*. Kesamaan itu hanya dapat diketahui melalui penggunaan nalar atau *ijtihad (ra'y)*.⁴

Imam asy-Syāfi'i (150-204 H), telah membangun konstruksi model ijtihad sebagai upaya menjawab berbagai persoalan yang muncul ke permukaan. Ulama peletak dasar *ushûl al-fiqh* ini telah memprediksi bahwa kasus-kasus hukum akan selalu muncul seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kitab Monumentalnya, *Al-Risālah*, ia menulis bab khusus tentang *ijtihād* dengan porsi yang cukup banyak. Dalam tahap ini, *asy-Syāfi'i* memberikan rambu-rambu dan petunjuk melalaui potongan pernyataan *Khalifah Umar Bin Khattab R.A.* ketika mengirimkan surat kepada Gubernur-nya yakni *Abu Musa As'ari* sebagai berikut:

لا عنرها

“ Pelajarilah segala soal yang serupa dan memiliki kesamaan dan qias-kanlah segala urusan kepada hal-hal yang sebanding-nya”

الحكم يدور مع

“ hukum beredar bersama ‘illat, baik dalam wujud maupun dalam ketiadaanny

Bahwa hukum-hukum yang berpijak pada mashlahat tertentu akan tetap diperhitungkan selama *mashlahat*nya masih ada, sebagai tambatan dan ‘*Illat* hukum.

⁴ Amir Syarifuddin, *Pembahaaruan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, 1993, hal. 131



Apabila mashlahat tersebut sudah tidak ada lagi, maka hukum harus berubah sejalan dengan mashlahatnya.⁵

Pada kutipan di atas dapat dipahami bahwa imam *asy-Syāfi'i* melakukan *ijtihad* dengan metode *qiyās*. Secara teknis, menurutnya langkah-langkah yang ditempuh dengan melihat *al-Qur'an*, *al-hadis*, *ijmā'*, baru kemudian *qiyās*.⁶

Qiyas sebagai metode *ijtihad* dipakai oleh hampir semua mazhab hukum dalam Islam, walaupun pemakaiannya dalam intensitas yang berbeda-beda. Oleh karena itulah *qiyas* termasuk dalam katagori dalil hukum yang *mutafaq'alaih* (disepakati), setelah *al-Quran*, *al-Hadist* dan *ijma'*. Masuk-nya *qiyas* kedalam dalil yang disepakati, dapat dilihat dari sisi bahwa kedekatan *qiyas* dengan sumber *nash* hukum dalam mekanisme penalaran *ta'lili* (*illah* hukum).

Bila dikaitkan antara *qiyas* dengan *nash*, maka itu berarti mengaitkan *qiyas* dengan *maqasyid al-Syari'ah*. Sebab, *maqasyid al-Syari'ah* sebagai tujuan *disyari'atkannya* hukum oleh Tuhan, secara substantial digali dari *nash* itu sendiri. Keterkaitan metodologis juga tampak antara *qiyas* dan *maqasyid al-Syari'ah*. *Qiyas* merupakan metode *ijtihad* yang memfokuskan pada penelitian '*Illah*, sedangkan salah satu cara untuk memahami *maqasyid al-Syari'ah* sebagaimana yang dikemukakan *Abu Ishak Asy-Syaithibi* (W. 790 H/1388M) adalah dengan analisis terhadap '*illah* perintah dan larangan dalam suatu *nash*.

⁵ Yusuf Al-Qardlawy, "Awamilu As Sa'ah Wa al-Murunah Fi Asy Syari'ah al-Islamiah, Alih Bahasa Oleh : Said Agil Husen Al-Munawwar, *Keluasan Dan Keluwesan Hukum Islam*, Dina Utama Semarang (DIMAS), Tahun 1993, Hal.18.

⁶ Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'I, *Al - Risalah*, Kairo : al- aqsha, ttp., 219



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mujtahid harus berpedoman pada '*Illah*' yang tertulis, karena hanya dengan mengikuti '*illah*' tertulis itulah, tujuan hukum, baik dalam bentuk perintah maupun larangan dengan sendirinya dapat dicapai. Adapun upaya untuk melakukan pemecahan terhadap permasalahan hukum yang selalu muncul dan berkembang dengan berbagai metode *ijtihad* yang antara lain adalah *qiyas* harus bertolak dari tela'ah mendasar terhadap '*illah-illah yang tertera di dalam nash hukum syara*'.

Dengan demikian maka dapatlah dipahami bahwa '*Illah*' merupakan bagian dari esensi *maqasyid asy-Syari'ah*. Pengembangan hukum dengan metode *qiyas* harus melewati contoh '*Illah*' yang di zahirkan oleh Tuhan dalam nash, yang tiada lain adalah untuk merealisasikan *maqasyid asy-Syari'ah* seperti kemaslahatan dan keadilan.

Pada dasarnya, hukum adalah *sosio-legal* masyarakat untuk menata kehidupan. Dalam Islam, hukum adalah sebagai hasil pengumpulan dealektis antara konteks, teks dan subjek dalam bingkai yang sangat teologis. Dengan arti ini, hukum selalu memiliki basis sosial-kultural-idilogisnya.

Prinsip-prinsip tersebut sebagaaimana tercermin dari doktrin ilmu hukum Islam (Ushul-fiqh) yang menegaskan bahwa hukum senentiasa bergerak seiring dengan pergerakan waktu dan tempat (تغير الأحكام بتغير الأزمنة، والأمكنة، ولأحوال). Berdasarkan pada prinsip perubahan itulah yang mengidentifikasikan kedinamisan hukum Islam dalam memberikan ruang gerak yang fleksibel.



Akibatnya rigiditas ditantang keras oleh para *Ulama' al-Salaf al-Sholih*.

Bahkan analisis hukum Islam yang paling awal seperti kajian yang digagas *Imam Malik* (93 – 179 H/712 – 795 M) dalam karyanya *Al-Muwatta'*, sangat mengafresiasikan otoritas sosiologis-Kultural dalam legitimasi hukum. Bahkan, *Imam Malik* sangat menghargai praktek (sosiologis) warga Madinah ketimbang kandungan makna normative *Hadist dho'if* (lemah) sebagai pijak-kan prumusan hukum Islam. Baginya teks-teks hukum (termasuk teks-teks hadist hukum) lebih berperan hanya sebagai symbol ilustrasi, ketimbang sebagai fungsi otoritatif. Hukum adalah realitas itu sendiri, bukan sebuah konstruksi teoritis para *Ulama'* yang tercabut (transedental) dari akar lokal dan tempatnya.

Di sisi lain, Seorang *Ulama'* Islam mumpuni abad skolstik, *Muhammad Ibnu Abu Bakar Ibnu Sa'at bin Huraiz al-Zari'I*, yang lebih dikenal dengan nama *Ibnu al-Qoiyyim al-Jauziyah*, (W. 1356 M) menuturkan dalam bukunya *I'lam al-Muwaqi'in* bahwa fondasi dan struktur dasar bangunan Syari'at Islam adalah Hikmah, kualitas kearifan dan Kemashlahatan (*Maqasyid al-Syari'ah*) bagi ummat manusia, dan adalah bukan Syari'at Islam jika sebuah rumusan dalam gagasan pemaknaannya bertentangan dengan pesan-pesan dasar Islam yang sangat pro keadilan dan kemashlahatan serta menolak segala macam bentuk kemafsadatan bagi ummat manusia.

Apabila ditilik dari sejarahnya, pertimbangan *maqasyid asy-Syari'ah/maslahat* dalam penetapan hukum pada dasarnya telah dilakukan jauh sebelum ilmu *usul fiqh* mengalami perkembangan. Pada masa sahabat, terutama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketika *Umar Bin Khattab* (13-23 H./ 634 – 644 M) menjadi khalifah dianggap paling banyak menggunakan penalaran dan melampaui teks-teks sarih dalam al-Qur'an karena pertimbangan *maqasyid asy-Syari'ah*/ maslahat. Bahkan upaya penggunaan *ra'yu* melalui *ijtihad* pun sesungguhnya telah ada pada zaman Rasulullah saw. ketika beliau mengutus *Muadz bin Jabal* ke Yaman. Artinya, benih usul fiqh sudah ada pada Nabi dan kebutuhan terhadap kajian disiplin ilmu ini terus ada karena persoalan hukum kemasyarakatan tidak pernah berhenti. Barangkali apa yang dimaksud di sini mirip dengan bunyi adagium seperti ini *النصوص متناهية والوقا غير متناهية* teks-teks hukum itu terbatas adanya sementara kasus-kasus hukum tidak terbatas).

Mayoritas ulama telah mencapai kata sepakat bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak menetapkan hukum kecuali untuk kemaslahatan umat, yaitu menarik kemanfaatan, mencegah kerusakan, dan membersihkan dunia dari kejahatan atau dosa. Pengetahuan mengenai berbagai tujuan ketetapan hukum Allah (*maqashid syari'ah*) akan dapat membantu memahami teks-teks keagamaan (*al-nushush al-syar'iyah*) dan mengaplikasikannya dalam realitas.

Jika ditelusuri sejarah perkembangan tentang kajian *maqashid syari'ah* maka diketahui bahwa perhatian terhadap *maqashid syari'ah* ini telah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam. Penelaahan terhadap *maqashid syari'ah* mulai mendapat perhatian yang intensif setelah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam wafat, di saat para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah masih hidup. Perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial-nya, termasuk di dalamnya nilai- nilai, sikap-sikap, pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Perubahan sosial seperti ini menuntut kreatifitas para sahabat untuk memecahkan persoalan- persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial itu.

Di samping itu *syariat* Islam mempunyai satu kesatuan sistem yang menjadikan *dalil-dalil syariat* itu berada dalam satu jalinan yang utuh, tak terpisahkan, dan antara satu dengan lainnya saling mendukung, serta dalil yang satu berfungsi sebagai penjelasan bagi *dalil* yang lain. Bertolak dari prinsip dari kesatuan *dalil* tersebut maka pemahaman terhadap syariat Islam tidak cukup hanya berdasarkan tekstual-nya, namun harus juga memperhatikan *spirit* (tujuan serta rahasia) syariat itu sendiri, sehingga syariat Islam dapat menjadi rahmat yang membawa hikmah yang besar bagi umat manusia.⁷ Memang di dalam *al-Qur'an* sendiri terdapat sekitar 500 ayat yang sifatnya mutlak, kekal dan tidak dapat diubah. Namun perincian dari ajaran pokok tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan, waktu dan tempat, sehingga Isl m (*Senentiasa sesuai untuk setiap zaman dan tempat*)

Menurut Raisuni, *maqashid syari'ah* telah dikembangkan oleh para mujtahid sebelum *Al-Syatibi* dan bahkan dikembangkan dan disempurnaka juga oleh para pemikiran kontemporer zaman ini. Kata al-maqashid sendiri menurut *Ahmad Raisuni*, pertama kali digunakan oleh *Al-Turmudzi Al Hakim*,(W. 285H) yang pertama kali

5.Syamsul Bahri, dkk., *Metodologi Hukum Islam* Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008, hlm. 90672



menyuarakan *maqashid syari'ah* melalui buku bukunya, *Al-Shalat wa Maqashiduha, Al-Hajj wa Asraruh, Al-'Illah, 'Ilal AlSyari'ah, 'Ilal Al-'Ubudiyyah* dan *Al-Furuq*.

Setelah *Al-Hakim* kemudian muncul *Abu Mansur Al-Maturidi* (w. 333. H.) dengan karyanya *Ma'khaad Al-Syara'* disusul *Abu Bakar Al-Qaffal Al-Syasyi* (w.365 H.) dengan bukunya *Ushul Al-Fiqh* dan *Mahasin AlSyari'ah*. Setelah *Al-Qaffal* muncul *Abu Bakar Al-Abhari* (w.375 H.) dan *Al Baqillany* (w. 403 H.) masing-masing den karyanya, diantaranya adalah : *Mas'alah Al-Jawab wa Al-Dalail wa Al-'Illah dan Al-Taqrif wa Al-Irsyad fi Tartib Thuruq Al-Ijtihad*. Sepeninggal *Al-Baqillani* (403 H/ 1013 M) muncullah *Al-Juwaini*, (W. 478 H) *Al-Ghazali*, (W. . 505H. / 1111 M) *Al-Razi*, (W. 1890) *Amidi*, (W. Ibn31 H / 1233 M) *Hajib*, (W.672 H) *Baidhawi*, (W. 672 H.) *Al-Asnawi* (808 H) *Ibnu Subki*, (W. 756 H), *Ibnu Abd Al-Salam*, (W. 660 H), *Al-Qarafî*, (W. 1285 H), *Al-Thufi*, (W. 716 H), *Ibnu Taimiyyah* (W. 728 H/ 1328 M) dan *Ibnu Al-Qayyim*. (W. 756 H).

Pada perkembangan selanjutnya penelaahan terhadap *maqashid syari'ah* semakin mendapat perhatian di kalangan ulama ushul. Imam *Al Haramain Al-Juwaini*, *Abu Al-Ma'ali Abd Al-Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf Al-Juwaini* (W. 478 H/1085 M) dapat dikatakan sebagai ulama ushul yang pertama kali meletakkan dasar kajian tentang *maqashid syari'ah* ini. Imam *Al-Juwaini* mengatakan orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan Allah dalam memberikan perintah dan larangan-Nya, maka ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istinbath hukum-hukum Syari'at. Pemikiran Imam *Al-Juwaini* ini selanjutnya dikembangkan oleh *AlGhazali*. (W. 505H. / 1111 M) . Bagi *Al-Ghazali*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memahami *maqashid syari'ah* berkaitan dengan pembahasan tentang *masalik al-munasabah* yang terdapat dalam *masalik atta'lil*. *Maqashid syari'ah* merupakan disiplin keilmuan Islam yang erat berhubungan dengan kajian ushul fiqh dan fiqh Islam dimana pada awalnya *maqashid syari'ah* hanya merupakan bagian kecil dalam kajian ushul fiqh.

Substansinya membahas seputar tujuan dan hikmah dari hukum-hukum syari'ah yang mencakup tiga bidang; Pertama, ibadah (ritual). Kedua, muamalah (interaksi sosial), dan Ketiga, *jinayah* (kriminal). Kajian *maqashid syari'ah* bisa diklasifikasikan juga sebagai bagian dari filsafat hukum Islam. Substansi pembahasan *maqashid syari'ah* ini kemudian mulai menjadi semakin berkembang dan mulai menjadi bahasan sendiri pada abad ke-5 Hijriyah.

Imam *Al-Haramain Al-Juwaini* merupakan salah seorang ulama ushul yang mulai menggunakan substansi *maqashid syari'ah* dalam istinbath hukum. Kitab-kitab yang dapat dikatakan sebagai embrio munculnya pembahasan *maqashid syari'ah* antara lain : *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh* karya Imam Al-Haramain Al-Juwaini (w. 478 H/1085 M), *Al-Mustashfa* dan *Al-Mankhul* karya Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), *Al-Ahkam fi Ushul Al-Ahkam* karya Saif Al-Din Al-Amidi (w. 631 H/1223 M), *Al-Qawaid Al-Kubra* karya Sulthan Al-Ulama Al-Izz Al-Din Ibn Abd Al Salam (w. 660 H/1261 M), *Majmu Fatawa Ibn Taimiyah* karya Taqiyyuddin Ibn Taimiyah (w. 728 H/1327 M), *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin* karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah (w. 751 H/1350 M), *Al-Qawa'id* karya Tajuddin Al-Subki (w. 756 H/1355 M), dan *Al-Muwafaqat* karya Al-Syatibi (w. 790 H/1388 M).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian pada akhir abad ke-20, muncul ulama-ulama kontemporer yang memperkokoh pilar kajian maqasid syari'ah dan memperkaya dimensi pembahasannya, di antara mereka adalah; Syaikh Thahir bin 'Asyur (w: 1973 M) yang menulis buku dengan judul *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, dan Syaikh Alal Al-Fasi (w: 1974 M) yang menyusun buku *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyah wa Makarimuha*.

Hukum Islam pada masa kini, menurut *Hallaq*, sebagaimana dikutip oleh *Syamsul Anwar*, menjadi sendi penting dalam upaya mencari identitas. Islam bukan hanya pada tataran hukum positif tetapi juga berfungsi sebagai keunikan kultural. Wacana-wacana Hukum Islam bermunculan seiring dengan perkembangan Sains - Teknologi serta putaran roda kemajuan zaman, seperti perkawinan via telepon, perkawinan bawah tangan, pencatatan perkawinan dan pembatasan umur perkawinan, pembatalan perkawinan, pada kenyataannya diakomodir sebagai sebuah peraturan undang-undang di sejumlah negara Muslim.

Tidak berhenti di sini, Hukum Islam juga selalu berkolaborasi dengan adat istiadat setempat. Tidak heran apabila banyak modifikasi hukum dan sorotan pun diarahkan terhadap hasil keputusan para hakim Pengadilan Agama (PA, PTA dan MA) yang ditemukan di lapangan, untuk dianalisa dan dikaji kembali oleh para Pakar / Ahli-nya . Salah seorang Ahli Hukum Islam Indonesia yang hendak dikaji dalam



tulisan ini dan banyak melakukan analisis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama dari berbagai tingkatnya adalah *H. Satria Effendi M. Zen*.⁸

Ada tiga puluh tiga keputusan Hakim, diseputar hukum keluarga Islam yang telah di Analisa oleh Beliau berdasarkan pendekatan uhuliyah. Jika ditelusuri secara seksama, bahwa gagasan-gagasan yang segar dan futuristik *Satria Effendi M. Zen*, mulai terlihat ketika Beliau, mengajar di program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang sudah berubah menjadi Universitas Islam Negeri

⁸. *Satria Effendi M. Zein*, lahir di Kuala Panduk, Riau pada 16 Agustus 1949, menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Kuala Panduk Riau, Tsanawiyah dan Aliyah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Sumatera Barat, gelar Lc didapat di Universitas Damaskus Syria, MA di Universitas King Abdul Aziz Mekkah, dan gelar Doktor dalam bidang Usul Fikih dengan Yudisium Cumlaude di Universitas Ummul Qura Mekkah setelah mempertahankan disertasi yang berjudul *al-Majmu' wa Dilalatuhi 'ala al-Ahkam*", sebuah studi kritis atas pemikiran hukum *Sirajuddin al-Ghaznawi* dalam karya *Syarah al-Mughni fi Ushul al-Fiqh li al-Khabbazi*. Sementara itu, gelar Guru Besar Madya dalam bidang Ilmu Usul Fikih telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2002, tetapi sebelum sempat dikukuhkan beliau telah menghadap kehadiran Allah SWT, pada hari Jumat dini hari 2 Februari 2000. Beliau adalah dosen pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga pada beberapa pascasarjana IAIN lainnya seperti Yogyakarta, Riau, Padang, dan Ujung Pandang. Selain itu, mengajar pula di pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pascasarjana IIQ, Ketua Jurusan Jinayah-Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta dan Dosen di beberapa Perguruan Tinggi Swasta seperti Institut Agama Islam Darurrahman, Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA), dan Fakultas Syari'ah IIQ, wakil Ketua Fatwa MUI, Wakil Ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase MUI (BAMUI), Anggota Dewan Syari'ah Nasional (DSN MUI), Ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Asuransi MAA, dan wakil RI pada Lembaga Pengkajian Hukum Islam (Majma' al-Fiqh al-Islami) Organisasi Konferensi Islam (OKI), aktif memberikan ceramah Agama dan seminar, banyak karya ilmiah yang almarhum tulis, di antaranya: "*Fikih Umar bin Khattab*", dalam Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer, 1988, "*Elastisitas Hukum Islam*", dalam buku Metode Mempelajari Islam, 1992, "Fikih Mu'amalat (Suatu upaya rekayasa Sosial umat Islam Indonesia)", dalam buku Aktualisasi Pemikiran Islam, "*Wawasan al-Qur'an tentang Hubungan Manusia dengan Alam Sekitarnya*", dalam buku *al-Qur'an – IPTEK dan Kesejahteraan Umat*, "*Metodologi Hukum Islam*", dalam buku Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pengembangan Hukum Nasional, *Problema Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, baca *Satria Effendi M. Zein*, *Problema Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004). Dalam bentuk perkuliahan umum yang Penulis ikuti, Satria Effendi M. Zein, banyak melontarkan pemikiran-pemikiran yang baru bagi Penulis dan teman-teman lainnya, seperti, "*Teori Mukhoti'ah dan Mushowibah, Dalam menentukan kebenaran apakah "satu" atau "berbilang" dikalangan Ulama, Mafhum dan maantuaq, dan metode Tahkriju al-Ahkam bi al-Aqwal al-Ulama'*", kuliah di IAIN Susqa, Pekanbaru – Riau, tahun 1998-1999.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(UIN) Jakarta) dibawah pimpinan seorang yang sangat rasional dalam pemikiran keagamaannya yakni Harun Nasution.

Pada saat itu, Paskasarjana IAIN Jakarta (lebih di kenal dengan sebutan IAIN Ciputat) adalah identik dengan pola dan cara berfikir yang rasional yang dikembangkan oleh Harun Nasution. Begitu gencarnya kecendrungan rasionalisasi dalam memahami ajaran Islam, seringkali ahli hukum Islam (Fakultas Syari'ah) dianggap sebagai kelompok yang tidak bisa diajak untuk mengembangkan penalaran, sampai-sampai pernah dinyatakan bahwa orang-orang Fakultas Syari'ah sulit untuk diajak berfikir rasional dan modern.⁹

Dalam suasana seperti itulah Beliau hadir dan memyuguhkan pemikiran-pemikirannya yang sangat akomodatif untuk menjembatani kesenjangan yang terjadi antara pemikiran konvensional dan pemikiran rasional yang modern. Dari saat itulah di Paskasarjana IAIN Jakarta mulai menerapkan bahan – bahan ajar/materi perkuliahan serta literatur yang digunakan lebih banyak mengarah kepada analisis relatif rasional.

Dalam ilmu Ushul fiqh misalnya, ditemukan materi yang berbicara tentang kedudukan akal dan wahyu dalam hukum islam, konsep *ta'aquli* dan *ta'abudi* dan sudah barang tentu pembahasan konsep *maqasyid asy-Syari'ah* yang mengarah pada pembahasan filosofis di syari'atkannya Hukum Islam itu menjadi forsi utama dalam analisa-analisa yurisprudensi hukum Islam, yang dilakukan oleh *Satria Efenddi*

⁹ Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Diterbitkan Atas Kerja Sama Dengan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004, hal. 522

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



M.Zein, terhadap berbagai persoalan yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

Misalnya, tentang akad nikah via telepon. Masalahnya bermula dari keputusan Peradilan Agama Jakarta Selatan yang mengesahkan akad nikah melalui telfon antara seorang pria di Amerika Serikat dan seorang wanita di Indonesia. Menurut *Satria Effendi M. Zen*, bahwa masalah tersebut, jika ditinjau dari fiqih Mazhab *Syafi'I* yang menyatakan bahwa para pihak (yang sedang melansungkan akad nikah) harus secara *Mu'ayyanah* (berhadap-hadapan secara fisik), maka hal itu atau pernikahan via telfon itu dianggap tidak Sah. Tetapi beliau mengakui bahwa pendapat Mazhab ini, terkesan sangatlah kaku, sehingga kalau hanya mengacu pada Mazhab ini, maka pelaksanaan akad nikah tidak-kann pernah berkembang, untuk menjawab kemajuan zaman. Masalah yang diannggap penting untuk diperbincangkan adalah masalah keharusan hadir pada satu majlis atau bersatu majlis (*ittihad al-Majlis*) dalam melakukan ijjab-Kabul. Apakah masing-masing pihak harus bisa saling mendengar, saling bisa melihat, dan harus saling berhadapan secara fisik, ketika akad nikah terjadi.

Kemudian menyangkut dengan pernikahan dibawah tangan, yang masalahnya bermula dari Keputusan Peradilan Agama (PA) Tanjung Karang yang telah mengabulkan permohonan pemohon untuk menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Keputusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA) RI. Dalam perkara ini Satria Effendi tidak setuju dengan keputusan Peradilan Agama (PA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tanjung Karang, sebab menurut Satria Effendi, terdapat aspek Syarat *Tawsiqy* (Administrator) yang jika diabaikan akan berakibat negatif bagi kehidupan.

Jadi, Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sah secara Undang-Undang (UU). Namun tidak dicatatnya suatu perkawinan, tidak layak dijadikan *senjata* untuk melepaskan tanggung-jawab oleh suami yang memang telah pernah hidup Bersama secara sah menurut syara' dengan pemohon.

Dalam Islam, perkawinan/nikah sering dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan menjadi salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Perkawinan adalah sesuatu yang amat penting bagi pemeluk agama islam, karena banyak hikmah yang terkandung di dalam Lembaga perkawinan. Generasi yang baik hanya dapat muncul dari lingkungan yang baik, lingkungan yang baik hanya dapat dibangun dari keluarga yang baik dan keluarga yang baik berawal dari sebuah perkawinan yang baik, dan sebuah perkawinan baru dapat baru dapat dikatakan baik jika ia dilakukan secara benar menurut hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT., dan berdasarkan Sunnah Nabi Muhammad SAW.¹⁰

Demikian pula dengan kasus pembatalan pernikahan, masalahnya bermula dari penolakan Pengadilan Agama (PA) Klaten atas permohonan untuk membatalkan nikah yang sudah berlangsung puluhan tahun dan orang-orang-nya pun telah pula meninggal dunia, tetapi kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang dan akhirnya, Mahkamah Agung (MA) RI. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi

¹⁰ Hj. Khofifah Indar Parawansa, *Perkembangan Pemikiran Aktual Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makalah Sminar, Diterbitkan oleh, Pucuk Pimpinan Muslimat Nahdatul Ulama' Bekerjasama dengan Departemen Agama RI, Hal, 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Agama (PTA) Semarang, atau menguatkan Peradilan Agama (PA) Klaten. Dalam hal ini, Satria Effendi menganalisisnya sebagai berikut; Seandainya pernikahan itu dinyatakan batal, sebagaimana tuntutan Pemohon, maka secara fiqih anak yang lahir tetap berhak memperoleh warisan, sebab ketika akad nikah dilaksanakan sampai kepada pembatalan nikah oleh Peradilan Agama (PA) Klaten itu, para pihak tidak merasa melanggar hukum. Oleh karena itu, anak yang lahir pada masa sebelum pembatalan pernikahan itu, adalah sah menurut ketentuan hukum.

Dari beberapa hasil Analisa yang dilakukan oleh *Satria Effendi M. Zen*, diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap Analisa-nya yang sarat dan kental dengan nuansa Ushuliyah itu, dari perspektif *Maqosyid Al-Syari'ah*

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian-uraian diatas, maka permasalahan yang hendak ditelaah adalah:

1. Bagaimanakah Pemikiran *Satria Effendi M. Zein* dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia ?
2. Bagaimana Analisis *Maqasyid asy-Syari'ah* terhadap pemikiran *Satria Effendi M. Zein* dalam beberapa masalah hukum keluarga di Indonesia

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ilmiah ini, antara lain:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk menelusuri jejak pemikiran *Satria Effendi M. Zein* sebagai salah seorang tokoh intelektual yang cukup banyak memberikan perhatian serius pada perkembangan Hukum Islam di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dan memahami model *Maqasyid Asy-Syari'ah* yang digunakan *Satria Effendi M. Zein* dalam menganalisa putusan Hakim Peradilan Agama di semua Tingkat, yang sesuai dengan kondisi sosio-kultural masyarakat.
- c. Untuk mengetahui bangunan pemikiran dan interpretasi *Satria Effendi M. Zein* terhadap konsep *Maqasyid Asy-Syari'ah* yang sesuai dengan konteks ilmu Ushul-Fiqh.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian pemikiran Hukum Keluarga Islam bagi khayalak pembaca dan penulis sendiri tentang dasar-dasar hukum Islam (ushul-fiqh) yang berkaitan dengan perkembangan Hukum Islam sesuai dengan kondisi kekenian.
- b. Penelitian ini akan memberikan banyak informasi yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, yang senantiasa laju dalam mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dizaman modern.



D. KAJIAN PERPUSTAKAAN

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menela'ah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹¹ Sebagaimana yang telah Penulis ketahui bahwa belum ada tulisan yang membahas tentang analisis, terhadap Analisa *Satria Effendi M.Zen.* dalam masalah Hukum keluarga di Indonesia. Walaupun ada juga beberapa tulisan yang memaparkan tulisan yang berhubungan dengan Beliau, baik dalam bentuk skripsi, maupun jurnal, namun tulisan – tulisan tersebut masih bersifat parsial dan tidak mendalam. dalam melihat sistem berfikir *Satria Effendi M.Zen.*

Tulisan ini berupaya untuk menyoroti pemikiran *Saatia Effendi M. Zein*, dari konteks metodologi Hukum Islam, yakni. Penggunaan maqasyid asy-Syari'ah dalam setiap analisis Beliau.

E. KERANGKA TEORITIS PEMBAHASAN

Maqashid jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Syari'ah adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *maqashid al-syariah* secara istilah adalah المعاني التي شري عتة له الاحكام (*al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam*) yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Reneka Cipta, 2005, hlm. 58.



berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *maqashid al-syariah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash.

Agar dapat memahami *Maqashid al-Syariah* atau tujuan syariah secara sempurna, maka terlebih dahulu dipaparkan beberapa unsur dari *maqashid al-syariah*, yaitu *Hakim, Hukum, Mahkum Fih dan Mahkum Alaih*.

Al-Syatibi (W 790 H/ 1388 M) , ketika berbicara mengenai *maslahat* dalam konteks *al-maqasid* mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (Syari') adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), bahwa kewajiban-kewajiban syari'at dimaksudkan untuk memelihara *al-maqasid*.⁸

Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *al-maqasid*. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syariah*, *al-maqasid al-syar'iyyah*, dan *maqasid min syar'i al-hukm*. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

Menurut *al-Syatibi* yang dimaksud dengan *al-maslahah* dalam pengertian syari' mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.

Dalam *al-Muwafaqat*, *al-Syatibi* membagi *al-maqasid* dalam dua bagian penting, yakni maksud syari' (*qashdu asy-syari'*) dan maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Al-Syatibi tidak menjelaskan definisi *maqashid syariah* dalam bukunya, ia langsung menjelaskan detil isi *maqashid syariah* dari pembagiannya. *Syatibi* membagi *maqashid* menjadi dua, *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Kemudian ia membagi *qashdu syari'* menjadi empat macam. Pertama, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*; kedua, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*; ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*; keempat, *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah*. Sedangkan bagian *qashdu al-mukallaf*, *Syatibi* tidak menyebutkan macam-macamnya.

Selanjutnya akan dijelaskan macam-macam dari *qashdu al-syari'* satu persatu. Macam pertama adalah *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan Tuhan meletakkan syariah). Maksud Allah menetapkan syariah tidak lain guna kepentingan masalah hamba-Nya. *Syatibi* membagi masalah tersebut menjadi tiga derajat be urutan dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* memegang derajat *masalah* tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi *masalah dharuriyyah*-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan *masalah dharuriyyah* yang hilang. *Maslahah dharuriyyah* dilakukan dengan menjaga ; Agama, diri, nasab, harta, dan akal. Kelima hal ini, oleh *asy-syatibi* disebut dengan *Ushul al-din*, *Qawaid al-Syariah*, dan *Kulliyyah al Millah*

Asy-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah ialah untuk menjaga dan memeprijuangkan tiga kategori hukum, yang disebut dengan *daruriyyat*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hajiyyat dan *tahsiniyyat*. Tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan (*masalih*) kaum muslimin, baik didunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang baik, karena menurut Asy-Syatibi prinsip ditutunkannya syari'at itu adalah الشريعة وضعت لمصالح العباد (*Syari'at* dibuat untuk mewujudkan kemashlahatan bagi hamba).

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam *AlQur'an*, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam *fiqh*, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam

UIN SUSKA RIAU



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN MAQASHID SYARI'AH

Tidak diragukan lagi bahwa agama Islam diarahkan pada tujuan – tujuan yang dikehendaki PenciptaNya Yang Maha Bijaksana. Demikianlah hukum islam mempunyai tujuan. Tujuan hukum islam itu pada hakekatnya adalah tujuan Pencipta hukum islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam itu menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan menta'ati semua hukum-hukum-Nya.

Dalam Islam secara tegas dijelaskan bahwa Allah SWT., tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia sebagaimana firman-Nya sebagai berikut :

1. Surat ke- 21, Al-Anbiya' ayat 16;

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لْعَيْنٍ

Artinya: “Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main”

Maksudnya: Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah dengan maksud dan tujuan yang mengandung hikmat.

2. Surat ke-23 Al-Mu'minin ayat 115;

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ



Artinya: “Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?”

3. Surat Ali-Imran Ayat 191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا

خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya : “ (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka”.

Bagian terbesar dalam penciptaan Allah adalah manausia karena manusia mempunyai kemungkinan untuk menerima peradaban dan kebudayaan (*al-tamddun*). Dengan demikian tidaklah Allah SWT., mengutus Rasul-rasul-Nya dan menurunkan Wahyu-Nya selain untuk menegakkan keteraturan manusia. Tujuan penciptaan ini dinyatakan dalam al-Quran Surat ke-57 *al-Hadid* ayat 25;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ

وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”.

Islam adalah syari'at yang terbesar dan paling tegar sebagaimana yang dinyatakan Al-Quran Surat ke-3 *Ali Imran* ayat 19

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ

مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِنَائِتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”.

Kebesaran dan ketegaran islam dinyatakan sendiri oleh Allah dalam al-Quran. Ia menyatakan bahwa kitab-kitab suci sebelum al-Quran disebut sebagai *al-huda'* (petunjuk); dan *al-din* (agama) seperti pernyataan-Nya dalam surat ke-4 al-Nisa' ayat 171;

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلٰى اِلٰهِ اِلَّا الْحَقُّ ۚ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ

عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلٌ ۗ اَللّٰهُ وَكَلِمَتُهُ اَنْزَلْنٰهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۖ فَحَامِنُوْا بِاللّٰهِ

وَرُسُلِهٖ ۖ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۚ اَنْتَهُوَ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ اِنَّمَا اِلٰهُ اِلٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحٰنَهُ اَنْ

يَكُوْنَ لَهُۥ وَلَدٌ ۗ لَّهٗۤ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ﴿۱۷۱﴾

Artinya: “Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan:

"(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari Ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara”.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah SWT., “Dia” tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Setiap apa yang “Dia” lakukan pastilah ada tujuannya, yakni untuk kemahslahatan manusia. Tujuan-tujuan Allah tersebut adalah Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah*. *Maqasyid Asy-Syari'ah*, merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*.

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan *syari'at*) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. *Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, (W. 751 H.) menyatakan bahwa tujuan *syari'at* adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. *Syari'at* semuanya adil, semuanya berisi rahmat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.¹

Oleh karenanya, secara global dapat dipahami, bahwa tujuan Syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maaupun kemaslahatan di hari yang *baqa* (kekal) kelak, hal ini berdasarkan antara lain:

Firman Allah SWT., dalam Al-Quran Surat Al- Anbiya' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Konsep *maslahat* berasal dari bahasa Arab,² yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia.³ Kata *mashlahat* telah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia.⁴ Secara konvensional, maknanya mengacu pada pemenuhan kepentingan umum bagi komunitas muslim. Lawan katanya adalah *mafsadat* atau *mudharat*. Konotasi kedua kata ini negatif, yaitu kerusakan, kehancuran, kerugian, bahaya dan kegagalan.

¹ Ibnu Qaiyyim Al Jauziayah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, di terjemah oleh: Muhammad Abdus Salam Ibrahim, (*Panduan Hukum Islam*), Penerbit, Beirut, Daar al- Kutub al- Ilmiyah, 1417/1996, (Jilid 1-IV), Hal. 601.

² Secara harfiah, *Mashlahat* berasal dari kata yang tersusun atas tiga huruf, yaitu *shad*, *lam*, dan *ha* (*shalaha*). Kata “*shalaha*” sebagai kata dasar *mashlahat*, memiliki sinonim yang banyak sekali yang kesemuanya bermakna (pada posisi) positif atau kebaikan.

³ Dalam Kamus Arab-Indonesia, misalnya, *Mashlahat* diartikan dengan damai, baik, bagus, sesuai, layak, patut, bermanfaat, berguna, kapabel, lurus, sempurna, kenikmatan yang layak, berwewenang, dan kepentingan.

⁴ Kata Maslahat (*mashlahat*) ternyata sudah menjadi kata dalam bahasa Indonesia yang diartikan : Sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah, guna. Kemaslahatan diartikan: Kebaikan; manfaat; kepentingan). Mulyono dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdiknas, Th., 2000, hal., 563.

Para *fuqaha* telah merumuskan konsep ini dengan berbagai penafsiran. Reformulasi konsep tersebut berdasar konsep normatif dan empirisnya. Secara Normatif, *mashlahat* mengacu pada suatu keadaan yang seharusnya ada, sehingga hanya ada kebaikan, kenyamanan, dan kedamaian. Singkatnya, hanya ada hal-hal yang positif atau, disana tidak ada sama sekali hal-hal yang negatif, seperti kerusakan, bahaya dan kerugian. Adapun secara empiris, konsep *mashlahat* mengacu pada sejauh-mana sesuatu atau keadaan yang positif itu terealisasi sehingga keberadaannya dapat dirasakan dan dialami oleh masyarakat. Dengan kata lain, *mashlahat* adalah realitas yang sungguh-sungguh nyata ada dan dapat dirasakan.⁵

Hukum Islam yang menjanjikan *mashlahat* bagi hamba-hamba Allah (*al-Ibad*) konstruksi dan daya aturnya harus memihak pada *mashlahat* secara empiris itu. Mesti pula difahami bahwa aspek-aspek normatif kemashlahatan itu harus sepakat (*metching*) dengan aspek-aspek empirisnya. Kemashlahatan real itu meskipun simbolnya tidak menyebut islam.⁶

Keberadaan kemashlahatan itu harus nyata dirasakan dan dialami oleh hamba Allah (*al-I'bad*),⁷ yang dalam bahasa empirisnya disebut *al-ummah*. Dalam skema normatif-empiris, hukum Islam dapat dipahami sebagai *wasal* () dalam mencapai kemashlahatan Hamba-Nya *maqasyid*. Secara umum

⁵ Konsep ini sejalan dengan paradigma Ibn Taymiyah yang menyatakan bahwa : "*al-Haqiqah fi al-A'yan, la fi al-Adzan* (Kebenaran itu dalam kenyataan, bukan dalam alam fikiran)".

⁶ Tampaknya inilah yang dimaksud oleh Asy-Syathibi dengan pernyataannya :

ان احكام الشريعة ما شرعت الا لمصالح الناس . وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله (dimana pun ditemukan atau dirasakan kemashlahatan, di situlah tampak syari'at Allah) Al-Buti, Dlawait Al-Mashlahat, Daar Al-Kutub, Lebanon, tt, hal. 9.

⁷ Al-'Ibad (hamba Allah) sebagai pihak yang seharusnya menikmati kemashlahatan itu, adalah sebutan lain untuk manusia. Pengertian simboliknya adalah penikmat kemashlahatan itu bagi seluruh manusia dalam kesendirian dan dalam kebersamaannya. Pada konteks inilah, sebutan *al-'ibad* tampak relevan dengan *al-Ummah* (jamak "al-umam"), sehingga *mashalih li-al-'ibad* sama artinya dengan *mashlahat al-Ummah*.

ummah berarti dua orang atau lebih yang terhimpun dalam kelompok atau group. Menurut antropologi, kelompok adalah orang banyak (*The people*) yang menunjukkan ragam satuan-satuan komunitas yang tergabung dalam *ummah* itu, baik dari segi ras maupun etnis. Konsep empiris ummat orang-orang banyak yang tidak terbatas ragam partikalnya (sejarah, generasi, dan keturunan) dan ragam horizontalnya (sosial, politik, budaya dan ekonomi). Konsep normatif ummat adalah komunitas formal yang dilandasi oleh ikatan primordial agama, bangsa dan budaya. Rumusan konsep tentang ummah menunjukkan adanya sekelompok orang banyak, yang dibimbing oleh nilai-nilai dan norma budaya Islam. Jika kedua konsep empiris *mashlahat* itu digabungkan dengan konsep empiris ummat, maka hukum Islam dapat di realisasikan secara empiris dalam kenyataan untuk ummat yang beragam, akan tercapai fungsi islam sebagai agama yang menjadi *Rahmatan Lil 'alamin*.

Dalam rangka mewujudkan kemashlahataan ummat, didunia dan akhirat, berdasarkan penelitian ahli *Ushul-Fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan di wujudkan, kelima pokok tersebut adalah Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemashlahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *kemafsadatan* (mafsadat) manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok itu dengan baik.

Menurut *Al-Syatibi*, (W. 790 H/1388 M.) penetapan kelima pokok diatas, didasarkan atas dalil-dalil Quran dan Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *القواعد الكلية* (*al-qawaa'id al-kuliyyat*) dalam *الكلية الخمس* (*al-Kuliyyat al-khams*). Ayat-ayat al-Quran yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makiah, yang tidak di *nasakh* dan ayat-ayat *Madaniyah* yang mengukuhkan ayat-ayat *Makiah*. Diantara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum-minuman yang memabukkan, larangan berzina, dan larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar,⁸ Ia, setelah melakukan penelitian dengan seksama, berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan

(*al-kuliyat al-Khams*) termasuk dalil-dalil *qath'i*, maka ia juga dapat dikelompokkan sebagai *qath'i*,⁹ agaknya yang dimaksud dengan istilah *qath'i* oleh *Al-Syaitibi* adalah bahwa (*al-kuliyatu al-Khams*), dari segi landasan hukum, dapat dipertanggung-jawabkan, dan oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum.¹⁰ Dan itulah oleh para ahli zaman belakangan ini disebut dengan *Maqasyid Asy-Syari'ah*.

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. *Izzuddin ibn Abd al-Salam*, (W. 660 H/

⁸ *Al-Syaitibi, Al-Muwafaqad fi Ushul al-Ahkam*, (t,t, : Dar al-Fikr, t,th,), Jilid III, hal. 62-64

⁹ *Ibid*, Jilid II, hal, 34

¹⁰ Bandingkan dengan pendapat *Al-Fasi* yang menyatakan bahwa : “maqasyid asy-syari'at dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang abadi dan tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum yang utama, *Al-Quran* dan *Hadits*, *Al-Fasi, Maqasyid asy-syari'at al-Islamiyyat wa Makarimuha*, (t,t, Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat, t,t, Hal, 51 – 52.

1262 M.) sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, mengatakan bahwa segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.

Menurut Satria Efendi, *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili, (W. 1436 H/2015 M) mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Adapun makna *maqashid al-syariah* secara istilah adalah *عنايتها لها الحكم* (*al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam*) yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *maqashid al-syariah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash. Secara bahasa *Maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Makna ini dapat juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*). Sedangkan *syari'ah* secara bahasa menunjukkan kepada tiga pengertian, yaitu sumber tempat air minum, jalan yang lurus dan terang dan awal dari pelaksanaan suatu pekerjaan.¹¹

Dari makna *al-maqashid* dan *al-syariah* secara bahasa, kita dapat mengambil pengertian bahwa *maqashid al syariah* adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat.

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqasid al syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran syariat yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *Syari'* dalam setiap ketentuan hukum. Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan ditetapkannya hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia.¹² Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah.¹³

¹¹ Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 891

¹² Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutubal-Ilmiyah, 2003), Juz. I, h. 41

¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran liberal*, judul asli: *Darajat fi Fiqh Maqashid al-syari'ah (Baina al- maqashid al-Kulliyat wa al-Nusus al-juz'iyyat)*, Penerjemah: Erif Munandar Risawanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), Cet. I, h. 16-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama *Ushul Fiqih* mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *Maqashid syari'ah* di kalangan ulama *ushul fiqih* disebut juga *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Penggunaan pendekatan melalui *maqashid syari'ah* dalam menetapkan hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Hal demikian tersirat dari beberapa ketentuan Nabi SAW. Hal ini dapat dilihat, antara lain pada suatu peristiwa ketika Nabi SAW melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi SAW itu dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan itu disampaikan kepada Nabi SAW. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan *al-daffah* (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah). Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh *Ibnu Majjah* dalam kitab *Sunan Ibnu Majjah*:

رضي الله عنها، قالت إنما نهى رسول الله ﷺ عن لحوم إلا ضاحي لجهد الناس ثم رخص فيها

“[Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, Ia berkata ; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang (menyimpan) daging hewan kurban (saat atau

kondisi) orang-orang kesusahan hidup. Kemudian beliau meringankannya.!”(H.R Ibn Majah)

Kajian *maqashid syari’ah* kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh *Abu Ishaq al-Syathibi*. (W. 790 H./1388M.) Kajian tentang *maqashid syari’ah* ini menurut *al-Syathibi* bertolak dari asumsi bahwa segenap *syari’at* yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.

Menurut Satria Effendi M. Zein, *maqashid syari’ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. *Al-Syatibi* melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan hadis, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian, mustahil Allah menurunkan hukum tanpa tujuan tertentu, dan tujuan tersebut adalah untuk manusia.

2. *Maqâshid al-Syarî’ah* Menurut Ahli *Ushûl al-Fiqh*

Maqâshid al-Syarî’ah merupakan kata majmuk (*idlaft*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqâshid* dan *al-Syarî’ah*. Secara etimologi, *Maqâshid* merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata *maqshid*. yang terbentuk dari huruf qâf, shâd dan dâl, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-syarî’ah* secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

etimologi berasal dari kata ‘*syara’a yasyra’u syar’an*’ yang berarti membuat *syari’at* atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan ‘*syara’a lahum syar’an*’ berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan. Sedangkan *syari’ah* secara terminologi ada beberapa pendapat.

Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa *syari’ah* adalah *canon law of Islam*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas. Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa *syari’ah* adalah ‘*al-nushûsh al-muqaddasah*’ (

) yaitu *nash* yang suci yang terdapat dalam Al-Qur’an dan *al-Hadits al-Mutawâtirah*, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia. sehingga cakupan *syari’ah* ini meliputi bidang *i’tiqâdiyyah*, *‘amaliyah* dan *khuluqiyah*. Demikianlah makna *syari’ah*, akan tetapi menurut ulama-ulama *mutaakhirin* telah terjadi penyempitan makna *syari’ah*. Mahmud Syalthûth (W. 1963 M) memberikan uraian tentang makna *syari’ah*, bahwa *syari’ah* adalah hukum-hukum dan tata aturan yang dishari’atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan. Sedangkan Ali al-Sayis (W. 1976 M.) menjelaskan bahwa *syari’ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.

Dengan mengetahui pengertian *maqâshid* dan *al-syari’ah* secara etimologi, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian *Maqâshid al-Syari’ah* secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan dishari’atkannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa *Maqâshid al-Syarî'ah* erat kaitanya dengan *hikmah* dan *'illat*.

Sementara apabila kita berbicara *Maqâshid al-Syarî'ah* sebagai salah satu disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan kita jumpai definisi yang konkrit dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik, sehingga akan kita dapati beragam versi definisi yang berbeda satu sama lain, meskipun kesemuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama. Oleh karena itulah, kebanyakan definisi *Maqâshid al-Syarî'ah* yang kita dapati sekarang ini, lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti *Tahir bin Asyûr* (W. 1973 M.) yang membagi *Maqâshid al-Syarî'ah* menjadi dua bagian. Yaitu *Maqâshid al-Syarî'ah al-'âmmah* dan *Maqâshid al-Syarî'ah al-khashah*. Bagian pertama ia maksudkan sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya syarî'ah secara umum yang meliputi seluruh aspek *syarî'at* dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu. Sementara bagian kedua ia maksudkan sebagai seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh *al-syâri'* dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dengan mengkhususkannya pada satu bidang dari bidang-bidang *syari'at* yang ada, seperti pada bidang ekonomi, hukum keluarga.

Sedangkan menurut *'Allal al-Fâsi* (W. 1974 M.) adalah metode untuk mengetahui tujuan pensyari'atan sebuah hukum untuk menjamin kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan yang mengandung kemaslahatan untuk manusia. *Wahbah al-Zuhaili* mengatakan bahwa *maqâsid al-syarî'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rahasia syarî'ah, yang ditetapkan oleh *al-Syâri'* (pembuat syari'at yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum. Sementara *al-Syâthibi* menyatakan bahwa beban-beban *syarî'ah* kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam: *dlarûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tahsîniyyât*.

Al-Syâri' memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *maqâshid al-syarî'ah* tersebut, para ulama *ushûl al-fiqh* sepakat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya *syarî'at*. Pengaplikasian *syarî'at* dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbis pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.

Pada masa awal pengembangan pemikiran hukum Islam, pembahasan *Maqâshid al-Syarî'ah*, menempati posisi yang tidak terlalu signifikan, bahkan terkesan dikesampingkan. Para ulama (*ushûliyyin*) sebatas menempatkannya pada tulisan-tulisan tambahan saja pada hukum-hukum suatu madzhab. Berbicara lebih dalam, pemikiran hukum Islam telah diikat oleh perhatian para ulama, hukum Islam hanya dikaitkan dengan kajian *ushûl al-fiqh* dan *qawâ'id al-fiqh* yang hanya berorientasi pada teks dan bukan pada makna dibalik teks. Seharusnya kajian *ushûl al-fiqh*, *qawâ'id al-fiqh* dan *Maqâshid al-Syarî'ah* merupakan tiga hal yang menjadi unsur-unsur sebuah sistem yang tidak terpisahkan dan berkembang dalam garis linier yang sama. *Ushûl al-fiqh*, merupakan metodologi yang harus diaplikasikan untuk menuju sebuah hukum Islam, *qawâ'id al-fiqh* merupakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pondasi dasar bangunan hukum Islam yang ada, sedangkan *Maqâshid al-Syarî'ah* merupakan nilai-nilai dan spirit atau ruh yang berada pada hukum Islam itu sendiri.

Al-Juwaini (W. 478 H.) oleh para *Ushûliyyin* kontemporer dianggap sebagai ahli *ushûl al-fiqh* pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqâshid al-Syarî'ah* dalam menetapkan sebuah hukum. Lewat karyanya yang berjudul *al-Burhân fî Ushûl al-Ahkâm*, beliau mengembangkan kajian *Maqâshid al-Syarî'ah* dengan mengelaborasi kajian 'illat dalam *qiyâs*. Menurutny asal yang menjadi dasar 'illat dibagi menjadi tiga; yaitu: *Dlarûriyyât*, *Hâjiyyât* dan *Makramât* yang dalam istilah lain disebut dengan *tahsîniyyât*. Kerangka berfikir *al-Juwaini* (W.478 H) tersebut dikembangkan oleh muridnya *Muhammad bin Muhammad al-Ghazali* (w. 505 H). Lewat karya-karyanya; *Syifâ al-Ghalîl*, *al-Mushthafâ min 'Ilmi al-Ushûl* beliau merinci maslahat sebagai inti dari *maqâshid al-syarî'ah* menjadi lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima maslahat ini berada pada tingkat yang berbeda sesuai dengan skala prioritas maslahat tersebut. Oleh karena itu beliau membedakanya menjadi tiga kategori; yaitu: peringkat *dlarûriyyât*, *hajiyyât* dan *tahsiniyyât*.

Ahli *ushûl al-fiqh* selanjutnya yang membahas secara spesifik *Maqâshid al-Syarî'ah* adalah 'Izzu al-Dîn bin 'Abdi al-Salâm tokoh *ushûl* bermadhab *Syafi'i*. Melalui karyanya *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, beliau telah mengelaborasi hakikat maslahat dalam konsep *Dar'u al-Mafâsid wa Jalbu al-Manâfi'* (menolak atau menghindari kerusakan dan menarik manfa'at). Baginya maslahat tidak dapat terlepas dari tiga peringkat, yaitu *dlarûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tatimmât* atau *takmîlât*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ahli *ushûl al-fiqh* yang membahas konsep *Maqâshid al-Syarî'ah* secara khusus, sistematis dan jelas adalah *Abu Ishâq al-Syâthibi* (w 790 H) pada pertengahan abad ke-7, dari kalangan *madhhab Maliki*. Melalui karyanya yang berjudul *al-Muwâfaqât* beliau menyatakan secara tegas bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklîf dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan hukum tersebut. Menurutnya maslahat adalah memelihara lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Beliau juga membedakan peringkat maslahat menjadi tiga kategori, yaitu *dlarûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tatimmât* atau *tahsîniyyât*.

Pada abad ke-20, *Muhammad Thâhir ibn 'Asyur* (1879-1973 M) dari Tunisia dianggap sebagai tokoh *maqâshid al-syrî'ah* kontemporer setelah *al-Syâthibi*. Beliau telah mampu memisahkan kajian *Maqâshid al-Syarî'ah* dari kajian *ushûl al-fiqh*, yang sebelumnya merupakan bagian dari *ushûl al-fiqh*.

B. SEJARAH MAQASHID SYARI'AH

Jika ditelusuri sejarah perkembangan tentang kajian *maqashid syari'ah* maka diketahui bahwa perhatian terhadap *maqashid syari'ah* initalah ada sejak masa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Penelaahan terhadap *maqashid syari'ah* mulai mendapat perhatian yang intensif setelah *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam* wafat, di saat para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa *Rasulullah* masih hidup. Perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Perubahan sosial seperti ini menuntut kreatifitas para sahabat untuk memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial itu.

Menurut Ahmad Raisuni, *maqashid syari'ah* telah dikembangkan oleh para mujtahid sebelum Al-Syatibi dan bahkan dikembangkan dan disempurnakan juga oleh para pemikiran kontemporer zaman ini. Kata *al-maqashid* sendiri menurut Ahmad Raisuni, pertama kali digunakan oleh Al-Turmudzi Al-Hakim, (W. 285 H.) yang pertama kali menyuarakan *maqashid syari'ah* melalui buku-bukunya, *Al-Shalat wa Maqashiduhu*, *Al-Hajj wa Asraruh*, *Al-'Illah*, *'Ilal Al-Syari'ah*, *'Ilal Al-'Ubudiyyah* dan *Al-Furuq*. Setelah Al-Hakim kemudian muncul Abu Mansur Al-Maturidi (w.333. H.) dengan karyanya *Ma'khad Al-Syara'* disusul Abu Bakar Al-Qaffal Al-Syasyi (w.365 H.) dengan bukunya *Ushul Al-Fiqh* dan Mahasin Al-Syari'ah. Setelah Al-Qaffal muncul Abu Bakar Al-Abhari (w.375 H.) dan Al-Baqillany (w. 403 H.) masing-masing dengan karyanya, diantaranya adalah: *Mas'alah Al-Jawab wa Al-Dalail wa Al-'Illah dan Al-Taqrir wa Al-Irsyad fi Tartib Thuruq Al-Ijtihad*. Sepeninggal Al-Baqillani (W. 403 H.), muncullah Al-Juwaini, (W. 478 H.) Al-Ghazali, (W. 505 H) Al-Razi, (W. 1209 M.), Al-Amidi (W. 631 H.), Ibnu Hajib (W. 672 H.), Al-Baidhawi (W. 685 H.), Al-Asnawi (W. 772 H.), Ibnu Subki (W. 756 H.), Ibnu Abd Al-Salam (W. 660 H.), Al-Qarafi (W. 1285 M.), Al-Thufi (W. 716 H.), Ibnu Taimiyyah (W. 728 H.) dan Ibnu Al-Qayyim (W. 751 H.).

Pada perkembangan selanjutnya penelaahan terhadap *maqashid syari'ah* semakin mendapat perhatian di kalangan ulama *ushul*. Imam Al-Haramain Al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juwaini, Abu Al-Ma'ali Abd Al-Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf Al-Juwaini (W. 493 H.) dapat dikatakan sebagai ulama *ushul* yang pertama kali meletakkan dasar kajian tentang *maqashid syari'ah* ini. Imam Al-Juwaini mengatakan orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan Allah dalam memberikan perintah dan larangan-Nya, maka ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan *istinbath* hukum-hukum *Syari'at*. Pemikiran Imam Al-Juwaini ini selanjutnya dikembangkan oleh Al-Ghazali. Bagi Al-Ghazali memahami *maqashid syari'ah* berkaitan dengan pembahasan tentang *masalik al-munasabah* yang terdapat dalam *masalik atta'lil*.

Maqashid syari'ah merupakan disiplin keilmuan Islam yang erat berhubungan dengan kajian *ushul fiqh* dan *fiqh* Islam dimana pada awal-nya *maqashid syari'ah* hanya merupakan bagian kecil dalam kajian *ushul fiqh*. Substansinya membahas seputar tujuan dan hikmah dari hukum-hukum *syari'ah* yang mencakup tiga bidang; Pertama, *ibadah* (ritual). Kedua, *muamalah* (interaksi sosial), dan Ketiga, *jinayah* (kriminal). Kajian *maqashid syari'ah* bisa diklasifikasikan juga sebagai bagian dari filsafat hukum Islam. Substansi pembahasan *maqashid syari'ah* ini kemudian mulai menjadi semakin berkembang dan mulai menjadi bahasan sendiri pada abad ke-5 Hijriyah. Imam Al-Haramain Al-Juwaini merupakan salah seorang ulama *ushul* yang mulai menggunakan substansi *maqashid syari'ah* dalam *istinbath* hukum. Kitab-kitab yang dapat dikatakan sebagai embriomunculnya pembahasan *maqashid syari'ah* antara lain : *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh* karya Imam Al-Haramain Al-Juwaini (w. 478 H/1085 M), *AlMustashfa* dan *Al-Mankhul* karya Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), *Al-Ahkam fi Ushul Al-Ahkam* karya Saif Al-Din Al-Amidi (w. 621 H/1223M),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qawaid Al-Kubra karya Sulthan Al-Ulama *Al-Izz Al-Din Ibn Abd AlSalam* (w. 660 H/1261 M), *Majmu Fatawa Ibn Taimiyah* karya *Taqiyuddin Ibn Taimiyah* (w. 728 H/1327 M), *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin* karya *Ibn Qayyim Al-Jauziyah* (w. 751 H/1350 M), *Al-Qawa'id* karya *Tajuddin Al-Subki* (w. 756 H/1355 M), dan *Al-Muwafaqat* karya *Al-Syatibi* (w. 790 H/1388 M).

Kemudian pada akhir abad ke-20, muncul ulama-ulama kontemporer yang memperkokoh pilar kajian *maqasid syari'ah* dan memperkaya dimensi pembahasannya, di antara mereka adalah; *Syaikh Thahir bin 'Asyur* (W. 1973 M) yang menulis buku dengan judul *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, dan *Syaikh Alal Al-Fasi* (w: 1974 M) yang menyusun buku *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyah wa Makarimuha*.

Kajian tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Hal ini disebabkan karena kajian ini melibatkan pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum. Filsafat hukum Islam sebagaimana filsafat pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Demikian juga dengan filsafat hukum Islam, seperti halnya tugas filsafat pada umumnya mempunyai dua tugas: *pertama*, tugas kritis dan, *kedua*, tugas konstruktif. Disiplin ilmu *maqashid syari'ah* ini dianggap prospektif dan memiliki jangkauan kedepan dalam literatur kajian Islam. *Imam Al-Haramain Al-Juwaini* dan muridnya *Imam Al-Ghazali*, merupakan dua ulama yang kitab-nya merupakan *ummahatul kutub* dalam *thariqah Syafi'iyah*. Disebutkan bahwa *Imam Al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haramain menyebutkan lafaz *al-maqashid*, *al-maqshud*, dan *al-qashdu* sebanyak sepuluh (10) kali dalam kitabnya *Al-Burhan*. *Syeikh Ali Hubbullah* dalam kitabnya *Dirasah fi Falsafah Ushul Al-Fiqh* menyatakan bahwa *Imam Al-Haramain* merupakan pemimpin dalam hal *nazariyah al-maqashid* karena *imam Al-Haramain* telah lebih dahulu memaparkan pembagian *maqashid* beserta persyaratannya sebagaimana yang selanjutnya dilakukan oleh *Imam Al-Syatibi*.

Pengetahuan mengenai *maqashid syari'ah* merupakan hak setiap orang. Hanya saja, pengetahuan tersebut harus ditempatkan pada tempat dan kedudukan-nya masing-masing sesuai posisi-nya baik ulama, pencari ilmu, orang awam dan semua *mukallaf* sehingga masing-masing dapat mengambil manfaatnya tanpa melewati batas dan kadar kemampuannya. Hanya orang alim saja yang boleh menggunakan-nya dalam mengambil hukum dan memberikan fatwa berlandaskan *maqashid* tersebut. *Maqashid syari'ah* dalam pengertiannya yang sekarang merupakan bentuk yang cukup rumit dipahami bagi orang-orang awam. Maka dari itu, perlu adanya pengertian *maqashid* yang lebih sederhana dan mudah dipahami khususnya bagi mereka yang tidak berkecimpung langsung dalam bidang *fiqh* dan *ushul fiqh*. *Imam Al-Haramain Al-Juwaini* yang menggagas konsep *maqashid syari'ah* dengan mengenalkan istilah *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* dalam penetapan suatu hukum merupakan tokoh yang cukup jarang dikupas pemikirannya.

Hampir semua ulama *ushul kontemporer*, termasuk *Ibnu 'Asyur*, bersepakat bahwa *Imam al-Syathibi* adalah bapak *maqashid al-syariah* pertama sekaligus peletak dasarnya. Namun itu tidak berarti bahwa sebelum beliau, ilmu *maqashid* tidak ada. *Imam al-Syathibi* lebih tepat disebut orang pertama yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusunnya secara sistematis. Terma *maqashid* berasal dari bahasa arab (*maqashid*) yang merupakan bentuk jamak dari kata (*maqshad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Maqashid* hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, *Maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk (*mashalih*) atau kemaslahatan-kemaslahatan. Misalnya, 'Abdul Malik al-Juwaini (w.478 H/1185 M), salah seorang kontributor paling awal terhadap teori *maqashid* menggunakan istilah *al-Maqhasid* dan *al-Mashalih al-'Ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.

Abu Hamid al-Ghazaly (w. 505 H/1111 M) mengelaborasi klasifikasi *maqashid*, yang ia masukan dalam kategori kemaslahatan mursal (*al-Mashalih al-Mursalah*), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam *nas* (teks suci) Islam. Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H/1209 M) dan Al-Amidi (w. 631 H/1234 M) mengikuti terminologi *al-Ghazaly*.

Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H/1216 M) mendefinisikan kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang Pembuat Syariah (*al-Syari'*), yaitu Allah Swt. Kemudian *al-Qarafi* (w. 1285 H/1868 M) mengaitkan kemaslahatan dan *maqashid* dengan kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan: “Suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudaratan”. Ini beberapa contoh yang menunjukkan kedekatan hubungan antara kemaslahatan dan *maqashid* dalam konsepsi *ushul fiqh* (khususnya antara abad ke-5 dan 8 H, yaitu periode ketika teori *maqashid* berkembang).

Sejarah ide tentang *maqashid al-syariah* atau tujuan-tujuan atau maksud yang mendasari perintah al-Qur'an dan Sunnah dapat dilacak hingga masa sahabat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah peristiwa. Salah satu contoh paling populer adalah hadits yang bersilsilah banyak (*mutawatir*) tentang salat asar di *Bani Quraizhah*, di mana Rasulullah Saw mengutus sekelompok sahabat ke *Bani Quraizhah* dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan salat asar di sana. Namun yang terjadi batas waktu salat asar hampir habis dan para sahabat tiba di *Bani Quraizhah*. Lalu para sahabat terbagi menjadi pendukung dua pendapat yang berbeda: pendapat pertama bersikukuh salat Asar di *Bani Quraizhah* dengan konsekuensi apapun yang terjadi, sedangkan pendapat kedua bersikukuh salat Asar diperjalanan (sebelum waktu salat Asar habis).

Rasionalisasi di balik pendapat yang pertama adalah bahwa perintah Rasulullah Saw itu secara *tekstual* meminta setiap orang untuk melaksanakan salat Asar di *Bani Quraizhah*, sedangkan rasionalisasi pendapat kedua adalah ‘maksud/tujuan’ perintah Rasulullah Saw adalah meminta para sahabat bergegas menuju *Bani Quraizhah* dan bukan ‘bermaksud’ menunda salat Asar hingga habis waktu salat. Menurut perawi, ketika para sahabat melaporkan cerita tersebut kepada Rasulullah, Rasulullah menegaskan kebenaran kedua opini para sahabat. *Takrir* Rasulullah sebagaimana para fakih dan ulama, menunjukkan kebolehan dan kebenaran kedua sudut pandang di atas.

Satu-satunya ulama yang tidak setuju dengan para sahabat yang mengerjakan salat di perjalanan adalah *Ibn Hazm al-Zhahiri* (W. 456 H.), seorang ahli fakih terkemuka dari madzhab *lateralis* atau *zhahiri*, yang menulis bahwa kelompok Sahabat tersebut seharusnya mengerjakan salat Asar setelah sampai di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bani Quraizhah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah bahkan setelah tengah malam sekalipun.

1. Maqashid al-Syariah Perspektif Ulama Salaf

Maqashid al-Syari'ah, *Maqashid al-Syar'iyyah*, dan *Maqashid al-Syari'* merupakan tiga kata dengan pengertian yang sama. Tiga kata itulah yang akan dibahas dalam terminologi singkat tentang definisi *maqashid al-syariah*. Dalam literatur *salaf*, tidak pernah ditemukan definisi secara khusus tentang *maqashid al-syariah*. Bahkan *Abu Ishaq al-Syathibi* sendiri yang disebut-sebut sebagai “Sang Bapak *Maqashid al-Syariah*” tidak pernah menyinggung definisinya. Barangkali beliau menganggap bahwa hal tersebut sudah maklum adanya, penjelasan beliau yang begitu panjang dalam karyanya *al-Muwafaqat* terkait ilmu *maqashid* sudah lebih dari cukup bagi para pembaca untuk sekedar menyimpulkan definis *maqashid al-syariah* sendiri.

Sekalipun pemaknaan secara khusus tentang *maqashid al-syariah* tidak bisa ditemukan dalam literatur-literatur terdahulu (*salaf*), namun terma tentang *maqashid* yang berupa teori-teori awal aplikasinya bisa terdeteksi secara jelas. Dalam kurun waktu tiga abad dari abad ke-3 sampai abad ke-5, ide maksud/sebab (*hikmah*, *illat*, atau *makna*) tampak pada beberapa metode penalaran yang digunakan oleh para imam madzhab tradisional, seperti penalaran melalui *qiyas*, *istihsan* dan pertimbangan kemaslahatan. Kajian tentang *maqashid al-syariah* belum menjadi subjek (topik) karya ilmiah tersendiri atau menjadi perhatian khusus hingga akhir abad ke-3. Kemudian perkembangan teori “tingkatan” keniscayaan oleh *Imam al-Juwaini* (w. 478 H/1085 M) terjadi lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lama, yaitu pada abad ke-5 H. Berikut ini adalah usaha melacak konsepsi-konsepsi *maqashid* awal antara abad ke-3 dan abad ke-5.

Al-Tirmidzi al-Hakim (w. 296 H/908 M) mendedikasikan karya terkenal pertama bagi topik *maqashid*, di mana terma *maqashid* digunakan sebagai judul buku *as-Shalah wa Maqashiduha* (salat dan maqashidnya). *Abu Zaid al-Balkhi* (w. 322 H/933 M) mengemukakan karya terkenal pertama tentang *maqashid muamalah*, *al-Ibanah ‘an ‘ilal al-Diyanah* (penjelasan tujuan-tujuan di balik praktik-praktik ibadah), di mana dia menelaah *maqashid* dibalik hukum-hukum yuridis Islam.

Al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H/975 M) menulis manuskrip terkuno yang terdapat di *Dar al-Kutub* Mesir terkait topik *maqashid*, *Mahasin al-Syara’i* (keindahan-keindahan Hukum Syariah).

Ibn Babawaih al-Qummi (w. 381 H/991 M). Beberapa peneliti mengklaim bahwa penelitian tentang *maqashid al-syariah* terbatas pada madzhab fiqh sunni hingga abad ke-20 M. Tetapi monografi yang dikenal pertama kali didedikasikan pada *maqashid* sebenarnya ditulis oleh *Ibn Babawaih al-Shaduq al-Qummi*—salah seorang fakih terkemuka syiah abad ke-4 H, yang menulis buku yang memuat 335 bab tentang subjek ini. Buku itu berjudul *‘Ilal al-Syara’i* (alasan-alasan di balik hukum syariah).

Al-‘Amiri al-Failasuf (w. 381 H/991 M) mengajukan klasifikasi teoretik pertama terhadap *maqashid* dalam karyanya *al-I‘lam bi Manaqibil Islam* (pengetahuan tentang kebaikan-kebaikan Islam). Klasifikasi *maqashid* tidak mengalami perkembangan hingga abad ke-5 H. Jadi seluruh teori mencapai tahap paling matang (sebelum abad ke-20 M) pada ke-8 H. Abad ke-5 H menyaksikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahirnya apa yang disebut oleh ‘*Abdullah bin Bayyah*’ dengan filsafat hukum Islam. Metode *literal* dan *nominal* yang berkembang hingga abad ke-5 H terbukti tidak mampu menangani kompleksitas perkembangan peradaban. Inilah mengapa ‘*kemaslahatan Mursal*’ dikembangkan sebagai metode yang mencakup ‘apa yang tidak disebutkan dalam *Nas*’, demi menutupi kekurangan metode *qiyas*. Sebab banyak ditegaskan bahwa *qiyas* tidak dapat menangani semua ‘situasi’ baru, meskipun para pakar *ushul fiqh* berusaha mengembangkan melalui pertimbangan ‘*munasabah*’ karena *qiyas* itu dibatasi kondisi yang bersifat tetap seiring dengan perubahan waktu (*mundabit*).

Kemaslahatan mursal membantu mengisi kesenjangan ini dan juga mendorong kelahiran teori *Maqashid* dalam hukum Islam. Ada beberapa fakih yang memberi kontribusi paling signifikan terhadap teori *maqashid* antara abad ke-5 H hingga 8 H adalah *Abu al-Ma’ali al-Juwaini*, *Abu Hamid al-ghazali*, *Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam*, *Syihab al-Din al-Qarafī*, *Syams al-Din ibn al-Qayyim*, serta yang paling fenomenal, *Abu Ishaq al-Syatibi*. Berikut adalah teori-teori *maqashid* sampai periode *Abu Ishaq al-Syatibi* yang terekam dalam buku ‘*Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*’ karya *Jasser Auda*.

a. *Abu al-Ma’ali al-Juwaini* (w. 478 H/1085 M)

Karya *al-Juwaini*, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* (dalil-dalil nyata dalam *ushul fiqh*) adalah risalah *ushul fiqh* pertama yang memperkenalkan teori keniscayaan. Dia menyarankan lima tingkatan *maqashid*, yaitu keniscayaan (*dharurat*), kebutuhan umum (*al-hajah al-‘ammah*), perilaku moral (*al-makrumat*), anjuran-anjuran (*al-Mandubat*), dan apa yang tidak dapat dicantumkan pada alasan khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh-contoh *maqashid al-Juwaini* adalah dalam melakukan rekonstruksi terhadap hukum Islam seperti ‘kemudahan’ dalam hukum *thaharah*; ‘menghilangkan beban orang miskin’ dalam hukum zakat; dan ‘suka sama suka’ dalam hukum perdagangan.

b. *Abu Hamid al-Ghazali* (w. 505 H/1111 M)

Murid al-Juwaini, Abu Hamid al-Ghazali, mengembangkan teori gurunya lebih jauh dalam kitabnya *al-Mustasyfa* (sumber yang dijernihkan). Dia mengurutkan ‘kebutuhan’ yang disarankan *al-Juwaini* sebagai berikut: 1) keimanan; 2) jiwa; 3) akal; 4) keturunan; 5) harta. *Al-Ghazali* mencetuskan istilah ‘perlindungan’ (*al-Hifzh*) terhadap kebutuhan-kebutuhan ini.

c. *Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam* (w. 660 H/1209 M)

Al-‘Izz menulis dua buku tentang *maqashid*, dalam nuansa ‘*hikmah* dibalik hukum Islam’, yaitu *maqashid al-shalat* (*maqashid* salat) dan *maqashid al-shaum* (*maqashid* puasa). Tetapi kontribusi signifikannya terhadap perkembangan teori *maqashid* adalah bukunya tentang kemaslahatan yang berjudul *Qawa’idul Ahkam fi Mashalih Al-Anam* (kaidah-kaidah hukum bagi kemaslahatan umat manusia). Disamping investigasinya yang *ekstensif* tentang konsep *Maslahat* (kemaslahatan) dan *Mafsadat* (kemudaratan), *al-‘Izz* juga menghubungkan antara validitas hukum dengan *maqashid*-nya. Misalnya dia menyatakan: ‘setiap amal yang mengabaikan *maqashid*-nya adalah batal’ dan ‘jika kamu mempelajari bagaimana *maqashid* hukum Islam membawa kebaikan umum maupun mendukung keburukan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



situasi apapun, sekalipun kamu tidak memiliki hujah khusus dari *Nas*, *Ijmak* atau *Qiyas*.

d. *Syihab al-Din al-Qarafi* (w. 684 H/1285 M)

Kontribusi *al-Qarafi* terhadap teori *maqashid* adalah diferensiasi antara jenis-jenis perbuatan Nabi Saw. berdasarkan maksud atau niat Beliau. *Al-Qarafi* juga menulis tentang ‘pembukaan sarana untuk meraih kemaslahatan’ (*fath al-dzara’i*), yang juga merupakan ekspansi signifikan bagi teori *maqashid*. *Al-Qarafi* mengusulkan bahwa apabila sarana yang mengarahkan pada tujuan halal seharusnya dibuka. Jadi dia tidak membatasi diri pada sisi negatif metode ‘penutupan sarana yang mengarah pada kemudharatan’ (*sadd al-dzara’i*).

e. *Syams al-Din Ibn al-Qayyim* (w. 748 H/1347 M)

Kontribusi *Ibn al-Qayyim* terhadap teori *maqashid* adalah melalui ringkasan metodologi yuridis-nya berdasarkan ‘*hikmah* dan kesejahteraan manusia’ dengan kalimat yang sangat tegas berikut ini:

Syariah berdasarkan kebijaksanaan demi meraih keselamatan di dunia dan akhirat. *Syari’at* seluruhnya terkait dengan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Jadi, hukum apapun yang mengganti keadilan dengan ketidak-adilan, kasih sayang dengan kebalikannya, kemaslahatan umum dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, maka hukum tersebut bukan termasuk bagian dari *syariah*, meskipun diklaim sebagai bagian dari *syariah* menurut beberapa interpretasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f. *Abu Ishaq al-Syatibi* (w. 790 H/1388 M)

Al-Syatibi menggunakan terminologi serupa dengan *al-Juwaini* dan *al-Ghazali*. Tetapi dalam karyanya, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (kesesuaian-kesesuaian dalam dasar-dasar *syariah*), *al-Syatibi* mengembangkan teori *maqashid* dalam tiga cara substansial berikut:

Maqashid yang semula bagian dari ‘Kemaslahatan *Mursal*’ (*al-Mashalih al-Mursalah*) menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam. Sebelum *al-Muwafaqat* karya *al-Syatibi* ini, *maqashid* termasuk kategori ‘kemaslahatan-kemaslahatan lepas’, yang tidak disebutkan langsung di dalam *Nas*, dan tidak pernah dinilai sebagai dasar hukum Islam yang mandiri. Maka *al-Syatibi* menilai *maqashid* sebagai ‘pokok-pokok agama’ (*ushul al-din*), ‘kaidah-kaidah *syariah*’ (*qawa'id al-syariah*), dan keseluruhan keyakinan (*kulliyat al-millah*).

Dari ‘*hikmah* dibalik hukum’ menjadi ‘dasar bagi hukum’. Berdasarkan fondasi dan keumuman *maqashid*, *al-Syatibi* berpendapat bahwa ‘sifat keumuman’ (*al-kulliyah*) dari keniscayaan (*dharuriyyat*), kebutuhan (*hajiyyat*) dan kelengkapan (*tahsiniyyat*) tidak bisa dikalahkan oleh hukum parsial (*juziyyat*).

Dari ketidak-pastian (*zhanniyyah*) menuju kepastian (*qhat'iyyah*). Dalam rangka mendukung status baru yang dia berikan kepada *maqashid* di kalangan para *ushul fiqh*, *al-Syatibi* memulai karyanya tentang *maqashid* dengan membuktikan ‘kepastian’ proses *induktif* yang dia gunakan untuk menyimpulkan *maqashid*, yang didasarkan pada sejumlah besar *dalil* yang dia pertimbangkan, di mana dia berbeda dari argumen populer yang ‘didasarkan pada filsafat Yunani’, yang meragukan *validitas* dan ‘kepastian’ metode *induktif*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Maqashid al-Syariah* Perspektif Ulama Khalaf

Setelah *al-Syatibi* wafat, kajian *maqashid* secara independen sempat terhenti, di mana masyarakat muslim lebih gemar mengkaji literatur yang bermuatan *maqashid* dari generasi kurun ke tujuh dan ke delapan, seperti *Ibn al-Najar* (W. 318 H.), terutama dalam karyanya *Syarh al-Kaukab* yang mencakup tema *maqashid*. Hal ini dapat dilihat dalam bab munasabat, ia menyebutkan bahwa *maqashid* itu diklasifikasikan menjadi lima unsur termasuk menjaga harga diri.

Perkembangan definisi tentang *maqashid al-Syariah* mulai bermunculan pada era ulama kontemporer (*khalaf*). Diantara ulama kontemporer yang mendefinisikan *maqashid al-Syariah* secara khusus adalah *Thahir Ibn 'Asyur* yang memberikan terminologi:

“Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan agama atau mayoritasnya. Dengan menjadikan beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk hukum syariat secara khusus”.

Definisi *Ibnu 'Asyur* diatas mengarah pada arti *maqashid al-Syariah* secara umum (*maqashid al-syariah al-'ammah*). Dalam bukunya tersebut, *Ibnu 'Asyur* mencontohkan dengan menjaga ketertiban umum, menggapai kemaslahatan, menolak dampak negatif, menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Masih dari penjelasan *Ibnu 'Asyur* dalam kitab yang sama, beliau memberikan definisi untuk arti *maqashid al-Syariah* secara khusus dengan bahasa: *“Beberapa upaya yang*

ditempuh syariat demi terwujudnya kemanfaatan bagi umat manusia atau kemaslahatan dalam tindakan mereka secara khusus.”

Definisi ini mencakup beberapa persoalan hukum syariat secara khusus, seperti tujuan mendirikan bahtera rumah tangga yang harmonis dalam syari’at nikah, menghindari dampak konflik pasangan suami isteri yang berkelanjutan dalam syariat talak dan lain sebagainya.

Kemudian seorang ulama kontemporer yang juga aktif terhadap kajian *maqashid al-Syariah* yaitu ‘*Alal al-Fasi*’ juga menawarkan definisi yang ringkas dan padat. Ulama asal Maroko ini menyatakan:

“Maqashid al-Syariah adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya”.

Definisi *al-Fasi* ini mengakomodir arti *maqashid al-Syariah al-‘Ammah* dan *maqashid al-Syariah al-Khashah* yang ditawarkan Ibnu ‘Asyur di atas. Tidak hanya itu *al-fasi* juga membeberkan secara riil cakupan dari *maqashid al-Syariah al-‘Ammah* dengan penjelasan beliau:

“Tujuan umum pemberlakuan syariat adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggungjawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi lapisan seluruh penghuni bumi”.

Ahmad al-Raisuni dalam kitabnya yang sangat masyhur yaitu ‘*Nazhariyyah al-Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syatibi*’ juga menyumbangkan satu terminologi yang singkat tentang *maqashid al-Syariah* dengan mengatakan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tujuan-tujuan yang diletakkan syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia”.

Pada hakikatnya definisi ini merujuk kepada *takrif al-Fasi*, hanya saja perbedaannya, beliau menghapuskan frasa terakhir yang menunjukkan objektif khusus.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili, dalam karyanya yang masyhur, *Ushul al-Fiqh al-Islami* mendefinisikan *maqashid al-Syariah* sebagai berikut:

“Makna-makna dan tujuan yang dititikberatkan dalam semua hukum atau sebagian besarnya atau ialah maksud dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari’ dalam setiap hukum”.

Bisa disimpulkan dari berbagai definisi di atas, bahwa inti dari *maqashid al-Syariah* mengarah pada tujuan pencetusan hukum *syariat* dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqashid al-Syariah al-‘Ammah*) atau secara khusus (*maqashid al-Syariah al-Khashah*).

C. PEMBAGIAN MAQASHID SYARI’AH

Agar dapat memahami *Maqashid al-Syariah* atau tujuan syariah secara sempurna, maka terlebih dahulu dipaparkan beberapa unsur dari *maqashid al-syariah*, yaitu *Hakim, Hukum, Mahkum Fih dan Mahkum Alaih*.

Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, *maslahat* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

1. *Dharuriyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek

duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat *dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

2. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. *Tahsiniyat*, yaitu *maslahat* yang merupakan tuntutan *muru'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (*jama'ah*) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

1. *Maslahat kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. *Maslahat juz'iyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat parsial atau individual, seperti *pensyari'atan* berbagai bentuk *mu'amalah*.

Jenis ketiga adalah *maslahat* yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. *Maslahat* dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. *Maslahat* yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa *kemaslahatan* karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian *induktif*, atau akal secara mudah dapat memahami adanya *maslahat* itu.
2. *Maslahat* yang bersifat *zhanni*, yaitu *maslahat* yang diputuskan oleh akal, atau *maslahat* yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari *syara'*.
3. *Maslahat* yang bersifat *wahmiyah*, yaitu *maslahat* atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah *madharat* dan *manfaat*.

Pembagian *maslahat* seperti yang dikemukakan oleh *Wahbah al-Zuhaili* di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas *maslahat* mana yang boleh diambil dan *maslahat* mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak *maslahat* yang ada. *Maslahat dharuriyat* harus didahulukan dari *maslahat hajiyyat*, dan *maslahat hajiyyat* harus didahulukan dari *maslahat tahsiniyat*. Demikian pula *maslahat* yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari *maslahat* yang bersifat *juz'iyat*. Akhirnya, *maslahat qath'iyah* harus diutamakan dari *maslahat zhanniyah* dan *wahmiyah*.

Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqashid al-syari'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa *maslahat* yang merupakan tujuan Tuhan dalam *tasyri'*-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi *maslahat* itu, terutama *maslahat* yang bersifat *dharuriyat*.

D. CARA MENGETAHUI MAQASHID AL-SYARI'AH

Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum *al-Syathibi*, yaitu :

1. Ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah sesuatu yang *abstrak*, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk *zahir lafal* yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama *Zahiriyah*.
2. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan *zahir lafal* untuk mengetahui *maqashid al-syari'ah*. Mereka terbagi dalam dua kelompok :
 - a. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* ditemukan bukan dalam bentuk *zahir lafal* dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukkan *zahir lafal* itu. Akan tetapi *maqashid al-syari'ah* merupakan hal lain yang ada di balik tunjukkan *zahir lafal* yang terdapat dalam semua aspek *syari'ah* sehingga tidak seorang pun dapat berpegang dengan *zahir lafal* yang memungkinkannya memperoleh *maqashid al-syari'ah*. Kelompok ini disebut kelompok *Bathiniyah*.
 - b. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian *lafal*. Artinya *zahir lafal* tidak harus mengandung tunjukkan yang bersifat *mutlak*. Apabila terjadi pertentangan antara *zahir lafal* dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga masalah atau tidak. Kelompok ini disebut kelompok *Muta'ammiqin fi al-Qiyas*.

3. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (*zahir lafal* dan pertimbangan *makna/illat*) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian *zahir lafal* dan tidak pula merusak kandungan *makna/illat*, agar *syari'ah* tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok *Rasikhin*.

Dalam pandangan *Asafri*, dalam rangka memahami *maqashid al-syari'ah* ini, *al-Syathibi* tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga (*rasikhin*) yang memadukan dua pendekatan, yakni *zahir lafal* dan pertimbangan makna atau *illat*. Hal ini dapat dilihat dari tiga cara yang dikemukakan oleh *al-Syathibi*, dalam upaya memahami *maqashid al-syari'ah*, yaitu :

1. Melakukan analisis terhadap *lafal* perintah dan larangan.
2. Melakukan penelaahan *illat* perintah dan larangan.
3. Analisis terhadap sikap diamnya *syari'* dalam pen-syari'atan suatu hukum.

Cara pertama dilakukan dalam upaya telaah terhadap *lafal* perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya kembali kepada makna perintah dan larangan secara *hakiki*. Perintah harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu agar diwujudkan dan larangan menghendaki agar sesuatu yang dilarang itu dihindari dan dijauhi. Cara pertama ini diarahkan untuk memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap *illat* hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hadits. Seperti diketahui bahwa *illat* itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Jika *illat*-nya tertulis, maka harus mengikuti kepada apa yang tertulis itu, dan jika *illat*-nya tidak tertulis, maka harus dilakukan *tawaquf* (tidak membuat suatu putusan). Keharusan *tawaquf* ini didasari dua pertimbangan. Pertama, tidak boleh melakukan perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash. Perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh *nash* tanpa mengetahui *illat* hukum sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dalil. Kedua, pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh *nash*, namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui. Sesungguhnya inti dari dua pertimbangan ini adalah bahwa dalam masalah *muamalah* dibolehkan melakukan perluasan jika tujuan hukum mungkin diketahui dengan perluasan tersebut.

Cara yang ketiga dengan melihat sikap diamnya *syari'* (pembuat *syari'at*) dalam pensyari'atan suatu hukum. Diamnya *syari'* itu dapat mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, sikap diamnya *syari'* mengandung kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya *syari'* mengandung larangan. Dari sikap diamnya *syari'* ini akan diketahui tujuan hukum.

Pengumpulan Al-Qur'an yang terjadi setelah Nabi SAW wafat merupakan contoh sikap diamnya *syari'*. Pada masa Nabi SAW belum dijumpai faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an tersebut. Namun selang beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an. Sikap diamnya Nabi SAW dalam hal ini dapat dipahami bahwa pembukuan itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dibolehkan atau dibenarkan. Apabila dilihat cara mengetahui *maqashid al-syari'ah* seperti yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cara pertama lebih diarahkan pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek *muamalah*, dan cara ketiga pada keduanya.

Cara-cara tersebut merupakan kombinasi cara mengetahui *maqashid al-syari'ah* melalui pendekatan *lafal* dan pendekatan makna. Kombinasi ini dirasa sangat penting dalam rangka mempertahankan identitas agama sekaligus mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan-perubahan sosial.

Al-Syatibi ketika berbicara mengenai *maslahat* dalam konteks *al-maqasid* mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (*Syari'*) adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), bahwa kewajiban-kewajiban *syari'at* dimaksudkan untuk memelihara *al-maqasid*.

Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *al-maqasid*. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syariah*, *al-maqasid al-syar'iyyah*, dan *maqasid min syar'I al-hukm*. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

Menurut *al-Syatibi* yang dimaksud dengan *al-maslahah* dalam pengertian *syari'* mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.

Dalam *al-Muwafaqat*, *al-Syatibi* membagi *al-maqasid* dalam dua bagian penting, yakni maksud *syari'* (*qashdu asy-syari'*) dan maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*). Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah, baik dalam al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Qur'an maupun hadis yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam), akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Anbiya (21): 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

Ungkapan ‘rahmat bagi seluruh alam’ dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum *syara’* itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Substansi *maqashid al-syari’ah* adalah *kemashlahatan*. Kemashlahatan dalam *taklif* tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu: pertama, dalam bentuk *hakiki*, yakni manfaat langsung dalam arti kausitas; kedua, dalam bentuk majazi, yakni bentuk yang merupakan membawa kepada kemashlahatan.

Maka di sini kemashlahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: *maqashid al-syari’* (tujuan pembuat hukum/tuhan) dan *maqashid al-Mukallaf* (tujuan *mukallaf*), sebagai berikut:

1. *Maqashid al-syari’ah* dalam arti *maqashid al-syari’* mengandung empat aspek, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

- Islam adalah agama yang berkeadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Pada prinsipnya, penamaan kata-kata yang berbeda tersebut mengandung pengertian yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan Allah SWT.

Syari'at Islam datang sebagai rahmat bagi umat manusia, memberikan nasehat bahkan penyembuh terhadap apa-apa yang terdapat di dalam hati, karena itu Islam dalam pelaksanaan hukum-hukumnya terbagi kepada tiga segi (unsur).

Pertama, sebagai pendidikan secara individu untuk mampu menciptakan kebaikan secara kolektif; *kedua*, untuk melaksanakan keadilan dalam kehidupan masyarakat Islam secara keseluruhan yang nantinya kedudukan manusia sama di depan undang-undang dan putusan. Sehingga tidak dibedakan lagi antara si kaya dan si miskin, yang kuat dan yang lemah; *ketiga*, dari aspek hukum Islam, esensi dan substansinya yaitu kemashlahatan, sebab apa yang disyari'atkan Islam lewat *nash* di dalamnya terdapat hakekat *maslahat*.

Setiap seruan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, tentunya ada kemashlahatan untuk umat manusia, apakah dijelaskan sendiri alasannya atau tidak, maupun menjelaskan kenapa suatu perbuatan dilarang, tentunya juga ada kemashlahatan untuk manusia agar manusia tidak masuk kedalam kehancuran.

Sebagaimana yang dijelaskan *al-Syatibi* dalam kitab *al-Muwafaqat* :

“*Syari'at* itu bertujuan untuk kemashlahatan manusia (*hamba*), cepat ataupun lambat secara bersamaan, dan ajakan ini pasti berasal petunjuk tuhan, apakah itu membawa kemashlahatan (*shihhah*) ataupun kehancuran (*fasad*)”.

Apabila diteliti pernyataan *al-Syatibi* ini, dapatlah dipahami bahwa kandungan *maqashid al-Syari'ah* adalah untuk kemashlahatan manusia. Oleh karenanya, bias dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-Quran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maupun *al-Sunnah* menjadi dalil adanya *maslahat*. Meskipun sumber *syara'* tersebut tidak semuanya berbicara mengenai kemashlahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap *eksistensi* maslahat dalam *syari'at* Islam. Secara umum, alasan yang dikemukakan *jumhur* ulama dalam menetapkan maslahat sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain adalah:

1. Hasil *induksi* terhadap ayat atau hadits yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemashlahatan bagi umat manusia.
2. Kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa kesulitan bagi umat manusia.
3. *Jumhur* ulama juga beralasan pada beberapa perbuatan *sahabat* yang seringkali berbuat dan membuat kebijakan dengan berdasar pada *maslahat*.

b. Sesuatu yang Harus Dipahami

Metode memahami *maqashid al-syari'ah* diidentik dengan pengetahuan tentang pengkajian kandungan al-Qur'an dan al-Sunnah. Secara faktual, nash terdiri dari huruf-huruf arab atau bahasa arab dengan sejumlah kaidahnya, maka salah satu cara untuk memahami *maqashid al-syari'ah* adalah pemahaman kebahasaan. Namun pendekatan kebahasaan saja tidaklah cukup, sebab *syari'at* itu sering kali memakai bahasa di luar pengertian *lafaz* dan *kaedah* kebahasaan.¹⁴

¹⁴ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I, h. 42

Oleh karena itu, para mujtahid dalam menggali hukum yang terkandung dalam syari'at sering keluar dari konteks bunyi *lafaz* dan memakai teks dengan arti baru. Cara ini disebut dengan metode *ma'nawi*.

1) Memahami *al-syari'ah* melalui bunyi *lafaz*.

Ada dua kemungkinan pemahaman disebabkan oleh dua hal yaitu:

- a) Lafaz itu digunakan untuk dua maksud dengan pemahaman yang sama, misalnya kata '*quru*'

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. (QS. al-Baqarah: 228) yang berarti suci atau Suci.

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ

يَعْفُوَنَّ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

Kata '*Aqdunnikah*, (QS. al-Baqarah: 237) yang mengandung arti wali atau istri.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي

سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿١٦﴾

b) *Lafaz* yang menggunakan nama atau kiasan yang menurut lahirnya mendatangkan keraguan. Keraguan itu disebabkan penggunaan sifat yang ada pada manusia untuk Allah SWT., padahal Allah SWT tidak sama dengan makhluknya. Umpamanya penggunaan kata “wajah” atau “muka” untuk Allah (al-Rahman: 27) dan penggunaan kata “bersemayam” untuk Allah (QS.Yunus: 3).

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

Artinya: ‘Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan’

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ

Artinya: “ Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy “

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kedua bentuk pemahaman *lafaz* tersebut, maka semua *mujtahid* tidak dapat keluar dari konteks *lafaz*, mereka hanya berbeda dalam hal sejauh mana kedekatan *ijtihad*-nya dengan *lafaz*. Masalah apapun yang timbul dalam kehidupan umat manusia, tidak mungkin memberi nilai *syari'at* tanpa menghubungkan dengan bunyi *lafaz*, baik dikaitkan dengan arti majazi maupun arti substansinya.

2) Memahami *al-syari'ah* melalui makna *lafaz*

Yang dimaksud dengan makna *lafaz* di sini ialah makna secara *hakiki* dan *majazi* termasuk makna *musytarak*.

3) Memahami *al-syari'ah* melalui makna di luar *nash*

Metode memahami *syari'at* melalui makna di luar *nash* yaitu, *metode istihsan* dan *al-mashlahah al-Mursalah*.

a) *Istihsan*

Istihsan secara bahasa adalah kata bentuk (*musytaq*) dari *al-hasan* (apapun yang baik dari sesuatu). *Istihsan* sendiri kemudian berarti kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah (*hissiy*) ataupun maknawiah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain.

Istihsan ada dua macam: Pertama, *mentarjih*-kan *qiyas* yang tidak nyata (samar-samar) atas *qiyas* yang nyata berdasarkan suatu dalil. Hal semacam ini menurut kalangan hanafiya disebut dengan *istihsan qiyas* atau *qiyas khafi*.

Contoh, Sisa minum dari burung yang busa menurut istihsan adalah suci, sedangkan menurut qiyas adalah najis.

b) Al-Mashlahah al-Mursalah

Secara etimologi, *mashlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. sedangkan al-mursalah adalah isim *maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk tsulasi “rasala” dengan penambahan huruf alif di awalnya sehingga menjadi “arsala”. Secara bahasa artinya “terlepas” atau dalam arti mutlaqah (bebas). Kata lepas dan bebas di sini dihubungkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Secara istilah, *mashlahah al-mursalah* adalah suatu kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' sesuatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya. Hal ini muncul setelah wahyu selesai diturunkan serta tidak ada dalil yang memerintah agar diperhatikan atau tidak.

Misalnya menghimpun dan menulis al-Qur'an dalam satu *mushaf*. Baik *nash* dari al-Qur'an maupun hadits tidak memerintahkan dan tidak pula melarang hal tersebut. Tapi perbuatan semacam ini sangat mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin, maka apa yang dirintis oleh Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain dalam masalah tersebut merupakan *mashlahah mursalah*. Demikian juga halnya seperti surat nikah yang diadakan oleh Negara sebagai bukti sahnya perkawinan, mengadakan lembaga pemasyarakatan (penjara) dan mencetak mata uang sebagai alat pertukaran resmi. Hal semacam ini tidak ada *nash* yang menyuruhnya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada pula nash yang melarang, itu dimaksud untuk mewujudkan kemashlahatan dan mempermudah urusan dalam kehidupan. Maksud *syari'at* Islam itu tidak lain untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, yakni menarik manfaat dan menolak mafsadat, dan menghilangkan kesusahan. Kemashlahatan manusia tidak terbatas macamnya dan tidak terhitung jumlahnya.

c. Hukum Taklif yang Harus Dilakukan

Hukum Taklifi, yaitu hukum yang menghendaki dilakukannya suatu pekerjaan oleh mukallaf, atau melarang mengerjakannya, atau pilihan antara melakukan dan meninggalkan. Hukum taklifi mengandung tuntutan (taklif) kepada mukallaf untuk mengerjakan sesuatu atau melarangnya, atau melakukan antara mengerjakan dan meninggalkan. Sedangkan hal-hal yang orang mukallaf yang diperintah antara mengerjakan dan meninggalkan, inilah yang disebut taklif (tuntutan/pembebanan).¹⁵

Contoh, sebagaimana kewajiban orang mukallaf untuk membayar zakat yang terdapat dalam al-Qur'an Surah at-taubah ayat 103 dan Ali Imran ayat 97, kemudian perintah akan kewajiban melaksanakan shalat dalam Surah al-Baqarah ayat 43. atau yang berbentuk larangan seperti larangan menggunjing atau mengolok-olok antara orang yang satu dengan orang yang lain, dan golongan yang satu dengan golongan yang lain yang terdapat dalam Surah al-Hujarat ayat 11. Kemudian larangan mendekati zina yang terdapat dalam Surah al-Isra' ayat 32, kemudian juga larangan menikahi wanita musyrik yang terdapat dalam Surah al-Maidah ayat 221. Sedangkan hukum yang menghendaki pilihan bagi mukallaf

¹⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. Ke-II, h. 65

antara melakukan dan meninggalkan. Contoh, pilihan bagi orang yang telah melaksanakan shalat untuk bertebaran di muka bumi sebagaimana yang terdapat dalam Surah an-Nisa' ayat 101 dan pilihan bagi mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan berburu setelah menyelesaikan ibadah haji yang terdapat dalam Surah al-Jumu'ah ayat 10.

d. Membawa Manusia Kebawah Naungan Hukum

Syari'at sebagai pedoman hidup jika ditaati perintah dan larangannya, manusia mampu terbebas dari hal-hal yang merusak dan merugikan hidupnya. Itulah sebabnya mengapa kandungan syari'at selalu bertentangan dengan selera nafsu manusia, artinya syari'at mengarahkan manusia untuk dapat mengendalikan nafsunya. Ketika hal ini dapat dilakukan, syari'at itu akan membawa manusia kebawah naungan hukum Allah, yang tidak akan bercampur antara yang haq dan bathil, dan jauh dari hawa nafsu. Ketika hukum-hukum Allah dijalankan, maka tentunya akan membawa mashlahah untuk manusia sebagai mana tujuan dari maqashid al-Syari'ah.¹⁶

2. Maqashid al-Syari'ah dalam arti maqashid al-Mukallaf

a. Memelihara Agama (Hifzh al-Din)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara agama dalam tingkatan dharuriyah, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat primer, seperti

¹⁶ Athurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 124



melaksanakan shalat lima waktu. Jika kewajiban ini diabaikan maka eksistensi agama akan terancam.

- 2) Memelihara agama dalam tingkatan hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindarkan dari kesulitan. Seperti pensyari'atan shalat jamak dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam tingkatan tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada tuhan.

b. Memelihara Jiwa (Hhifz al-Nafs)

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara agama dalam tingkatan dharuriyyat, seperti pensyari'atan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkatan hajiyyat, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang halal dan bergizi. Jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkatan tahsiniyyat, seperti disyari'atkannya aturan tata cara makan dan minum. Ketentuan ini hanya berhubungan dengan etika atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesopanan. Jika diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara Akal (Hifzh al-‘Aql)

- 1) Memelihara akal dalam tingkatan dharuriyyat, seperti diharamkan mengonsumsi minuman yang memabukkan (minuman keras). Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam tingkatan hajiyyat, seperti anjuran menuntut ilmunya. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam tingkatan tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyyat*, seperti penyiaran hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinahan. Apabila ketentuan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar tidak disebutkan, maka suami akan mengalami kesulitan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tangga tidak harmonis.

3)Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan kegiatan perkawinan. Jika ia diabaikan tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat seseorang.

e. Memelihara Harta (Hifzh al-Mal)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam tingkatan *dharuriyyat*, seperti pensyari'atan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang illegal. Apabila aturan ini dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti disyari'atkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan hanya akan mempersulit seseorang yang memerlukan modal.
- 3)Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal iitu berkaitan dengan moral dan etika dalam bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keabsahan jual beli tersebut, sebab pada tingkatan ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkatan kedua dan pertama.

Mengetahui urutan peringkat mashlahat seperti di atas sangat penting, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Jika terjadi kontradiksi dalam penerapannya maka tingkatan pertama (*dharuriyyat*) harus didahulukan dari pada tingkatan kedua (*hajiyyat*) dan tingkatan ketiga (*tahsiniyyat*).

E. PERANAN MAQASHID SYARI'AH DALAM KEHIDUPAN

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. *Urgensi* itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. Kedua, dilihat dari aspek *historis*, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh *Rasulullah SAW*, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihadnya*, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Abdul Wahhab Khallaf (1968:198), seorang pakar *ushul fiqh*, menyatakan bahwa *nash-nash syari'ah* itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum). Pendapat ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejalan dengan pandangan pakar *fiqh* lainnya, *Wahbah al-Zuhaili*, yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan persoalan dharuri (*urgen*) bagi mujtahid ketika akan memahami *nash* dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia *syari'ah*. Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam AlQur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam *fiqh*, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia.

Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat *Al-Anbiya'*:107, tentang tujuan Nabi *Muhammad* diutus : "*Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam*" (QS. *Al-Anbiya'*:107) Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Suruhan Allah untuk berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah, sebagaimana yang termaktub dalam ayat berikut: "Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati akan tenteram". (QS. *Al-Ra'd*:28) "Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar".(QS *Al-'Ankabut*:45) Memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari' (pembuat syari'at) dan akalpun sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari.

Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia. Kandungan *maqashid al-syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi (tanpa tahun:6), seorang tokoh pembaru *ushul fiqh* yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian *ushul fiqh*, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan *primer, sekunder, dan tersier*.

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli *ushul* pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada prinsipnya Al-Juwaini membagi tujuan *tasyri'* menjadi tiga macam, yaitu dharuriyat, hajiyyat, dan mukramat. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, *al-Ghazali*, yang menjelaskan *maksud syari'at* dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat al-maslahiyat dalam *qiyas*. *Maslahat* menurut *al-Ghazali*, dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqashid al-syari'ah* adalah *Izzuddin ibn Abd al-Salam* dari *mazhab Syafi'iyah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik *manfaat*. Menurut *taklif* harus bermuara pada terwujudnya *kemaslahatan* manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa *Izzuddin ibn Abd al-Salam* telah berusaha mengembangkan konsep *maslahat* yang merupakan inti pembahasan dari *maqashid al-syari'ah*. Pembahasan tentang *maqashid al-syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh *al-Syathibi* dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, *taklif* hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut. *Wahbah al-Zuhaili*, dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqashid al-syari'ah*.

Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid al-syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut *mazhab Maliki*. Lebih lanjut, *al-Syathibi*, dalam uraiannya tentang *maqashid al-syari'ah* membagi tujuan *syari'ah* itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan *syari'at* menurut perumusny (*syari'*) dan tujuan *syari'at* menurut pelakunya (*mukallaf*).

Maqashid al-syari'ah dalam konteks *maqashid al-syari'* meliputi empat hal, yaitu :

1. Tujuan utama *syari'at* adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. *Syari'at* sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. *Syari'at* sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
4. Tujuan *syari'at* membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat *syari'at* (*syari'*). Allah tidak mungkin menetapkan *syari'at*-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada *taklif* hukum, dan *taklif* hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri. Masalah sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya.

Ilmu *maqashid Asy Syari'ah* adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu tersebut, manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyari'atkannya suatu hukum dalam

kehidupan mereka. Tentunya akan mengalami kesulitan. Diantara peran *Maqashid Syari'ah* dalam kehidupan adalah:

1. *Al Maqashid Asy Syari'ah* dapat membantu mengetahui hukum hukum yang bersifat umum(*kuliyyah*) maupun khusus(*juz'iyyah*)
2. Memahami nash *nash syar'i* secara benar dalam tataran praktek.
3. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, karena nash yang berkaitan dengan hukum sangatlah *variatif* baik lafadz maupun maknanya, maka *Maqashid Syari'ah* berperan dalam membatasi makna tersebut.
4. Ketika tidak terdapat dalil dalam Al Qur'an maupun As Sunnah dalam perkara perkara yang kontemporer, maka para mujtahid menggunakan *maqashid syari'ah* dalam *istinbath* hukum setelah mengkombinasikan dengan *ijtihad*, *istihsan*, *istihlah*, dan sebagainya.
5. *Al Maqashid Asy Syari'ah* membantu *mujtahid* untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan seorang hamba sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Adapun contoh penerapan *maqashid* dalam hukum *syari'at* adalah ketika Utsman bin Affan melakukan pengumpulan Al Qur'an dalam satu *mushaf*. Itu dilakukan karena suatu *maslahat* dan menurut *maqashid syari'ah*. Pada awalnya, Rasulullah SAW., melarang penulisan Al Qur'an karena khawatir akan tercampur antara ayat Al Qur'an As sunnah. Akan tetapi setelah 'illat itu hilang dan banyaknya para *huffadz* yang *wafat*, akhirnya Utsman berinisiatif mengumpulkan ayat ayat tersebut menjadi kesatuan utuh dalam satu *mushaf*. Selain contoh di atas, banyak kejadian yang terjadi pada masa ulama' terdahulu yang sesuai dengan *maqashid syari'ah* serta mendatangkan *maslahat* bagi kehidupan. Tentunya masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak lagi contoh-contoh peranan *maqasid syariah* dalam kehidupan yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan hukum dalam kehidupan manusia.

HUBUNGAN ANTARA MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DENGAN BEBERAPA METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa inti *Maqâshid al-Syarî'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara *eksplisit* dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses *ijtihad* harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut.

Dalam kasus yang secara eksplisit dijelaskan oleh teks Al-Qur'an maupun Sunnah, maka kemaslahatan tersebut dapat dilacak dalam kedua sumber tersebut. Jika suatu maslahat disebutkan secara tegas dan *eksplisit* dalam teks, maka kemaslahatan itu yang dijadikan tolok ukur penetapan hukum, dan para ulama lazim menyebutnya dengan istilah *al-mashlahah al-mu'tabarât*. Lain halnya jika maslahat tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber tersebut, maka mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan maslahat tersebut. Pada dasarnya hasil *ijtihad mujtahid* tersebut dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan *maslahat* yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka para ulama lazim menyebutnya sebagai *al-mashlahah al-mulghah*. Penggalan *maslahat* oleh para *mujtahid*, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode *ijtihad*.

Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan "*maslahat*", dan menjadikanya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasusnya tidak disebutkan secara *eksplisit* dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Terdapat dua metode *ijtihad* yang dikembangkan oleh para *mujtahid* dalam upaya menggali dan menetapkan *maslahat*. Kedua metode tersebut adalah metode *Ta'lîlî* (metode analisis *substantif*) dan metode *Istishlahî* (Metode Analisis Kemaslahatan)

Untuk melihat lebih jauh hubungan antara *Maqâshid al-Syarî'ah* dengan beberapa metode penetapan hukum, berikut akan dikemukakan satu persatu metode tersebut.

1. Metode *Ta'lîlî* (Metode Analisis Substantif)

Salah satu metode penggalan hukum adalah metode *ta'lîlî*. Yaitu analisis hukum dengan melihat kesamaan '*illat* atau nilai-nilai *substansial* dari persoalan tersebut, dengan kejadian yang telah diungkapkan dalam nas. Metode yang telah dikembangkan oleh para *mujtahid* dalam bentuk analisis tersebut adalah *qiyâs* dan *istihsan*.

a. *Qiyâs*

Secara etimologi *qiyâs* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan pengertian *qiyâs* secara terminologi terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama *ushûl*. namun menurut penulis meskipun redaksi yang digunakan berbeda antara yang satu dengan yang lain, tetapi mempunyai maksud yang sama. Diantaranya dikemukakan oleh 'Abdul Karim Zaidân. (W. 2014 M.) menurutnya *qiyâs* adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nas dengan suatu kasus yang hukumnya terdapat dalam nas, karena adanya persamaan ‘illat dlam kedua kasus hukum tersebut”

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam *qiyâs* terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, unsur-unsur tersebut adalah ‘*ashl, far*’, *hukmul al-ashl*, dan ‘*illat*. Keempat unsur tersebut lazim disebut dengan rukun *qiyâs*. pembahasan tentang keempat rukun *qiyâs* tersebut, rukun yang terakhir yakni ‘*illat* merupakan pembahasan yang paling penting, karena ada atau tidak adanya suatu hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidaknya ‘*illat* pada kasus tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah *al-hukm yadûru ma’a ‘illatihî wujûdan wa ‘adaman*.

Pembahasan tentang ‘*illat* perlu dibedakan antara pengertian ‘*illat* dan *hikmât*. *Hikmât* adalah manfaat yang tampak ketika *Syâri*’ (Allah) memerintahkan sesuatu atau terhindarnya kerusakan ketika *Syâri*’ melarang sesuatu. Sedangkan ‘*illat* adalah sifat lahir yang tetap (*mudlâbit*) yang biasanya *hikmât* terwujud didalamnya.

Jadi perbedaan antara keduanya terletak pada peranannya dalam menentukan ada atau tidak adanya hukum, ‘*illat* merupakan, tujuan yang dekat dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan *hikmât* merupakan, tujuan yang jauh dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Lain halnya menurut *al-Syâthibî*, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ‘*illat* adalah *hikmât* itu sendiri, dalam bentuk *mashlahah* dan *mafsadah*, berkaitan dengan ditetapkan perintah, larangan, atau kebolehan baik keduanya itu *zhâhir* atau tidak, *mundlâbith* atau tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, baginya ‘*illat* itu tidak lain kecuali adalah *mashlahah* dan *mafsadah* itu sendiri. Kalau demikian halnya, maka baginya hukum dapat ditetapkan berdasarkan hikmât tidak berdasarkan ‘*illat* . Kalau dicermati lebih dalam, sebenarnya *hikmât* dengan ‘*illat* mempunyai hubungan yang erat dalam rangka penetapan hukum. *Hikmât* merupakan sifat yang lahir tetapi tidak *mundlâbith*. Hikmât itu baru akan menjadi ‘*illat* setelah dinyatakan *mundlâbith*. Untuk itu maka perlu dicari indikator yang menerangkan bahwa *hikmât* itu dapat dinyatakan *mundlâbith*.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang pasti *focus qiyâs* adalah terletak pada ‘*illat*. Dari pernyataan inilah, maka secara langsung bisa dikatakan bahwa *qiyâs* ada keterkaitan dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam (*Maqâshid al-Syarî‘ah*). Sebab, salah satu cara memahami *Maqâshid al-Syarî‘ah* adalah dengan cara menganalisa ‘*illat* perintah (*amar*) dan larangan (*nahy*). Maksudnya Pemahaman *Maqâshid al-Syarî‘ah* bisa melalui analisis ‘*illat* hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Shari’at Islam diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, selalu berdasarkan pada sifat keadilan, kemaslahatan dan selaras dengan akal sehat, oleh karena itu, *qiyâs* sebagai salah satu metode penetapan hukum, hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip tersebut yang pada intinya tidak bertentangan dengan *Maqâshid al-Syarî‘ah* akan tetapi berusaha untuk merealisasikan *Maqâshid al-Syarî‘ah* itu sendiri.

b. *Istihsân*

Secara etimologi *Istihsân* berarti menganggap sesuatu baik. Sedangkan *Istihsân* secara terminologi banyak para ahli *ushûl* yang memberikan definisinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantaranya adalah *Imam al-Sarakhsi* (W. 490 H.) seorang ulama ahli *ushûl* dari *mazhab Hanafi*, beliau mendefinisi-kan *Istihsân* sebagai berikut:

“Istihsân adalah meninggalkan qiyâs dan mengamalkan qiyâs lain yang dianggap lebih kuat darinya karena adanya dalil yang menuntut serta kecocokanya pada kemaslahatan manusia”

Sedangkan menurut *al-Bazdawi*, (W. 493 H.). *Istihsân*, adalah sebagai berikut: *“Istihsân adalah berpaling dari qiyâs ke qiyâs lain yang lebih kuat darinya, atau mentakhsis qiyâs berdasarkan dalil yang lebih kuat darinya”*

Pada hakikatnya *Istihsân* merupakan perpindahan dari *qiyâs jalî* (yang jelas ‘*illat*-nya) kepada *qiyâs khafî* (yang samar ‘*illat*-nya). Hal ini bisa terjadi karena, menggunakan *qiyâs jalî* yang ‘*illat*-nya dapat diketahui dengan jelas, namun dampaknya kurang *efektif*. Sebaliknya, menggunakan *qiyâs khafî* walaupun ‘*illat*-nya tidak dapat diketahui dengan jelas, namun dampak yang ditimbulkannya lebih *efektif*. Atau mengecualikan dalil kulli (umum) berdasarkan dalil yang lebih kuat.

Contohnya kasus wakaf lahan pertanian. Menurut *qiyâs jalî* wakaf tersebut disamakan dengan akad jual beli. Dalam jual beli yang terpenting adalah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Yang oleh karenanya, hak pengairan dan hak membuat saluran air diatas tanah itu tidak diperoleh. Sebaliknya, menurut *qiyâs khafî* wakaf tersebut disamakan dengan sewa menyewa. Dalam sewa menyewa yang terpenting adalah pemindahan hak guna mendapatkan manfaat dari pemilik barang kepada penyewanya. Begitu juga dengan wakaf, yang terpenting adalah bagaimana barang tersebut bisa dimanfaatkan. Lahan pertanian bisa dimanfaatkan, jika mendapatkan pengairan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka hak pengairan dan hak membuat saluran berdasarkan *qiyâs khafî* tersebut bisa diperoleh.

Jika dianalisis, ternyata *Istihâs* secara metodologis merupakan *alternative* penyelesaian masalah yang tampak tidak dapat diselesaikan melalui metode *qiyâs* yang pada satu sisi *qiyâs* tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat akibat dari kekakuannya. Kekakuan *qiyâs* ini, nantinya akan membawa dampak terabaikanya tujuan pensyari'atan hukum Islam (*maqâshid al-syarî'ah*).

Dengan demikian *istihsan* merupakan metode *alternative* yang menempati posisi sentral *qiyâs* yang berupaya mewujudkan *Maqâshid al-Syarî'ah*. Sebagaimana yang dinyatakan *al-Syathibî* bahwa *Istihâs* harus selalu berorientasi pada upaya mewujudkan *Maqâshid al-Syarî'ah*. Serta mempertimbangkan dampak *positif* dan *negative* dari penetapan suatu hukum yang lazim diistilahkan dengan *al-nazhâr fî ma'âlât*.

2. Metode Istishlâhî (Metode Analisis Kemaslahatan)

Sebagaimana metode lainnya, metode *Istishlahî* merupakan metode pendekatan *istinbath* atau penetapan hukum yang permasalahan-nya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek *maslahat* secara langsung. Metode analisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid ada dua, yaitu *al-mashlahah al-mursalah* dan *sadd al-dzarî'ah* maupun *fath al-dzarî'ah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



a. Al-Mashlahah al-Mursalah

Secara etimologi *al-mashlahah al-mursalah* merupakan susunan *idlâfi* yang terdiri dari kata *al-mashlahah* dan *al-mursalah*. *al-mashlahah* menurut *Ibn Manzhûr* (W. 711 H.) berarti kebaikan. Sedangkan *al-mursalah* sama dengan kata *al-muthlaqah* berarti terlepas. Berarti yang dimaksud *al-mashlahah al-mursalah* adalah *maslahat* atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalka-nya.

Pengertian ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh *Muhammad Sâ'id Ramdlân al-Bûthi*, (W. 2013 M), bahwa Hakikat *al-mashlahah al-mursalah* adalah setiap kemanfaatan yang tercakup ke dalam tujuan *syâri'* dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan. Konsep *al-mashlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, dalam operasionalnya ia sangat menekankan aspek *mashlahah* secara langsung. *Mashlahah* bila dilihat dari sisi legalitas tekstual terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Mashlahah al-Mu'tabarah*

Adalah jenis *maslahat* yang keberadaanya didukung oleh teks *shari'ah* (*Al-Qur'an* maupun *Sunnah*). Maksudnya teks – melalui bentuk *'illat* – menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap sebagai *maslahat*.

Contohnya adalah fatwa 'Umar bin *Khaththâb* tentang hukuman bagi peminum minuman keras. Menurutnya peminum minuman keras harus didera 80 kali. Hal ini di-*qiyâs*-kan dengan orang yang menuduh orang lain berbuat *zina*. Sebab jika orang sudah mabuk, maka ia tidak akan bisa mengontrol akalannya sehingga diduga akan mudah menuduh orang lain berbuat *zina*. Sesuai dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teks Al-Qur'an (Q.S. al-Nûr: 4) bahwa hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera. Oleh karena adanya dugaan tersebut, maka 'Umar menetapkan hukuman bagi peminum minuman keras disamakan dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

Model analogi atau qiyâs seperti ini dianggap termasuk kemaslahatan yang legalitasnya didukung oleh teks. Maksudnya hukuman 80 kali dera bagi peminum minuman keras dianalogikan dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina, yang secara tekstual dijelaskan dalam Al-Qur'an.

2) *Mashlahah al-Mulghah*

Adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya ditolak bahkan bertentangan dengan teks syarî'at. Maksudnya sesuatu yang dianggap maslahat oleh manusia, tetapi teks syarî'at menolak atau menafikan kemaslahatan tersebut.

Contohnya fatwa seorang faqîh tentang hukuman seorang raja yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Yaitu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari memerdekakan budak. Menurut sang faqîh, memerdekakan budak tidak akan membuat efek jera si raja sehingga ia menghormati bulan Ramadan dan melaksanakan puasa. Hal ini disebabkan kondisi kehidupan sang raja yang serba kecukupan sehingga dengan mudah memerdekakan budak.

Hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut dipilih oleh sang faqîh, karena dianggap dapat mewujudkan kemaslahatan yaitu akan membuat efek jera sang raja. Kemaslahatan yang dikemukakan oleh sang faqîh tersebut, sekilas jika dilihat dari kaca mata manusia memang benar. Namun jika dilihat dari kaca mata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teks syari'at, maka kemaslahatan tersebut bertentangan dengan teks Sunnah. Sunnah menyatakan bahwa orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin.

Bentuk-bentuk hukuman tersebut dilaksanakan secara berurut. Pertama-tama memerdekakan budak, jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika masih tidak mampu maka memberi makan 60 orang fakir miskin.

3) *Mashlahah al-Mursalah*

Adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh teks syari'ah. Maksudnya suatu kemaslahatan yang posisinya tidak mendapatkan dukungan dari teks syari'ah dan tidak juga mendapatkan penolakan dari teks syari'ah secara rinci.

Contohnya tindakan *Abu Bakar* yang memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu *mushaf*. Padahal tindakan ini tidak pernah ditemui di masa *Rasulullah SAW*. Alasan yang mendorong tindakan *Abu Bakar* tersebut adalah semata-mata karena kemaslahatan. Yaitu menjaga Al-Qur'an agar tidak punah dan agar kemutawatiran Al-Qur'an tetap terjaga, di sebabkan banyaknya para sahabat yang hafal Al-Qur'an gugur di medan pertempuran. Terkait dengan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai metode penetapan hukum, terdapat perbedaan pendapat tentang kehujjahan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum.

Sebagian ulama menolak *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil atau dasar penetapan hukum. Termasuk kategori kelompok ini adalah *al-Syâfi'i*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian lagi menggunakan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum. Termasuk kelompok ini adalah *Imam Malik*. Menurutya mempergunakan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum metode ini tidak keluar dari cakupan nas. Meskipun maslahat ini tidak didukung oleh nas secara khusus, namun sesuai dengan tindakan shara' yang disimpulkan dari sejumlah ayat atau Sunnah yang menunjukkan pada prinsip-prinsip universal. Dan hal ini menunjukkan dalil yang kuat.

Namun demikian, *Imam Malik* tidaklah menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum tanpa syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:

1) Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*Maqâshid al-Syarî'ah*). berarti tidak diperbolehkan jika maslahat tersebut menegasikan sumber hukum Islam yang lain atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*.

2) Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*). Maksudnya maslahat tersebut sesuai dengan akal manusia yang mempunyai pemikiran rasional, sehingga kalau maslahat diajukan padanya akan mudah diterima.

3) Menggunakan maslahat tersebut dalam rangka menjaga kemudharatan atau menghilangkan kesulitan.

b. *al-Dzarî'ah*

Secara etimologi *al-dzarî'ah* berarti perantara, sedangkan menurut terminology adalah suatu perantara dan jalan menuju sesuatu, baik sesuatu itu berupa *mafsadah* atau *mashlahah*, ucapan ataupun pekerjaan. Dari pengertian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tersebut dapat dipahami bahwa *al-dzarî'ah* mempunyai dua pengertian, pertama sesuatu yang dilarang, yaitu berupa mafsadah, dalam hal ini para ulama berusaha menutupnya. Usaha ini lazim disebut dengan *sadd al-dzarî'ah*. Sedangkan keduadianjurkan atau dituntut, yaitu berupa maslahat. Dalam hal ini para ulama berusaha untuk membukanya. Usaha ini lazim disebut dengan *fath al-dzarî'ah*.

1) *Sadd al-dzarî'ah*.

Pada dasar-nya *sadd al-dzarî'ah* merupakan upaya *mujtahid* dalam menetapkan larangan suatu masalah yang pada dasarnya adalah mubah. Larangan itu lebih disebabkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang, sehingga konsep *sadd al-dzarî'ah* ini lebih bersifat *preventif*. Secara tegas *Abu Zahrah* menjelaskan bahwa ketentuan hukum yang ditetapkan melalui *al-dzarî'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasaran hukum. Menurutny sumber hukum terkait dengan konsep *sadd al-dzarî'ah*. terbagi menjadi dua.

Pertama *maqâshid* (tujuan) yaitu perkara-perkara yang mengandung *mashlahah* atau *mafsadah*.

Kedua *wasâ'il* (perantara) yaitu suatu perantara yang membawa kepada *maqâshid*, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasaranya, baik berupa halal maupun haram. Jika dilihat dari segi tingkatan hukum, ketetapan hukum terhadap *wasâ'il* jauh lebih ringan dibandingkan dengan ketetapan hukum yang berada pada *maqâshid*. terlepas dari tingkatan hukum tersebut, pada dasarnya yang menjadi dasar diterimanya *sadd al-dzarî'ah* sebagai metode penetapan hukum Islam adalah tinjauan terhadap akibat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya, baik perbuatan tersebut dikehendaki ataupun tidak dikehendaki. Tegasnya bahwa jika suatu perbuatan itu mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan (*mathlûb*), maka ia menjadi diperintahkan (*mathlûb*). begitu pula sebaliknya, jika sesuatu tersebut mengarah kepada suatu perbuatan yang dilarang, maka ia pun akan dilarang.

Menurut 'Abdul Karîm Zaidân, bahwa perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan kepada kerusakan adakalanya yang menurut zatnya memang rusak dan diharamkan, ada juga yang menurut zatnya mubah dan diperbolehkan. Jumhur ulama sepakat tentang pelarangan bentuk perbuatan yang menurut zatnya rusak dan diharamkan, sebab pada dasarnya perbuatan-perbuatan tersebut tidak masuk wilayah *sadd al-dzarî'ah*.

Contohnya minum minuman keras yang akhirnya merusak akal, menuduh berzina (*qadzâf*) yang mengakibatkan tercemarnya kehormatan seseorang, zina yang mengakibatkan bercampunya air mani secara tidak sah. Masalah-masalah tersebut tidak masuk kategori pembahasan *sadd al-dzarî'ah*, karena menurut tabi'atnya perbuatan-perbuatan tersebut membawa kepada kejelekan, bahaya serta kerusakan.

Sedangkan perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun membawa dampak pada kerusakan, terbagi menjadi tiga macam.

Pertama, perbuatan yang kemungkinan kecil akan membawa kerusakan atau *mafsadah*. Jenis perbuatan ini tidak terlarang, karena kemaslahatannya jauh lebih besar dari pada kerusakannya. Seperti melihat wanita yang sedang dikhitbah, menanam anggur, walaupun pada akhirnya nanti akan diproses oleh orang lain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi minuman keras. Perbuatan-perbuatan ini diperbolehkan karena kemanfaatan yang didapat jauh lebih besar dari pada kerusakan yang ditimbulkannya.

Kedua, perbuatan yang kemungkinan besar membawa kerusakan. Perbuatan jenis ini, dilarang oleh para ulama, karena *sadd al-dzarî'ah* menghendaki berhati-hati semaksimal mungkin agar terhindar dari kerusakan. Seperti menjual senjata disaat terjadinya fitnah, menyewakan rumah pada tukang judi, mencaci maki tuhan orang-orang *mushrik* di hadapan orang *mushrik*, menjual anggur kepada pembuat arak. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang, karena kerusakan atau madarat yang ditimbulkannya jauh lebih besar dari pada manfaat yang akan diperolehnya.

Ketiga, perbuatan yang membawa kapada kerusakan, akibat dari perbuatan *mukallaf* itu sendiri. Seperti menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, dengan maksud agar mantan suami tersebut boleh menikahi perempuan itu, pernikahan ini lazim dikenal dengan istilah nikah *muhallil*, *bay'u al-'ajâl* seperti seseorang menjual kain dengan harga seratus ribu rupiah dengan harga kredit, kemudian kain tersebut dibeli lagi dengan harga sembilan puluh ribu rupiah dengan harga kontan. Perbuatan ini merupakan pelipatgandaan hutang tanpa sebab, perbuatan-perbuatan ini terlarang karena cenderung kepadperbuatan-perbuatan ini terlarang karena cenderung kepada *mafsadah*.

Adapun contoh sadd al-dzarî'ah adalah persoalan hîlah terhadap kewajiban zakat. Seseorang mempunyai sejumlah harta yang menurut perhitungan (*nishab*) sudah memenuhi kewajiban zakat, namun menurut perhitungan waktu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*hawl*) masih kurang satu bulan, kemudian sebagian hartanya dihibahkan ke anak dan saudaranya, sehingga jumlah harta tersebut kurang dari satu *nishab*.

Perbuatan ini disebut *hilah* (tipu muslihat), akibat perbuatan ini pula, menghindarkan seseorang dari kewajiban zakat. Menghibahkan sebagian harta kepada orang lain yang sedang membutuhkan pada dasarnya diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh *shara'*, karena di dalamnya terdapat akad saling tolong menolong. Akan tetapi, karena hibah yang dilakukan tersebut bertujuan agar terhindar dari kewajiban zakat (*hilah*), maka perbuatan tersebut dilarang. Larangan ini berdasarkan pertimbangan bahwa hibah yang hukumnya sunah telah menggugurkan zakat yang hukumnya wajib.

2) *Fath al-dzarî'ah*.

Pada dasarnya *fath al-dzarî'ah* merupakan usaha mujtahid dalam menetapkan suatu anjuran yang pada asalnya adalah mubah. Sebagaimana halnya *sadd al-dzarî'ah* yang merupakan wasilah atau perantaraan sesuatu yang membawa kepada kerusakan, maka *fath al-dzarî'ah* juga merupakan wasilah atau perantaraan kepada sesuatu yang dianjurkan, oleh karena itu sesungguhnya, ketentuan *fath al-dzarî'ah* sama dengan ketentuan perbuatan yang menjadi sasarannya.

Menurut *Imam al-Qarafy* bahwa sebagaimana halnya *sadd al-dzarî'ah* yang berintikan larangan agar tidak terjerumus ke dalam kerusakan atau menghindarkan dari *mafsadah* (*dar'u al-mafâsid*), maka ada pula *fath al-dzarî'ah* yang berintikan anjuran yang akan membawa kepada kemaslahatan atau upaya menarik kemanfaatan (*jalbu al-manâfi'*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa ketentuan yang terdapat pada *al-dzarî'ah*, selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasaran hukum. Maksudnya, perbuatan yang membawa ke arah terlaksanakannya perbuatan mubah adalah mubah; perbuatan yang membawa ke arah perbuatan haram adalah haram; begitu juga perbuatan yang membawa ke arah terlaksananya perbuatan wajib maka hukumnya juga wajib.

Contohnya, *zina* adalah perbuatan haram. Maka melihat aurat yang menyebabkan terjerumusnya kedalam perbuatan *zina*, hukumnya juga haram. Shalat jum'at hukumnya wajib. Maka, meninggalkan jual beli guna memenuhi kewajiban menjalankan ibadah shalat jum'at adalah wajib. Semua hal ini masuk kategori *al-dzarî'ah*.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana yang dikutip Nasrun Haroen, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan diatas bukanlah termasuk kategori *al-dzarî'ah*, akan tetapi oleh jumhur ulama *ushûl al-fiqh*, masuk kategori *muqaddimah* (pendahuluan) dari suatu perbuatan. Maksudnya, jika perbuatan itu menunjukan sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib, dan hal ini lazim disebut dengan *muqaddimâh al-wâjibah*. Dan apabila perbuatan itu menunjukan sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram, hal ini lazim disebut dengan *muqaddimâh al-hurmah*. Hal ini sesuai dengan kaidah:

“suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya perbuatan lain, maka perbuatan lain itu hukumnya wajib”

“sesuatu yang menunjukan terhadap sesuatu perbuatan yang haram, maka sesuatu itu hukumnya haram”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

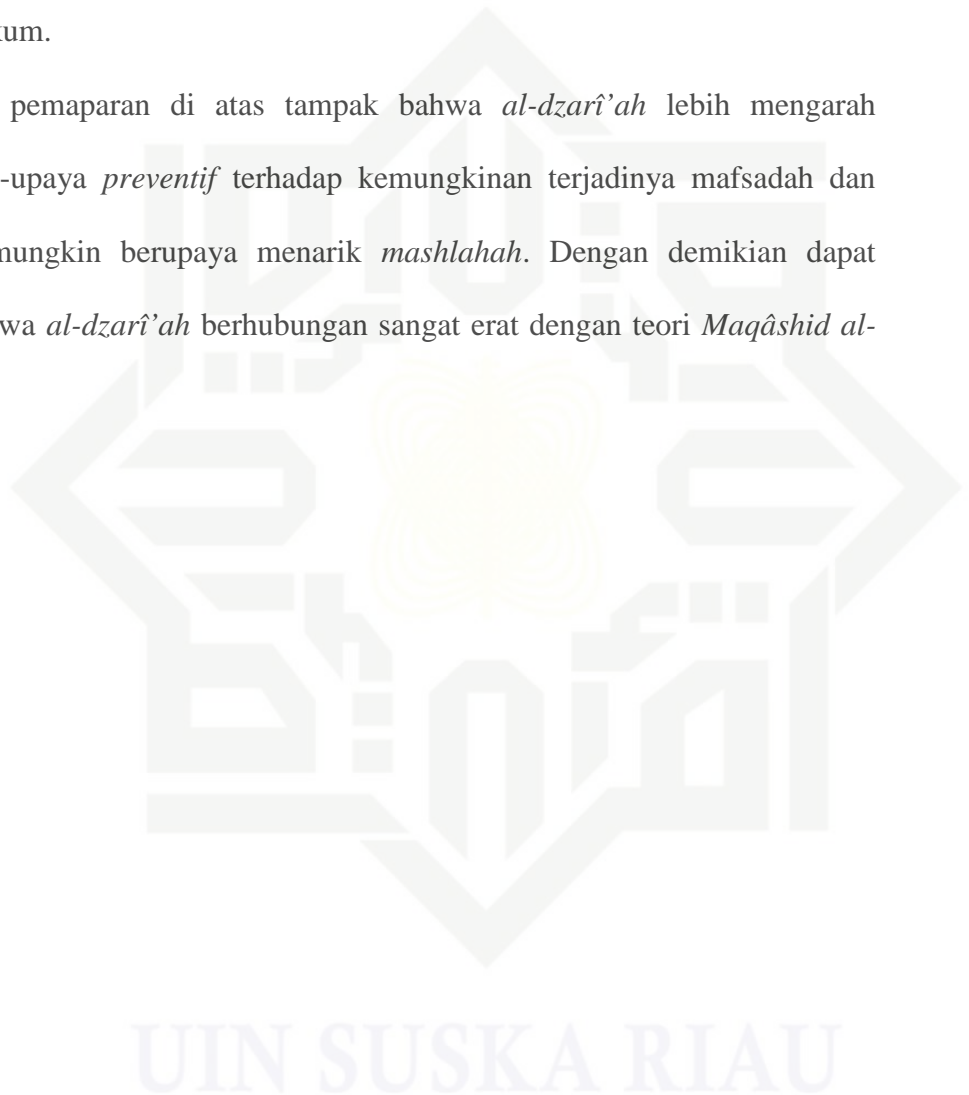
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama *Hanafiyyah*, *Syâfi'iyyah* dan sebagian *Mâlikiyyah* mengatakan bahwa perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *muqaddimâh* bukan masuk kategori *al-dzarî'ah*. Sedangkan ulama *Mâlikiyyah* dan *Hanabilah*, mengatakan bahwa perbuatan tersebut masuk kategori *al-dzarî'ah* yang disebut dengan *fath al-dzarî'ah*. Namun semua sepakat bahwa hal tersebut bisa dijadikan dasar penetapan hukum.

Dari pemaparan di atas tampak bahwa *al-dzarî'ah* lebih mengarah kepada upaya-upaya *preventif* terhadap kemungkinan terjadinya mafsadah dan semaksimal mungkin berupaya menarik *mashlahah*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *al-dzarî'ah* berhubungan sangat erat dengan teori *Maqâshid al-Syarî'ah*.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. BIOGRAFI SATRIA EFFENDI M. ZEIN

1. SEJARAH HIDUP

Satria Effendi Muh.Zein, lahir di Kuala Panduk, Riau pada 16 Agustus 1949, menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Kuala Panduk Riau, Tsanawiyah dan Aliyah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Sumatera Barat, gelar Lc didapat di Universitas Damaskus Syria, MA di Universitas King Abdul Aziz Mekkah, dan gelar Doktor dalam bidang Usul Fikih dengan Yudisium Cumlaude di Universitas Ummul Qura Mekkah setelah mempertahankan disertasi yang berjudul *al-Majmu' wa Dilalatuhu 'ala al-Ahkam*", sebuah studi kritis atas pemikiran hukum *Sirajuddin al-Ghaznawi* dalam karya *Syarah al-Mughni fi Ushul al-Fiqh li al-Khabbazi*. Sementara itu, gelar Guru Besar Madya dalam bidang *Ilmu Usul Fikih* telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2002, tetapi sebelum sempat dikukuhkan beliau telah menghadap kehadirat Allah SWT, pada hari Jumat dini hari 2 Februari 2000.

Beliau adalah dosen pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga pada beberapa pascasarjana IAIN lainnya seperti Yogyakarta, Riau, Padang, dan Ujung Pandang. Selain itu, mengajar pula di pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pascasarjana IIQ, Ketua Jurusan *Jinayah-Siyasah* Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta dan Dosen di beberapa Perguruan Tinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Swasta seperti Institut Agama Islam Darurrahman, Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA), dan Fakultas Syari'ah IIQ, wakil Ketua Fatwa MUI, Wakil Ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase MUI (BAMUI), Anggota Dewan Syari'ah Nasional (DSN MUI), Ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Asuransi MAA, dan wakil RI pada Lembaga Pengkajian Hukum Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islami*) Organisasi Konferensi Islam (OKI), aktif memberikan ceramah Agama dan seminar, banyak karya ilmiah yang almarhum tulis, di antaranya: "*Fikih Umar bin Khattab*", dalam Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer, 1988, "*Elastisitas Hukum Islam*", dalam buku Metode Mempelajari Islam, 1992, "*Fikih Mu'amalat (Suatu upaya rekayasa Sosial umat Islam Indonesia)*", dalam buku Aktualisasi Pemikiran Islam, "*Wawasan al-Qur'an tentang Hubungan Manusia dengan Alam Sekitarnya*", dalam buku al-Qur'an – IPTEK dan Kesejahteraan Umat, "*Metodologi Hukum Islam*", dalam buku Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pengembangan Hukum Nasional, Problema Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, baca *Satria Effendi M.Zein, Problema Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*.

Dalam belantika pemikiran dan upaya pengembangan hukum Islam di Indonesia, keberadaan *Satria Effendi*, tidak asing lagi. Bahkan, apabila ditelusuri ke seluruh pelosok tanah air, barangkali sudah banyak murid beliau yang berusaha mengembangkan pemikiran dan gagasannya. Murid adakalanya murid langsung melalui proses belajar mengajar di perguruan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi agama Islam, maupun murid yang tidak langsung bertatap muka dengan beliau, tetapi selalu mengikuti perkembangan pemikirannya dalam berbagai tulisannya yang sudah dipublikasikan, terutama dalam bentuk artikel yang dimuat dalam jurnal atau majalah ilmiah.¹ Gagasan segar beliau mulai terlihat ketika beliau mulai mengajar di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah) di bawah kepemimpinan *Harun Nasution*. Saat itu Pascasarjana identik dengan pola dan cara berpikir rasional yang dikembangkan Harun. Begitu gencarnya kecenderungan rasionalisasi dalam memahami ajaran Islam, sering kali ahli hukum Islam (*syari'ah*) dianggap sebagai kelompok yang tidak bisa diajak untuk mengembangkan penalaran. Sampai suatu saat Harun pernah mengatakan, bahwa orang Fakultas Syari'ah sulit diajak berpikir modern (maju dan rasional). Dalam suasana seperti inilah *Satria Effendi* masuk ke program Pasacsarajana. Dapat dibayangkan, apabila cara berpikir orang syari'ah konvensional yang dipakai saat itu, *Harun*, sebagai pimpinan Pascasarjana, belum tentu berkenan menerima kehadiran beliau.² Dalam kondisi seperti itulah Satria berusaha menjembatani pemikiran hukum Islam konvensional dengan pemikiran rasional. Tidak heran kalau bahan ajar dan literatur yang disajikan pada program Pascasarjana IAIN berusaha mengakomodir pemikir hukum Islam yang punya kecenderungan analisis yang relatif rasional. Dalam materi *Usul Fikih*, misalnya, kita menemukan

¹ Fathurrahman Djamil. 2004. "Karakteristik Pemikiran Fiqh Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA" (Epilog) dalam Satria Effendi M. Zein. 2004. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004), hlm. 522.

² *Ibid.* hlm. 522-523

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materi yang berbicara tentang kedudukan akal dan wahyu dalam hukum Islam, konsep *ta'aqquli* dan *ta'abbudi* dan sudah tentu konsep *maqasid al-syari'ah* yang mengarah kepada pembahasan filosofis disyari'atkan hukum Islam.³ Dari ketiga materi kajian di atas sudah dapat diduga, bahwa beliau ingin mengantarkan murid-muridnya untuk memahami secara proporsional peran akal dalam memahami nas suci *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah*, dan bagaimana dapat membuat pengelompokkan hukum Islam yang masuk ranah yang *given* atau *taken for granted*, yang dogmatis, di satu sisi dan mana yang terbuka pada penalaran akal di pihak lain. Gagasan ini menjadi starting point untuk membuka wacana hukum Islam yang rasional. Untuk membahas topik utama ini beliau selalu mengacu pada pemikiran ahli hukum Islam dari *Cordoba*, *Abu Ishaq al-Syatibi*.⁴ Melalui pembukaan wacana hukum Islam yang rasional dan dinamis, Satria dikenal sebagai ahli hukum Islam memperhatikan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Berbagai gagasan tentang hukum Islam dan perubahan sosial ditulis oleh beliau dalam berbagai seminar yang dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta. Kesan umum dari berbagai tulisan beliau adalah, bahwa hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan relevan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.⁵ Untuk mengukuhkan dan memperkuat gagasan tersebut, *Satria Effendi* banyak bicara tentang *illat mansusah dan*

³ Satria Effendi M.Zein. 1995. *Usul Fikih*. Jakarta: PPS IAIN Jakarta, hlm. 1-68

⁴ Fathurrahman Djamil, "Karakteristik Pemikiran...p.523.

⁵ Satria Effendi M.Zein, "Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia", dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (Editor), *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*. Surakarta: FIAI UMS, p.23-40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

illat mu'tabarah, dan sering merujuk kasus *ijtihad tatbiqi*⁶ dari Umar bin Khattab.⁷ Berkat gagasan dan pemikirannya itu, mengantarkan ahli hukum Islam (Indonesia) dapat berinteraksi dengan wacana modernitas.⁸ Deskripsi

⁶ Ibid. p.39-40. Ijtihad dalam pandangan Satria Effendi terbagi menjadi 2 macam, yaitu *ijtihad istimbati* dan *ijtihad tatbiqi*, *ijtihad istimbati* adalah upaya menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya, sedangkan *ijtihad tatbiqi* adalah upaya menerapkan hukum itu secara tepat terhadap suatu kasus. Dalam *ijtihad istimbati*, yang menjadi pusat perhatian adalah sumber-sumber hukum Islam, yang dilakukan baik dengan pendekatan kebahasaan maupun pendekatan *maqasid syari'ah*. Dalam *ijtihad tatbiqi* yang menjadi perhatian utama adalah untuk mengantarkan seorang penerap hukum kepada penerapan hukum secara tepat dalam suatu kasus, yang menjadi objek kajiannya adalah hal-hal yang meliputi perbuatan manusia dengan segala bentuk objek perbuatan itu, juga manusia itu sendiri sebagai pelaku hukum dengan segala kondisi dan perbuatannya. *Ijtihad tatbiqi* dapat berlaku pada setiap hukum, baik yang dinilai *qat'i*, rinci maupun yang *zanni*, baca juga Satria Effendi M.Zein. 1996. "Metodologi Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad dkk (Editor), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p. 117-128.

⁷ Dalam pandangan Satria Effendi kasus-kasus hukum *ijtihad Umar bin Khattab* termasuk kategori *ijtihad tatbiqi*, dengan demikian *ijtihad Umar* dalam berbagai kasus hukum tersebut tidak meninggalkan nas, apalagi mengganti atau menghapuskannya, baca Muhammad Sa'id Ramdan al- Buti. 1986. *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'at al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, Amiur Nuruddin. 1987. *Ijtihad Umar bin Khattab Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. Paling tidak ada 5 pandangan terhadap *ijtihad Umar*, yaitu: (1) *ijtihad Umar* tidak meninggalkan nas, apalagi mengganti atau menghapuskan ketentuannya, (2) *ijtihad Umar* memang meninggalkan *zahirnya nas*. Karena ia berpegang pada ruh nas atau *maqasid syari'ah*, (3) *ijtihad Umar* berkenaan dengan masalah yang *qat'iyah* yang bukan bidang *ijtihad*, tetapi ini diperbolehkan khusus untuk Umar, (4) *ijtihad Umar* telah meninggalkan nas yang *sarih*, tetapi sebagaimana berlaku pada setiap *mujtahid*, *ijtihadnya* tetap memperoleh satu ganjaran, dan (5) *ijtihad Umar* memang banyak melanggar nas yang *qat'i*, tetapi itu dilakukan Umar karena kekurangan informasi yang diterimanya untuk persoalan-persoalan yang bersangkutan, baca Jalaluddin Rakhmat. 1988. "Kontroversi Sekitar Ijtihad Umar R.A. dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (Penyunting), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, hlm. 43-59.

⁸ Hal yang menarik dari pemikiran Satria Effendi M.Zein, ketika Beliau, memaparkan konsep *istimbath hukum* yang baru bagi Penulis, Yakni, *Tahkrijul Ahkam bi Al-Aqwaal Al-'Ulama'* (تجريد الأحكام بأقوال العلماء), Yakni, "Mengeluarkan hukum berdasarkan perkataan Ulama". Dimana, pada waktu para Ulama Timur Tengah (khusus-nya Ulama' Makkah) kebingungan untuk mencari landasan hukum berupa dalil dalam rangka legitimasi untuk membolehkan/mengesahkan penambahan bangunan Masjid al-Haram secara bertingkat. Karena pada masa itu masjid Haram yang satu tingkat, tidak memungkinkan untuk menampung jumlah jama'ah yang terus bertambah dan meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itulah muncul gagasan untuk menambah bangunan masjid menjadi beberapa tingkat ke atas.Namun pelaksanaanya belum dapat dilakukan karena para Ulama belum menemukan dalil yang memperbolehkan pelaksanaanya. Maka dilakulah musyawarah para Ulama' di Kota Makkah untuk keperluan tersebut. Akan tetapi, para Ulama' belum juga mendapati dalil yang digunakan sebagai dasar dalam *ijtihad* mereka. Untuk melihat dasar hukumnya dari sumber Quran, Hadist dan Ijma', tidak diperoleh isyarat – isyaratnya, baik secara *Mafhum* atau *Manthuq* dari Nash-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran *Satria Effendi M. Zein* tentang hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan relevan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat di atas, dapat dibaca dalam berbagai tulisannya.⁹

2. MODEL KAJIAN HUKUM ISLAM SATRIA EFFENDI M. ZEIN

Salah satu model kajian hukum Islam yang ditawarkan oleh *Satria Effendi* adalah menggunakan studi kasus.¹⁰ Metode analisis yurisprudensi ini

nash tersebut. Untuk itu, metode ijtihad dengan menggunakan Qiyas, tentu saja tidak mungkin untuk dilakukan, sebab tidak mencukupi rukun qiyas, yakni tidak ada hukum asal () yang harus ditetapkan terhadap cabang () yang akan disamakan hukumnya. Dalam rangka melakukan pembahasan alot, untuk menjawab masalah tersebut berhari-hari, maka dijumpailah perkataan seorang Ulama dari kalangan Mazhab Hambali, yang bernama *Ibnu Qudamah* (W. 629 H.) Dalam kitab-nya *Al-Mughni* (). Kitab ini disusun sebagai Kitab penjelasan (syarah) kepada kitab Mukhtasar Al-Khoroqi () sebuah kitab fiqh dalam mazhab Hambali karya Abu al-Qasim 'Umar bin 'Abdullah al-Kharaqi. Kitab ini membawa metode pembahasan fiqh perbandingan (*muqorran*) antar mazhab, dengan menjadikan *mazhab fiqh Imam Ahmad bin Hambali* sebagai yang utama. Di dalam kitab ini, secara luas dan mendalam, banyak masalah hukum *Fikih* yang dituliskan, bahkan sampai kepada "*Fikih Iftirodh*" (Yakni; fikih Pengandaian) terhadap masalah-masalah yang merupakan syarat, rukun dan wajib, dalam kesemyempurnakan suatu ibadah, namun belum terjadi, misalnya, : "*Seandainya Mina Penuh, dan tak memungkinkan lagi untuk menampung jam'ah haji, Seandainya, Muzdalifah Juga penuh' dan lain-lain-nya*". Oleh karena itulah, di dalam kitab *Al-Mughni*, "*Ibnu Qudamah*, menyatakan "*Seandainya masjid Haram Makkah itu penuh, maka dibolehkan untuk diperluas*". Makna di perluas, sudah mencakup makna ditingkatkan. Dari pernyataan inilah maka para ulama melakukan *Istimbath* Hukum terhadap rencana peningkatan Masjid Haram tersebut. Meng-*Istimbath*-kan hukum berdasarkan dengan perkataan ulama', maka, dikenal dengan istilah "*Takhrijul al-Ahkam bi al-Aqwal al-Ulama'*",

Dan *Istimbath* hukum melalui perkataan seorang Ulama', adalah metode yang baru ditemukan, oleh para ulama', dimana metode tersebut selaras dengan prinsip-prinsip *Maqasyid Asy-Syari'ah*, dalam rangka menjawab tuntutan perkembangan zaman dan waktu, terlebih pada zaman moderen. (disadur berdasarkan catatan kuliah bersama *Satria Effendi M. Zein*, di Fakultas, Syari'ah IAIN Susqa, Pekanbaru-Riau, Tahun 1994)

⁹ Satria Effendi M. Zein. 1995. *Usul Fikih*. Jakarta: PPS IAIN Jakarta, hlm. 1-68; Satria Effendi M. Zein, " *Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia*", dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (Editor), *Fiqh Indonesia dalam Tantangan* (Surakarta: FIAI UMS, hlm. 23-40; Satria Effendi M. Zein. 1991. "*Maqashid al-Syari'at dan Perubahan Sosial*" dalam Dialog. Badan Litbang Depag RI No.33 tahun XV, hlm. 29; Satria Effendi M. Zein, "*Metodologi Hukum Islam*", dalam Amrullah Ahmad dkk (Editor). 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* Mengenang 65 Th Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 117-128, dan Satria Effendi M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI.

¹⁰ *Sifat khas dari case study atau studi kasus adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (wholeness) dari objek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Tujuannya adalah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan model (*metode*) studi kasus mengkaji perkara hukum dalam bidang hukum Islam pada umumnya dan keluarga Islam khususnya yang benar-benar terjadi dalam masyarakat dan menganalisis perkara itu dari segi pendapat-pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih. Model kajian hukum Islam seperti yang dilakukan oleh *Satria Effendi* ini seolah memberi contoh bagaimana seorang ahli ilmu hukum Islam membaca dan menganalisis masalah-masalah hukum Islam yang benar-benar terjadi dalam masyarakat, seperti perkara-perkara hukum keluarga Islam yang pernah diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia kemudian menyimpulkan hasil analisisnya.¹¹ Dalam melakukan analisis yurisprudensi di atas, terkadang beliau menyetujui suatu keputusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding atau tingkat kasasi, tetapi terkadang beliau juga tidak menyetujui suatu keputusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi. Bahkan terkadang beliau memberi saran alternatif yang seharusnya dapat dilakukan oleh suatu keputusan pengadilan dan alternatif itu tidak pernah disinggung oleh Pengadilan Agama tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dalam perkara-perkara yang bersangkutan. Studi kasus sebagai sebuah model metode kajian hukum, mempelajari hukum yang dihadapkan kepada persoalan hukum (perkara) riil, kemudian diharapkan untuk dapat menganalisisnya dari segi hukum dan menyimpulkan status hukumnya. Kelebihan model metode studi kasus terutama karena sifatnya

untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang bersangkutan, yang berarti bahwa studi kasus disifatkan sebagai suatu penelitian yang eksploratif, J. Vedenbregt. 1978. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, hlm. 34

¹¹ M. Atho' Mudzhar, "Peranan Analisis Yurisprudensi...p.xxv-xxvi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang utuh sebagai suatu persoalan hukum dengan segala jenis keterkaitannya dengan masalah lain di luar hukum. Selain itu, metode ini juga melakukan kajian sinkronisasi hukum dari berbagai peraturan perundangundangan mengenai hukum masalah hukum yang bersangkutan. Studi yang dilakukan oleh *Satria Effendi* di atas, khususnya tentang hukum keluarga, memperkaya jenis-jenis studi pemikiran hukum Islam. Seperti diketahui paling tidak terdapat 5 jenis literatur pemikiran hukum Islam yang dikenal, yaitu kitab fikih, Keputusan Pengadilan, fatwa-fatwa, Undang-Undang, dan Kompilasi Hukum Islam. Kitab fikih bersifat menyeluruh dari awal sampai akhir sehingga sering enggan menerima perubahan, karena untuk mengubah sebagiannya dianggap harus mengubah keseluruhannya, khususnya sebelum muncul kitab-kitab fikih *maudhu'i*. Keputusan pengadilan lebih dinamis sifatnya karena menyangkut masalah-masalah hukum nyata dalam masyarakat dan juga mengikat pihak-pihak terkait. Fatwa ulama atau mufti juga lebih dinamis sifatnya karena harus menjawab pertanyaan hukum masyarakat, meskipun tidak harus mengikat si peminta fatwa. UU sifatnya mengikat seluruh anggota masyarakat dan memberikan sanksi, tetapi dalam perumusannya sering kali bukan hanya dilakukan oleh para ulama melainkan juga oleh para politikus. Adapun Kompilasi Hukum Islam, dari segi bentuknya, disusun seperti UU, tetapi sifatnya tidak mengikat dan dari segi isinya lebih merupakan hasil konsensus ulama setempat.¹² Dari semua jenis literatur pemikiran hukum Islam tersebut yang telah banyak khazanahnya

¹² M. Atho' Mudzhar. 1999. " Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam" dalam Profetika Jurnal Studi Islam, Vol.1 No.1, hlm. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

adalah dalam bidang fikih, sedangkan studi-studi mengenai empat jenis literatur yang lainnya masih sangat sedikit. Karena itulah studi yurisprudensi Satria Effendi ini merupakan sumbangan berharga bagi pengayaan, penyediaan, dan pemahaman literatur pemikiran hukum Islam di luar kitab-kitab fikih.¹³ Selain itu, karya-karya *Satria Effendi* juga menambah khazanah dan karya yang membahas tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia di era kontemporer.¹⁴

Pembahasan masalah fikih dengan model perbandingan bukanlah suatu yang asing, terutama pada periode modern ini. Berbagai literatur fikih disajikan dalam bentuk studi perbandingan dengan memperhatikan apa yang menjadi inti persoalannya (*mansya al-khilaf*). Kitab *Bidayat al-Mujtahid* karya *Ibn Rusyd* dianggap sebagai kitab pertama yang disajikan dalam bentuk perbandingan mazhab ini. Setelah itu, bermunculan berbagai kitab fikih yang

¹³ M. Atho Mudzhar, "Peranan Analisis Yurisprudensi ...", p.xxvii

¹⁴ Karya-karya yang khusus membahas tentang hukum Islam di Indonesia kontemporer antara lain Nur A.Fadhil Lubis. 1995. *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*. Medan: Pustaka Widyasarana, Nur Ahmad Fadhil Lubis. 1994. "Islamic Justice in Transition: A Socio-Legal Study of the Agama Court Judges in Indonesia. Disertasi Univ. California; Fathurrahman Djamil. 1995. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House; Mudzhar, M. Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Disertasi pada UCLA Terj. Soedarso Soekarno dari judul Bahasa Inggris *Fatwas of The Council of Indonesian Ulama A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*. Edisi Dwibahasa (Indonesia dan Inggris). Jakarta: INIS; Nourouzzaman Shiddiqi. 1997. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya* (disertasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar; Dede Rosyada. 1999. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* (disertasi). Jakarta: Logos; Ari Anshori dan Slamet Warsidi (editor). 1991. *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*. Surakarta: FIAI UMS; Amrullah Ahmad dkk (Editor) 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH*. Jakarta: Geman Insani Press; Akh. Minhaji. 2001. *Ahmad Hasan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)* (disertasi). Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press; Rifyal Ka'bah. 2004. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan; M.B. Hooker. 2002. *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, terj. Idring Rosyidin Hasan. Jakarta: Teraju Mizan; Ahamd Rofiq. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada; Tim penulis. 1991. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosdakarya; Tim Penulis. 2000. *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bercorak *muqaranah* ini. Salah satu kitab yang sering dikutip oleh *Satria Effendi* adalah kitab *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arbaah* karya *Abdu al-Rahman al-Jaziri*, *Fiqhu al-Sunnah* karya *Sayid Sabiq*, dan kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya *Wahbah al-Zuhaili*. Upaya untuk membangun fikih lintas mazhab terlihat jelas dalam analisis *Satria Effendi* terhadap berbagai masalah hukum keluarga. Adakalanya ia mengungkapkan pendapat ahli fikih dari berbagai mazhab secara qauli tetapi juga terkadang ia mengungkapkan pendapat mereka secara manhaji. Terhadap kedua cara ini akhirnya beliau harus memberikan semacam preferensi atau tarjih, mana di antara pendapat para fukaha terdahulunya yang dapat diterima dan dijadikan sebagai pendapat yang terpilih. Namun kelihatannya cara tarjih yang dilakukan oleh beliau mempunyai “kelebihan”, dibandingkan dengan cara tarjih ahli fikih lainnya. Salah satu kriteria tarjih yang digunakan beliau adalah sejauh mana pendapat itu mengacu pada maqasid al-syariah. Beliau menegaskan, bahwa apabila hakim melihat adanya pendapat para ulama atau fuqaha yang bertentangan dengan kemaslahatan dan tujuan syariat, hakim boleh memilih pendapat yang lain, selama sejalan dengan tujuan syariat. Pandangan beliau tentang tarjih berdasarkan maqasid, diterapkan secara konsisten ketika menganalisis akibat cerai karena tidak mempunyai keturunan atau karena adanya penyakit. Beliau mentarjihkan pendapat *Al-Zuhri* (W. 741 M) dan ulama lain yang sependapat dengan beliau, karena lebih sesuai dengan tujuan syariat.¹⁵ Namun demikian, salah satu yang dapat dicatat di sini di antaranya adalah dalam semua

¹⁵ Satria Effendi M.Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer....* hlm. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pembahasannya, *Satria Effendi* hampir tidak pernah merujuk kepada peraturan perundang-undangan tentang hukum keluarga yang berlaku di negara-negara Muslim di dunia modern sekarang ini, di luar Indonesia. Padahal perbandingan seperti itu, amat diperlukan, agar supaya para pemikir hukum Islam tidak sendirian di dalam melakukan terobosan-terobosan pemikiran hukumnya. Inilah yang dapat disebut dengan kajian komparatif horizontal.¹⁶

Sedangkan yang telah dilakukan oleh *Satria Effendi* adalah kajian komparatif vertikal, yaitu membandingkan masalah hukum yang dihadapi dengan apa yang terdapat dalam kitab fikih. Beberapa masalah yang dapat dilakukan kajian komparatif horizontal misalnya adalah menyangkut pencatatan perkawinan atau nikah di bawah tangan, masalah poligami, dan masalah gugat cerai serta tuntutan nafkah. Masalah pencatatan nikah misalnya, semua negeri muslim modern sekarang ini telah mewajibkannya

¹⁶ Literatur mengenai komparatif horizontal tersebut di antaranya Family Law Reform in The Muslim World karya Taher Mahmood, Bombay, 1972; Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis oleh Tahir Mahmood, New Delhi, 1987; Syarh Qanun al-Ahwal as-Syakhsyah karya Mahmud Ali Sartawi, Yordan, Syarh Qanun al-Ahwal as-Syakhsyah as-Suri karya Abdurrahman as-Sabuni, jilid 1 dan 2, Damaskus, 1972-1993; Al-Ahwal as-Syakhsyah oleh Ahmad al-Haji al-Kurdi, Damaskus, 1972-1973; al-Ahwal as-Syakhsyah karya Francois Paul BLANC dan Rahba ZEIDGUY. Maroko, 1996; al-Wajiz fi Syarh al-Qanun al-Ahwal Syakhsyah wa Ta'dilatih oleh Ahamd al-Kubaisi jilid 1 dan 2, Bagdad, 1991; Qanun al-Ahwal as-Syakhsyah ma'a Ta'dilatih oleh Muhammad Kasybur, Bagdad, 1993; Qanun al-Ahwal as-Syakhsyahraqm 188 Lisanah 1995 wa Ta'dilatih karya Sabbah Sadiq Ja'fari, Bagdad, 2001; Mausu'ah al-Ahwal as-Syakhsyah oleh Kamal Shaleh al-Bana, Dar al-Kutub al-Qanuniyah, 1997; Ahkam al-Miras wa al-Wasiyah wa Haqq alIntiqal fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran wa al-Qanun karya Mustafa Ibrahim az-Zilmi, Bagdad, 2000; dan Islamic Marriage and Divorce Law of The Arab World karya Dawoud El- Alami dan Doren Hinchcliffe, London, 1996; Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, London-New York: Zed Books Ltd, 2002; Islam, Negara dan Hukum Kumpulan karangan di bawah redaksi Johannes den Heijer, Syamsul Anwar, Leiden-Jakarta: INIS, 1993; Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden-Jakarta: INIS, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui peraturan perundang-undangan. Demikian pula mengenai poligami, beberapa negara seperti *Yordania, Maroko, Yaman, Syria, dan Tunisia* telah mengatur bahwa suatu akad nikah boleh disertai seperangkat perjanjian antara calon suami dan isteri, termasuk perjanjian bahwa suami tidak akan menikah lagi selama ia berada dalam ikatan perkawinan dengan isterinya.

Mengenai gugat cerai dan tuntutan nafkah, sejumlah negara seperti *Yordania, Mesir, Lebanon, Maroko, dan Yaman* telah mewajibkan para mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan isterinya selama masa iddah atau masa lain yang ditentukan sampai tiga tahun. Sedangkan khusus mengenai nafkah, sejumlah negara seperti *Banglades dan Pakistan* telah memberlakukan undang-undang yang memberi hak kepada isteri untuk mengajukan tuntutan perdata atau bahkan pidana apabila hak nafkahnya tidak diberikan oleh suami. Mengenai hadanah, sejumlah negara seperti *Aljazair, Mesir, Irak, Yordan, Malaysia, Maroko, Yaman, dan Somalia* telah memberlakukan undang-undang yang mengatur bahwa ibu adalah pemegang utama hak hadanah, sedangkan di *Tunisia* diatur bahwa baik ibu maupun ayah mempunyai hak yang sama atas hadanah. Demikian beberapa negara dapat dikatakan telah memberlakukan peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan merupakan terobosan baru dalam pemikiran hukum Islam. Pemikiran itu berbeda dengan dengan apa yang ada dalam kitab-kitab fikih dan inilah yang disebut keberanjakan hukum Islam modern dari kitab-kitab fikih. Pengetahuan tentang hukum Islam dalam *perspektif komparatif horizontal* dan keberanjakan ini adalah sangat penting untuk menengarai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan dan dinamika pemikiran hukum Islam,¹⁷ dan hal inilah yang tidak dilakukan oleh *Satria Effendi*. Akan tetapi tentu saja hal ini adalah pekerjaan besar dan berat yang tidak harus dilakukan oleh seorang diri seperti *Satria Effendi*. Di sini diperlukan pemikir-pemikir hukum Islam lainnya yang akan melanjutkan pekerjaan penting dan mulia yang telah dirintis olehnya.

3 KERANGKA METODOLOGI HUKUM ISLAM SATRIA EFFENDI

Persoalan-persoalan hukum Islam dan hukum keluarga Islam yang dibahas *Satria Effendi* dalam berbagai karyanya, sebagian adalah masalah lama yang sudah banyak tertulis rujukannya dalam kitab-kitab fikih. Akan tetapi sebagian masalah lainnya, seperti soal akad nikah melalui telepon, masalah harta gono-gini, masalah status uang tanggungan asuransi sebagai harta waris, masalah uang santunan sebagai harta waris, dan lain-lain adalah masalah-masalah baru yang sering kali belum ada rujukannya secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih.¹⁸ Dalam menganalisis kasus-kasus seperti tersebut, *Satria Effendi* selalu terlebih dahulu mencari dan menyajikan dalil nas yang ada baik Al-Qur'an maupun hadis, kemudian membandingkan pendapat-

¹⁷ J.N.D. Anderson. 1960. "The Significance of Islamic Law in the World Today," *The American Journal of Comparative Law*, hlm. 191; idem. 1959. *Islamic Law in the Modern World*. New York: New York State University Press, hlm. 25-6, 91; idem. 1976. *Law Reform in the Muslim World*. London: The Athlone Press, hlm. 83; idem. *Islamic Law*, hlm. 82; idem. 1971. "The Role of Personal Status in Social Development in Islamic Countries", *Comparative Studies in Society and History* 13, hlm. 18-9; Majid Khadduri. 1978. "Marriage in Islamic Law: The Modernist Viewpoints", *The American Journal of Comparative Law* 26, hlm.215; Herbert J. Liebesny. 1953. "Religious Law and Westernization in the Modern Near East", *The American Journal of Comparative Law* 2, hlm. 492.

¹⁸ M.Atho' Mudzhar, "Peranan Analisis Yurisprudensi....hlm. xxxix

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat ulama yang ada yang dikutip dari berbagai sumber,¹⁹ setelah itu ia melakukan qiyas dan menguji maslahat serta maqasidus syari'ah yang ada dalam masalah itu, barulah kemudian ia menyimpulkannya. Di sinilah letak kedalaman dan kontribusi pemikiran *Satria Effendi* mengenai hukum Islam

¹⁹ Nama-nama kitab rujukan yang dipergunakan Satria Effendi tersebut adalah *Ilmu Usul al-Fiqh* karya Abdul Wahhab Khallaf, Kuwait: Dar al-Qalam, 1983; *Nizam al-Qada' fi Syariat al-Islamiyah* oleh Abdul Karim Zaidan, Bagdad: Matba'ah al-Ani, 1984; *Kompilasi Hukum Islam* oleh Abdurrahman, Jakarta: Akademi Presindo, 1990; *al-Qada wa Nizamuh fi al-Kitab wa as-Sunnah* oleh Abdurrahman Ibrahim, Bagdad: Matba'ah al-Ani, 1994; *al-Muhazab* oleh Abu Ishaq as-Sirazi, Beirut: Dar al-Fikr, 1994; *al-Qada wa al-Bayyinah* karya Abdul Hasib Abdussalam, Kuwait: Maktabah al-Ma'la, 1987; *Munazaat al-Auqaf wa al-Ahkam* oleh Abdul Hamid as-Sawaribi, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1983; *al-Mafhum al-Fiqh al-Islami* oleh Abdul Hamid Nizamuddin, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1983; *Ilm al-Qada* oleh Ahmad al-Hasadi, Kuwait: Maktabah al-Ma'la, 1983; *Bulugul Maram* karya al-Asqalani, Beirut: Dar al-Fikr, 1979; *Adlu as-Sani' fi Tartib as-Syari'ah* karya Alauddin al-Kisani, Bagdad: Matba'ahal-Ani, 1978; *Usul at-Tasyri al-Islami* karya Ali Hasaballah, Mesir: Dar al-Maarif, 1976; *Kamus Bahasa Indonesia* oleh Depdikbud RI, Jakarta: Balai Pustaka, 1990; *Mimbar Hukum* oleh Ditbinpera Depag RI, Jakarta: al-Hikmah dan dan Ditbinpera Islam; *Nizam al-Hukm fi asSyari'ah al-Islamiyah* oleh Zafir al-Qasim, Lubnan: Dar an-Nafa'is, 1980; *al-Fiqh al-Muqaran ma al-Mazahib* karya Fathi ad-Daraini, Damaskus: T.P., 1980; *Tuhfat al-Muhtaj* karya al-Haisami, Bairut: Dar al-Fikr T.T.); *Hukum Kewarisan Bilateral* menurut Al-Qur'an oleh Hazairin, Jakarta: Rineka Cipta, 1989; *at-Tabsyirah* oleh Ibnu Farhun, Beirut: Muassasah ar- Risalah, 1982; *Syarh Fath al-Qadir* karya Ibnu Humam, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi T.T.; *A'lam al-Muawqi'in* karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, Beirut: Dar al-Fikr, 1977; *al-Mugni* karya Ibn Qudamah, Matba'ah al-Qahirah, 1970; *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al- Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr T.T.; *Majmu' al-Fatawa* karya Ibn Taimiyah, Makkah: *Asrof ar-Risalah* T.T.; *alMudawwanah al-Kubra* oleh Imam Malik (Beirut: Dar la-Fikr, 1987); *Kasyf al-Khafa wa Muzil al-Ilbas* oleh Ismail bin Muhammad, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1983; *al-Fiqh ala Mazahib al-Arbaah* oleh Jaziri, Beirut: Dar al-Fikr T.T.; *Muhadarah fi al-Waaj al-Ahwal as-Syakhsiyah* Muhammad Abu Zahrah, Dar al-Fikr al-Arabi, 1957; *al-Ahwal as-Syakhsiyah* oleh Muhammad Abu Zahrah, Dar al-Fikr al-Arabi, 1958; *Rawa'i al-Bayan* oleh Muhammad Ali as-Sabuni, Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1980; *al-Misbah al-Munir* oleh Muhammad bin Ali al-Maqri, Beirut: Dar al-Fikr, 1987; *Ilm al-Qada Adillah al-Isbat fi al-Islam* karya Muhammad al-Husairi, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1984; *al-Wajiz Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah* oleh Muhammad Sidqi al-Burnu, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1983; *Muntaqa an-Nuzul fi Sirah Azm an-Rasul* oleh Muhammad bin Mansur, Makkah: T.P., 1982; *Akhbar al-Qada* oleh Muhammad Khalaf bin Hayyan, Beirut: Alim a; -Kutub T.T.; *Himpunan Fatwa MUI* oleh MUI 1994; *al-Madkhal al-Fiqh al-Am* oleh Mustafa Ahmad az-Zarqa, Damaskus: Matba; ah Turbain, 1968; *al-Fiqh al-Islami fi Saubih al-Jadid* oleh Mustafa Ahmad Zarqa, Damaskus: Matba; ah Turbain, 1978; *al-Ahwal as-Syakhsiyah* karya Mustafa as-Siba'I, Damaskus: Matba'ah al-Jami'ah, 1970; *Tafsir al-Maeagi* oleh Mustafa al-Maragi, Beirut: Dar al-Fikr T.T.; *al-Majmu' Syarhal-Muhazzab* oleh an-Nawawi, Beirut: Dar al-Fikr, T.T.; *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* oleh al-Qurtubi, Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1967; *Nihayat al-Muhtaj* oleh ar-Ramli, Beirut: Dar al-Fikr, T.T.; *Halul Mattaham fi Majlis al-Qada* oleh Salih Lahidan, Beirut: Alim al-Kutub, T.T.; *Fiqh as-Sunnah* oleh Sayyid Sabiq, Dar al-Fikr, 1983; *Subul as-Salam* oleh as-San'ani, Beirut: Dar al-Fikr, T.T.; *al-Muwafaqat* oleh as-Syatibi, Beirut: Dar al-Ma'rifah, T.T.; dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* oleh Wahbah az-Zuhaili, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun dalam kehidupannya sehari-hari secara pribadi *Satria Effendi* dikenal oleh para koleganya sebagai pengikut mazhab *Syafi'i*, tetapi dalam analisisnya ia sangat dinamis memilih pendapat mazhab yang dinilainya paling kuat argumentasinya.²⁰ *Satria Effendi* hampir dalam setiap analisisnya berbicara tentang maqasidus syari'ah dan maslahat, dua topik penting dalam kajian ilmu usul fikih. Cara analisis seperti ini tentu saja sangat tepat, karena seorang mujtahid tidak dapat berijtihad tanpa memahami secara mendalam filsafat dan teori hukum Islam yang biasanya dikaji dalam kitab-kitab usul fikih. Kebanyakan ulama Indonesia ketika mempelajari hukum Islam, lebih mengedepankan aspek fikihnya daripada aspek usul fikihnya. Dengan kata lain, *Satria Effendi* sesungguhnya sedang mengeritik secara tidak langsung, cara mempelajari hukum Islam di Indonesia.²¹ Dalam menganalisis berbagai putusan hakim di pengadilan agama, *Satria* berusaha untuk secara konsisten menerapkan teori tujuan hukum dan konsep kemaslahatan tersebut. Dari lima unsur utama yang harus dijaga dalam maqasid al-syariah, kelihatannya beliau menerapkan prinsip menjaga keturunan dan harta sebagai inti dan sekaligus pisau analisisnya. Hal ini disebabkan, masalah yang dibahas didominasi oleh hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsiyah*), terutama perkawinan, waris dan wakaf. Ketika menganalisis masalah wali anak di bawah umur, *Satria* mengawali pembahasannya dengan mengemukakan, bahwa perkawinan disyariatkan dalam rangka menjaga dan melestarikan keturunan. Anak dalam

²⁰ M. Atho'Mudzharr, "Peranan Analisis Yurisprudensi...hlm. xxxix-xi.

²¹ Ibid. hlm. xiii-xiiii.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan Islam mempunyai nilai yang sangat strategis sebagai pelanjut dan penerus orang tuanya. Karena itu, orang tua atau pihak wali wajib untuk menjaga dan mengawasi anak yang belum dewasa. Meskipun hasil analisisnya tidak secara langsung didasarkan pada prinsip ” memelihara keturunan”, namun hal ini menunjukkan kegigihan beliau untuk menjadikan maqasid al-syariah sebagai dasar berpikir dan pengambilan keputusan hukum.²² Hanya saja, ketika membahas tentang hadanah anak yang diasuh oleh ibu non muslim, analisis berdasarkan prinsip “menjaga agama” tidak terlihat ke permukaan. Padahal, kasus tersebut sangat jelas berkaitan dengan nasib agama anak. Berdasarkan analisis inilah Pengadilan Agama Tebing Tinggi memutuskan: Bahwa hak pengasuhan anak tidak diberikan kepada ibunya yang beragama Kristen. Agaknya, kalau digunakan teori Al-Syatibi tentang skala prioritas dalam *al-kulliyat al-khams*, mestinya dengan mudah dapat dipahami bahwa kepentingan menjaga agama harus didahulukan daripada menjaga keturunan.²³ Selain itu, analisis terhadap kasus akad nikah melalui telepon, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengesahkan praktik nikah tersebut, kesimpulan Satria Effendi, jika menggunakan paham ulama *Hanafiyyah*, keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat dipahami keabsahannya. Akan tetapi, bila dilihat dari kacamata pendapat *Syafi’iyah*

²² Satria Effendi M.Zein. 1991. “*Maqashid al-Syari’at dan Perubahan Sosial*” dalam Dialog. Badan Litbang Depag RI No.33 tahun XV, hlm. 29

²³ Fathurrahman Djamil. 2004. “*Karakteristik Pemikiran Fiqh Prof.Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA*” (Epilog) dalam Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, hlm. 530.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah melalui telepon itu tidak sah. Selama belum ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut, dua-duanya dapat dipakai.²⁴

Di samping itu, analisis terhadap kasus wasiat kepada ahli waris, Pengandilan Tinggi Agama (PTA) Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, menimbang bahwa wasiat merupakan kehendak terakhir dari pemberi wasiat terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Kehendak terakhir tersebut haruslah dihormati, meskipun bertentangan hukum kewarisan dan agama Islam. Kesimpulan penulis dengan mengatakan bahwa pertimbangan hukum PTA Banjarmasin tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam. Dengan demikian tindakan almarhum yang telah mewasiatkan seluruh hartanya kepada sebagian ahli warisnya tanpa persetujuan ahli waris yang lain dianggap tidak sah menurut fikih. Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dianggap batal.²⁵

Dalam analisis terhadap perbedaan mazhab dalam kasus kewarisan. Kasus ini terjadi ketika ahli waris terdiri dari anak perempuan bersama saudara kandung. Menurut mayoritas ulama dan *Mu'az bin Jabal*, hanya anak laki-laki yang dapat menghalangi saudara kandung. Sedangkan pendapat *Zahiri* dan *Ibnu Abbas*, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dapat menghalangi saudara kandung. PA dan PTA Mataram memutuskan perkara tersebut sejalan dengan mayoritas ulama dan *Mu'az bin Jabal*. Sementara MA memutus perkara tersebut sejalan dengan pendapat *Zahiri dan Ibnu*

²⁴ Hasanuddin AF. 2004. " *Kerangka Metodologis* Buku Karya Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein, MA" (Epilog) dalam Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kerja sama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, hlm. 520.

²⁵ *ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abbas. Menurut Satria Effendi, jika belum ada undang-undang yang mengatur dan tidak pula ada kesepakatan untuk memilih mazhab mana yang akan diberlakukan di pengadilan, hakim dapat memilih pertimbangan lain yang sejalan dengan tujuan syari'at. Dalam hal ini, baik Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram maupun Mahkamah Agung (MA), masing-masing tidak menemukan alasan pertimbangan, mengapa mengambil mazhab tertentu dengan mengenyampingkan mazhab lainnya, karena itu, putusan MA tidak cukup kuat untuk membatalkan putusan PTA Mataram.²⁶ Terhadap kasus wakaf ahli dan wakaf khairi, sengketa tentang status wakaf, apakah wakaf khusus atau wakaf umum. Pengguna mengklaim wakaf umum, sementara tergugat wakaf khusus. Kedua belah pihak tidak dapat menunjukkan bukti autentik. PA Bukittinggi memenangkan penggugat, PTA Bukittinggi, membatalkan PA Bukittinggi (memenangkan tergugat). Sedangkan MA, menguatkan putusan PA Bukittinggi dan membatalkan putusan PTA Bukittinggi. Dalam kaitan ini, menurut pendapat *Satria Effendi*, telah sekian lama tanah wakaf tersebut dikelola oleh ayah tergugat lalu turun dikelola oleh pihak tergugat sebagai wakaf khusus dan tidak ada satu pihak pun yang mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan wakaf umum.²⁷

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian di atas, bahwa *Satria Effendi* dalam berbagai analisisnya terhadap berbagai masalah hukum Islam secara konsisten mempergunakan teori *maqasid al-syari'ah* dan *maslahat*.²⁸

²⁶ *Ibid.* hlm. 520-521.

²⁷ *Ibid.* hlm. 521.

²⁸ Dalam kajian hukum Islam, *maqasid al-syari'ah* yaitu tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam sangat penting. Karena begitu pentingnya *maqasid al-syari'ah* tersebut, para ahli

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori hukum *menjadikan maqasid al-syari'ah* sebagai salah satu kriteria (di samping kriteria lainnya) bagi *muftahid* yang melakukan *ijtihad*. Adapun inti dari *konsep maqasid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasid al-syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*. Untuk memahami hakikat dan peranan *maqasid al-syari'ah*, berikut diuraikan secara ringkas teori tersebut. *Imam al-Haramain al-Juwaini* dapat dikatakan sebagai ahli teori (*ulama ushul al-fiqh*) pertama yang menekankan pentingnya *memahami maqasid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan, bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya, baca *Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H, I: 295. Kemudian *al-Juwaini* mengelaborasi lebih jauh *maqasid al-syari'ah* itu dalam hubungannya dengan illat, asl dapat dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: *asl yang masuk kategori daruriyat (primer), al-hajat al-ammah (sekunder), makramat (tersier)*, sesuatu yang tidak masuk kelompok *daruriyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya. Dengan demikian pada prinsipnya *al-Juwaini* membagi asl atau tujuan *tasyri'* itu menjadi tiga macam, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat* dan *makramat (tahsiniah)*. Pemikiran *al-Juwaini* tersebut dikembangkan oleh muridnya, *al-Gazali*. Al-Gazali menjelaskan *maksud syari'at* dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat almaslahiyat* dalam *qiyas*, al-Gazali, *Syifa' al-Galil fi Bayan al-Syibh wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*, Baghdad: Matba'ah al-Irsyad, 1971, hlm. 159, sedangkan dalam pembahasannya yang lain, ia menerangkannya dalam tema istilah, Al-Gazali, *al-Mustasfa*, hlm. 250 dan seterusnya. Maslahat menurut al-Gazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima macam maslahat di atas bagi al-Gazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier, Ibid, hlm. 251. Dari keterangan ini jelaslah bahwa teori *maqasid al-syari'ah* sudah mulai tampak bentuknya. Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqasid al-syari'ah* adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari kalangan *Syafi'iyah*. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep *maslahat* secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat, Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih alAnam*, Kairo: al-Istiqamat, t.t, I: 9. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: *daruriyat*, *hajiyyat* dan *takmilat* atau *tatimmat*. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ibid, II: 60 dan 62.....Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep *maslahat* yang merupakan inti pembahasan dari *maqasid al-syari'ah*. Pembahasan tentang *maqasid al-syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan *Malikiyah*. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai *maqasid al-syari'ah*. Sudah tentu, pembahasan tentang *maslahat* pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah manusialah yang lebih mengetahui kemaslahatannya. Karenanya mereka harus berpegang pada *maslahat* ketika kemaslahatan itu bertentangan dengan *nas* dan *ijma'*. *Maslahat* merupakan *dalil syara'* paling kuat. Oleh karena itu, *at-Tufi* juga menyatakan apabila *nas* dan *ijma'* bertentangan dengan *maslahat*, didahulukan *maslahat* dengan cara pengkhususan (*takhsis*) dan perincian (*bayan*) *nas* tersebut. Dalam pandangan *at-Tufi*, secara mutlak *maslahat* itu merupakan *dalil syara'* yang terkuat itu bukan hanya merupakan *dalil* ketika tidak adanya *nas* dan *ijma'*, juga hendaklah lebih diutamakan atas *nas* dan *ijma'* ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan *maslahat* atas *nas* dan *ijma'* tersebut dilakukan *at-Tufi* dengan cara *bayan* dan *takhsis*, bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan *nas* sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunah atas Al-Qur'an dengan cara *bayan*. Hal demikian dilakukan *at-Tufi* karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dua konsep penting dalam ilmu usul fikih. Teori maqasid al-syari'ah dan maslahat yang beliau terapkan adalah teori *al-Syatibi*²⁹. Sejalan dengan itu, *al-Syatibi* juga membangun *model al-istiqra' al-ma'nawi* yang diperkuat dengan model *tawatur lafzi* dan *tawatur ma'nawi* atau disebut juga dengan

dalam pandangannya, maslahat itu bersumber dari sabda Nabi saw., "tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan". Pengutamaan dan mendahulukan maslahat atas nas ini ditempuh baik nas itu *qat'i* dalam *sanad* dan *matan*-nya atau *zhanni* keduanya.

²⁹ *Al-Syatibi* memaparkan tiga aliran yang diikuti ulama usul fikih dalam usaha menyingkap *maqasid al-syari'ah*. Aliran-aliran yang dimaksud adalah: *Pertama*, aliran zahiriyyah (literalis/ tekstualis, yaitu ulama yang mengikuti aliran ini berpendapat bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir nas yang jelas (eksplisit). Petunjuk itu tidak perlu diteliti lagi, harus dipahami sebagaimana adanya seperti yang tertulis dalam nas (manurut bahasa). Apakah *taklif* (tugas diberikan Tuhan kepada manusia) memperhatikan maslahat manusia itu sendiri, ataupun tidak, walaupun kemaslahatan itu telah terwujud pada sebagian orang, namun itu semua tidak perlu diperhatikan. Yang jelas kemaslahatan itu tidak dapat diketahui sedikitpun tanpa melihat nas dalam bentuk tekstual. Pendapat ekstrim dari ulama yang menganut aliran ini menolak nalar dan qiyas; kedua, Ulama yang tidak menempuh pendekatan melalui zahirnya nas dalam memahami maksud al-Quran dan Sunnah. Kelompok ini terbagi pula ke dalam dua aliran, yaitu (1) Aliran batiniyyah, adalah ulama yang mengikuti aliran ini berpendapat bahwa *maqasid al-syari'ah* bukan terletak pada bentuk zahirnya nas, tidak pula dipahami dari nas yang jelas. Namun, *maqasid syari'ah* merupakan sesuatu yang tersembunyi di balik itu semua (di dalam batin). Hal seperti ini terdapat pada semua aspek syari'ah. Tidak seorangpun yang berpegang pada makna lahir dari suatu lafaz dapat mengetahui maksud syari'ah. Aliran ini merupakan aliran yang berpretensi membatalkan syari'at Islam dan dapat membawa kepada kekafiran. Aliran ini berpendapat bahwa imam mereka terpelihara dari dosa. Pendapat seperti ini tidak mungkin dipahami, kecuali dengan merusak makna lahir nas al-Quran dan al-Sunnah yang sudah jelas, (2) Aliran substansialis (al-Muta'ammiqin fi al-qiyas), adalah ulama yang berpendapat bahwa *maqasid syari'ah* dapat diketahui dengan memperhatikan makna-makna substansi (al-ma'ani al-nazariyyah) yang terdapat dalam lafaz. Arti zahir dari suatu nas bertentangan dengan makna substansi, yang diperhatikan adalah makna substansi dan arti zahir nas ditinggalkan. Hal itu dilakukan baik dengan memperhatikan kemaslahatan maupun tidak. Yang penting makna substansi itu harus diteliti dengan baik sehingga nas-nas syari'ah mesti mengikuti makna substansinya; Ketiga, Aliran ulama al-Rasikhin, yaitu ulama yang menggunakan penggabungan dua pendekatan antara arti zahir nas dengan makna substansi/illatnya. Makna substansi tidak boleh merusak makna zahir suatu nas, demikian pula sebaliknya, sehingga syari'at Islam berjalan secara harmonis tanpa ada kontradiksi di dalamnya. Dalam konteks ini, aliran zahiriyyah, aliran batiniyyah, aliran substansialis semuanya ditolak Syatibi dan menurutnya sebagai aliran sesat lagi menyesatkan (*ra'yu kulli qasidin li ibta al-syari'ah, wa ma'a haza al-rakhi ila al-kufr, wa iyazubillahi*). Aliran yang diikuti oleh Syatibi adalah aliran ketiga (ulama rasikhin) yang dapat dijadikan rujukan dalam mengetahui maksud-maksud yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Hal ini diketahui dari ungkapan Syatibi sendiri "*fa 'alaih al-i'timad fi al-dabit allazi bihi yu'rafu maqsidal-syari'*", baca al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah, T.T.) II: 391-393.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*inductive corroboration*³⁰. Tentu saja, teori dan metode tersebut di atas serta aplikasinya dapat dipahami sebagai upaya menterjemahkan wahyu Allah (yang berupa teks) sesuai dengan tuntutan masyarakat, tempat, dan waktu. Dalam kaitan ini, dialektika teks dengan konteks merupakan satu keniscayaan. Dengan kata lain, salah satu ciri pokok dari kajian usul fikih adalah sebuah pemahaman yang beritik-tolak dan berangkat dari teks wahyu.³¹ Hingga di sini dapat dipahami betapa pentingnya dialektika antara teks dengan konteks. Persoalan yang kemudian muncul adalah, bagaimana mekanisme dari metode dan teori tersebut dalam menjawab persoalan umat. Dengan kata lain, bagaimana proses dan mekanisme sebuah ijtihad. Untuk menjawab persoalan ini, ada baiknya kita melihat model yang ditawarkan oleh *Syatibi* tersebut, paling tidak karena tiga alasan.

Pertama, sudah banyak karya-karya Indonesia tentang *Syatibi*, namun karya tersebut cenderung menonjolkan konsep masalah dan *maqasid al-syari'ah* tanpa penjelasan memadai bagaimana proses ijtihad hukum yang memenuhi dua konsep tersebut.

³⁰ Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, juga al-I'tisam. Kairo: Maktabah alTijariyah, T.T.), Muhammad Khalid Mas'ud. 1977. Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought. Islamabad: Islamic Research Institute, dan Shatibi's Theory of Meaning". 1993. Islamic Studies 32, hlm. 1-16. Wael B. Hallaq. 1991. "The Primacy or the Qur'an in Shatibi's Legal Theory", dalam Islamic Studies Presented to Charles J. Adams, ed Donald P. Little Wael B. Hallaq. Leiden: E.J., hlm. 69-90, dan "On Inductive Corroboration, Probability and Certainty in Sunni Legal Thought". 1990. dalam Islamic Law and Jurisprudence: Studies in Honor of Farhat J. Ziadeh, ed. Nicholas Heer. Seattle: University of Washington, hlm. 24-31, dan A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul al-Fiqh. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, hlm. 162-206; baca juga Al-Raisuni. 1992. Nazariyât al-Maqasid 'inda Al-Imam Syatibi. Riyadh: al-Dar al-'Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, hlm. 143

³¹ Akh. Minhaji. 2004. "Persoalan Gender dalam Perspektif Metodologi Studi Hukum Islam", dalam Ema Marhumah dan Lathiful Khuluq, Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesenjangan Gender dalam Islam. Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar. hlm. 204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, semakin tertariknya pemikir kontemporer terhadap *Syatibi*.

Dikatakan, misalnya bahwa “ *Shatibi’s induction...has made it attractive to a group of modern thinkers whose primary occupations is to free the Muslim mind from the fetters created by the immediate, and perhaps shacling, meanings of the several texts.*”³²

Ketiga, adalah untuk memberikan gambaran bahwa karya-karya klasik (*kitab kuning*) tersebut merupakan warisan berharga yang juga berguna untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer.³³

Pada dasarnya, pemikiran *Syatibi* yang dijadikan dasar pijak metodologi *Satria Effendi* tersebut, sejalan dengan model kombinasi *normatif-deduktif* dan *empiris induktif*, dan model tersebut telah menjadi ciri kajian usul fikih.³⁴ Secara normatif-deduktif, *Syatibi* menempatkan al-Quran sebagai sumber dari segala sumber ajaran Islam yang harus menjadi titik berangkat umat dalam menghadapi persoalan. Sumber lain, termasuk Sunnah Nabi merupakan sumber penjelas terhadap hal-hal yang terdapat di dalam alQuran. Konsekuensinya, jika terjadi pertentangan antara al-Quran dengan yang lainnya(misalnya Sunnah Nabi), yang harus dimenangkan adalah al-Quran. Dengan demikian, tidak mungkin terjadi nasikh-mansukh antara al-Quran dengan al-Sunnah. *Syatibi* juga menjelaskan bahwa persoalan waktu menjadi penting dalam proses turunnya wahyu. Menurut *Syatibi*, teks-teks yang datang lebih dahulu pada dasarnya lebih umum dan lebih bersifat

³²Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theory...* hlm.206.

³³Akh. Minhaji, “ *Persoalan Gender....*” hlm. 205-206

³⁴Untuk kedua model logika tersebut baca Akh. Minhaji. 1999. “ *Reorientasi Kajian Ushul Fiqh*”, al-Jami’ah 63. hlm. 12-28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fundamental ketimbang yang datang kemudian. Karena itu, ayat-ayat Makkiyah pada dasarnya lebih umum dan fundamental dibandingkan dengan ayat-ayat Madaniyah. Jika ada ayat Madaniyah yang dipandang bersifat umum dan fundamental, sebenarnya ayat tersebut merupakan ayat detail dari ayat Makkiyah yang lebih bersifat umum dan fundamental. Di sini, pemikiran Syatibi bertemu dengan tawaran Thoha Muhammed Thoha yang kemudian dikembangkan oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im.³⁵

Tetapi, prinsip pemahaman al-Qur'an seperti tersebut di atas bukan hal yang mudah, bahkan masih membutuhkan proses dan mekanisme-mekanisme lebih lanjut, yang selanjutnya hal ini dapat digolongkan pada model empiris-induktif. Menurut Syatibi, untuk memahami teks al-Qur'an (dan juga al-Sunnah diperlukan bekal bahasa Arab, terutama yang berkembang pada masa

³⁵ Akh. Minhaji, " *Persoalan Gender*...." hlm. 207. Di samping dua tokoh ini, pada masa modern juga mengenal sejumlah tokoh yang menawarkan model-model kajian menarik dalam bidang usul fikih, seperti Fazlur Rahman, misalnya, menawarkan konsep double movement, baca Earle H. Waugh dan Frederick M. Denny. 1998. (ed.) *The Shaping of an American Islamic Discourse: A Memorial to Fazlur Rahman*. Atlanta: Scholar Press. Sedangkan karya-karyanya antara lain Fazlur Rahman. 1984. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press; idem. 1965, *Islamic Methodology in History*. Karachi: Centarl Institute of Islamic Research; idem. 1970. "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternative", *International Journal of Middle East Studies*, hlm. 317-32; idem 1970. "Revival and Reform in Islam", dalam *The Cambridge History of Islam*, ed. P.M. Holt, ann K.S. Lambton, and Bernard Lewis, jilid 2 B. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 632-56; idem. 1980. *A Survey of Modernization of Muslim Family Law*", *International Journal of Middle East Studies* 11 (1980), hlm. 449-65; idem 1982, "The Status of Women in Islam", dalam *Separate Worlds: Studies of Purdah in South Asia*, ed. Hanna Papnek dan Gail Minault. Delhi: Kay Kay Printers, hlm. 285-311; idem. 1976. "Some Issues in the Ayyub Khan Era", *Essays on Islamic Civilization: Presented to Niyazi Berkes*, ed. Doland P. Little. Leiden: E.J. Brill; idem. 1979. "Towards Reformulating the Methodology of Islamic Law: Sheikh Yamani on Public Interest in Islamic Law". *New York University Journal of International Law and Politics* 12, hlm. 221-4. Mahmud Syaltout dengan model muqaranah al-mazahib, Yusuf al-Qardlawi dengan pendekatan *ijtihad intifa'i* dan *insya'i*, Ali Syari'ati dengan *teks dan konteksnya*. Sejalan dengan itu semua, Hasan Hanafi menawarkan pemikiran tradisi dan pembaharuannya (*al-turas wa tajdid*), Nasr Hamid Abu Zayd dengan teori *ta'wil* dan *talwin*, Mohammed Arkoun dengan cara *logosentrisme* melalui tiga ilmu penting: *linguistic*, *sejarah*, dan *antropolgi*, al-Jabiri dengan *model bayani, burhani, dan irfani* dan Muhammad Syahrur dengan *teori hududnya*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi. Peran asbab al-nuzul juga cukup penting dalam upaya memahami teks-teks agama tersebut. Bekal bahasa dan pemahaman *asbab al-nuzul* ini bukan hanya terpaku pada masa Nabi tetapi juga sebagai upaya menterjemahkan hal-hal yang terdapat dalam al-Qur'an dalam konteks kontemporer sesuai dengan tuntutan umat. Karena itu, peran pengembangan pemikiran hukum menjadi menjadi amat penting dalam proses ini.

Proses tersebut di atas perlu pula didukung oleh pendekatan *al-istiqlal al-ma'nawi* dan juga *tawatur lafzi* sekaligus *tawatur ma'nawi* atau secara umum dapat disebut sebagai model *inductive corroboration*. Melalui model ini, dalam proses *ijtihad* guna menjawab persoalan umat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah; kedua, menelusuri ayat-ayat yang terkait dengan persoalan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Pada masa sekarang ini, model ini dikenal dengan kajian tematik. Pada waktu yang sama, juga perlu ditelusuri hadis-hadis Nabi yang terkait dengan persoalan yang sedang dibahas, dan model *tawatur lafzi* dan *tawatur ma'nawi* cukup berperan dalam upaya menetapkan otentisitas sebuah hadis dan juga dalam rangka menuju peringkat yakin.

Perlu dicatat, kesimpulan apa pun yang diperoleh dari sebuah *ijtihad*, model falsifikasi harus selalu mendapat perhatian, ” *Whatever the level of corroboration may be, there will always exist the possibility of falsifying the conclusion because of counter evidence.*³⁶ Seperti telah disebut sebelumnya, sebagai ukuran dan timbangan umum dari segala proses *ijtihad* di atas,

³⁶ Hallaq, ” Inductive Corroboration”, hlm. 5-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut *Syatibi* (juga *Satria Effendi*), adalah tujuan hukum itu sendiri (*maqasid al-syari'ah*), yang dalam bahasa *Fazlur Rahman* disebut dengan terminologi ideal moral yang bertumpu pada prinsip keadilan. Dengan demikian, yang perlu selalu ditegakkan di tengah-tengah masyarakat bukanlah hukum tetapi *masalah* sebagai wujud konkret dari *maqasid al-syari'ah* atau moral itu sendiri. Hukum dapat berubah dan harus diubah jika tidak lagi mampu menopang terealisasinya masalah dan moral dalam kehidupan.³⁷ Upaya untuk menilai karakteristik dan corak pemikiran *Satria Effendi* tentang hukum Islam dan sekaligus metodologinya, memang tidak mudah, karena di samping tulisan beliau yang masih berserakan, juga tidak adanya buku yang khusus mengkompilasi *fatwa* dan pendapat hukum beliau, kecuali buku *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* sekadar membantu membuat *mapping* atau pemetaan terhadap karya yang sangat berharga dari seorang tokoh dan ahli hukum Islam ini. Namun demikian, justru yang harus dijadikan sebagai pertimbangan bagi para ahli hukum Islam di Indonesia adalah konsistensi beliau untuk melihat berbagai masalah dengan sudut pandang tujuan hukum. Bagi para ahli hukum tentu tidak terlalu asing dengan model penafsiran teleologis, yang memfokuskan pengkajian teks peraturan dengan memperhatikan apa yang ada di balik teks, konteks. Adanya kontekstualisasi ajaran dasar Islam yang telah digagas oleh *Satria Effendi*, meskipun baru langkah awal, merupakan gagasan yang perlu

³⁷ Sobhi Mahmasani. 1961. *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ilm lil-Malayin, hlm. 198-202; Nadiyah Syarif al-Umari. 1981. *al-Ijtihad fi al-Islam Usuluhu Ahkamuhu, Afaquhu*. Beirut: Mu'assasat al-Risalat, hlm. 246-52; Jalaluddin al-Suyuti. t.t. *al-Asybah wa Naza-ir fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Kairo: Isa al-Babi al-Halabi; Muhammad ibn Ahmad al Sarakhsi. 1906-1912. *al-Mabsut*. Kairo: Mathba'at al-Sa'adah, terutama vol.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan perhatian kita bersama. Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa penggunaan dan mengkombinasikan kedua model pendekatan tersebut normatif-deduktif dengan empiris-induktif merupakan suatu keniscayaan bagi para pengkaji hukum Islam guna mendapatkan hasil ijtihad hukum yang maksimal.³⁸ Dengan demikian mereka mampu merealisasikan pesan-pesan ilahiyah sekaligus memenuhi tuntutan umat sesuai dengan tempat dan masa. Kombinasi normatif-deduktif dengan empiris-induktif merupakan model pendekatan yang perlu dikembangkan dalam kajian usul fikih masa kini dan juga masa yang akan datang.³⁹

B. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Pendekatan merupakan acuan, pola dan kerangka yang mengandung kriteria atau norma. Vernon Van Dyke dalam *Political Science: A Philosophical Analysis* sebagaimana dikutip Sapriya menegaskan bahwa :An

³⁸ Untuk senantiasa sadar bahwa wahyu Allah yang transendental itu harus dipahami sesuai dengan tujuan Allah menetapkan aturan-aruran-Nya. Sebab, memahami tujuan hukum sama pentingnya dengan memahami kasus yang akan diselesaikan hukumnya, baca Ahmad Syafii Maarif. 1995. Pengantar *buku Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah* tulisan Fathurrahman Djamil. Jakarta: Logos, hlm. xiv-xv.

³⁹ Diskursus pemikiran hukum Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah memunculkan dua cara berpikir yang antagonistik. Di satu sisi ada pihak dengan dalih pemikiran hukum yang ada selama ini tidak mampu menjawab persoalan umat, karena itu perlu mengembangkan pemikiran hukum Islam yang liberal, baca Tim Penulis Paramadina. 2004. *FiqhLintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation. Akan tetapi pemikiran liberal ini seringkali cenderung sporadis dan tidak jarang menimbulkan kekhawatiran berbagai kalangan akan tergelincir dari standar-standar dasar agama. Sedangkan di sisi lain, muncul pula pemikiran hukum Islam yang *konservatif tekstual* dan terlalu berorientasi pada masa lalu serta tidak responsif terhadap persoalan-persoalan kekinian umat, baca Agus Hasan Bashori. 2004. Koreksi Total Buku *Fikih Lintas Agama Membongkar Kepalsuan Paham Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. Dalam konteks dua arus pemikiran ini, kombinasi dan integrasi normatif-deduktif dengan *empiris-induktif* merupakan model pendekatan *alternatif* yang perlu dikembangkan dalam kajian *usul fikih* masa kini dan juga masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

approach consists of criteria of selection-criteria employed in selecting the problems or questions to consider and in selecting the data to bring to bear , it consists of standards governing the inclusion of questions and data .

Berdasarkan pandangan tersebut, peneliti dalam pelaksanaan penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative approach) sebagai acuan, pola dan kerangka yang berangkat dari generalizes empiric atau generalisasi empirik atas realitas-realitas sosial, politik dan budaya yang tumbuh dan berkembang. Realitas sosial tersebut dideskripsikan dan dianalisis secara komprehensif dan komparatif. Aspek yang bersifat fenomenal dan historis juga dideskripsikan dan ditelaah secara kritis sehingga melahirkan suatu generalisasi yang bersifat ideografis. Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Mungin , menegaskan bahwa pendekatan kualitatif dalam penelitian adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Sejalan dengan pendapat di atas, Denzin dan Lincoln dalam Sapriya menyatakan bahwa :

Qualitative research is multimethods in fokus, involving an interpretative, naturalistic approach to its subjects matter this mean that qualitative researchers study things it their natural setting, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of meanings bring to them.

Qualitative research involves the studied use and collection of variety of empirical materials –case study, personal experience, inrospeptive, life story,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interview, observational, historical, interactional, and visual texts- that describe routine and problematic moments and meaning in individuals live”.

Selanjutnya John Creswell dalam bukunya *Qualitative Inquiry and Research: Chosing Among Five Traditions* dalam Sapriya mengemukakan: *Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a sosial or human problem.*

The researcher builds a complex, holistic picture, analysis words, report detailed views of informant and conducts the study in a natural setting”

.sedangkan Lincoln dan Guba dalam Sapriya berpandangan bahwa pendekatan kualitatif menjadi hal yang utama dalam paradigma naturalistik bukan karena paradigma ini anti kuantitatif melainkan karena pendekatan kualitatif lebih menghendaki manusia sebagai instrumen. Dalam bahasa lain Lincoln dan Guba menyatakan bahwa ... *the human as instrument is inclined toward methods that are exstensions of normal human activities looking, listening, speaking, reading and the like”.*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif dalam penelitian langsung menunjukkan setting dan individu-individu dalam setting itu secara keseluruhan. Subjek dalam penelitian kualitatif dapat berupa organisasi, lembaga, atau individu yang tidak dipersempit menjadi suatu variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, tetapi hal itu dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan (*holistik*).

Karena itu subyek dalam penelitian ini adalah individu yang menjadi aktor utama dalam dinamika perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini adalah terkait dengan perjalanan hidup *Satria Effendi M.Zein* sebagai intelektual Islam Indonesia yang memperkenalkan teori maqasid syariah terutama dalam hubungannya dengan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Langkah beliau tersebut yang dalam kapasitas dan posisinya sebagai warga negara yang sangat peduli dengan persoalan kekeluargaan dan kemasyarakatan melakukan interaksi dan pergumulan intelektualnya dalam menerjemahkan, menafsirkan, mengkontektualisasi dan mengaktualisasikan norma dan ajaran Islam dengan realitas kehidupan modern di Indonesia. Oleh karena itu melalui pendekatan kualitatif dalam penelitian disertasi ini, dapat dikenali lebih jauh dan secara mendalam mengenai perjalanan seorang tokoh baik secara pribadi dan dapat melihat bagaimana tokoh tersebut mengembangkan definisinya sendiri tentang dunia dengan berbagai pemikiran, karya dan perilaku yang dijalaninya

Selanjutnya melalui pendekatan kualitatif, dapat pula ditemukan apa yang dirasakan, dipikirkan, dan diucapkan sang tokoh dalam interaksinya dengan lingkungan sosial atau komunitasnya, serta dapat mempelajari kelompok-kelompok atau komunitas tertentu yang mungkin menjadi pengikut tokoh yang sebelumnya tidak diketahui dan dipikirkan.

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian disertasi ini untuk mendeskripsikan pemikiran hukum keluarga Islam *Satria Effendi M.Zein*, mempetakan dan menganalisis gerakan pembaruan hukum Islam yang diimplementasikannya serta mendeskripsikan dan menelaah kondisi sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat atau kenyataan empirik yang melingkari perjalanan kehidupan tokoh bangsa ini untuk melahirkan kesimpulan yang bersifat ideografis atau sifat keberlakuannya secara khusus pada latar belakang penelitian yang dilakukan. Dilihat dari kandungan yang menyertai pada diri subyek yang dikaji, penelitian terhadap tokoh ini termasuk dalam kategori penelitian sejarah yang merupakan salah satu jenis dari aktivitas dunia penelitian. Sejarah dalam pengertian umum adalah peristiwa masa lampau umat manusia. Sejarah adalah cerita perubahan-perubahan, peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lampau yang telah diberi tafsir atau alasan dan dikaitkan sehingga membentuk suatu pengertian lengkap. Sejarah sebagai cerita ilmiah harus disusun dengan menggunakan persyaratan ilmiah.

Penelitian sejarah (*historical reseach*) menurut Harahap , Nazir dan Bakker dapat dibagi ke dalam empat domain, yakni penelitian komparatif, penelitian yuridis atau legal, penelitian biografis, dan penelitian bibliografis. Dari keempat ranah penelitian tersebut, penelitian disertasi ini memilih menggunakan jenis penelitian biografis dan bibliografis sebagai bagian dari penelitian sejarah (*history research*). Penelitian biografis sebagai bagian penelitian sejarah yaitu penelitian terhadap kehidupan seorang tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak pengaruh pemikiran dan idenya, dan pembentukan watak tokoh tersebut selama hayatnya.

Sedangkan penelitian bibliografis yang sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, penelitian dokumen atau penelitian literatur merupakan penelitian yang menjadikan bahan pustaka, dokumen dan literatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai objek kajian dan menjadikan dokumen sebagai sumber utama data penelitian. Dokumen sebagai sumber data dan informasi yang dapat disitir untuk keperluan penelitian menurut Wang dan Soergel sebagaimana dikutip oleh Satori, harus memenuhi kriteria *epistemic values* (suatu dokumen yang keberadaannya sangat berguna bagi pemenuhan kebutuhan akan pengetahuan atau informasi yang belum diketahui), *functional values* (suatu dokumen keberadaannya sangat berguna karena memberi kontribusi pada penelitian yang dilaksanakan), *conditional values* (suatu dokumen keberadaannya sangat berguna apabila muncul beberapa kondisi atau syarat terpenuhi atau terdapat dokumen lain yang bisa memperkuat isi dokumen tersebut), dan *social values* (suatu dokumen keberadaannya sangat berguna dalam hubungannya dengan kelompok atau individu).

Selanjutnya dalam penelitian disertasi ini, peneliti menggunakan metode studi tokoh kritis yang merupakan salah satu dari jenis penelitian kualitatif. Dalam studi tokoh kritis, metode yang digunakan untuk meneliti subyek penelitian akan mempengaruhi cara memandang subyek tersebut. Jika subyek yang dipandang berdasarkan angka atau kriteria tertentu, berpotensi untuk menghilangkan sifat subjektif perilaku manusiawi tokoh. Dengan demikian, studi tokoh kritis terletak pada kapasitas peneliti untuk menginterpretasikan dan menganalisis perjalanan seorang tokoh secara kritis. Studi tokoh dalam penelitian disertasi ini menggunakan pola kerja penelitian sejarah intelektual (*intellectual history*) yang merupakan bagian dari penelitian sejarah dengan menggunakan metode studi tokoh. Dengan

demikian dapat ditegaskan bahwa salah satu jenis penelitian sejarah yang menggunakan metode studi tokoh adalah sejarah intelektual atau sejarah pemikiran atau sejarah sosial intelektual.

Kata intelektual memiliki keragaman pengertian. Kata intelektual dalam kosa kata Indonesia diistilahkan dengan cendekiwan. Dalam bahasa Arab kata cendekiwan diartikan sebagai *Ulil al-Bab* yang secara harfiah diartikan orang yang memiliki pemikiran dan hati nurani yang jernih serta menggunakannya untuk memahami berbagai gejala alam dan fenomena sosial serta mengkonstruksinya menjadi sebuah ilmu pengetahuan dan menggunakannya untuk memahami kekuasaan Tuhan serta mengabdikannya bagi kepentingan masyarakat.

Federspiel, mengartikan intelektual sebagai individu-individu atau kelompok kecil masyarakat yang merumuskan generalisasi dan konsep-konsep tentang nilai-nilai atau petunjuk-petunjuk yang mendasari usaha dari suatu perkumpulan, masyarakat, bangsa dan kemanusiaan secara umum. Sementara itu Edward Shils dalam Federspiel mendefinisikan intelektual sebagai pribadi-pribadi yang menggunakan komunikasi dan ekspresinya dengan simbol-simbol dari bidang umum dan berkenaan dengan teori yang berhubungan dengan manusia, masyarakat dan alam kosmos. Rahardjo mendefinisikan intelektual sebagai orang terpelajar yang perannya tidak mesti berkaitan dengan ilmu yang digelutinya atau profesi yang dikuasai. Mereka berperan sebagai kritikus sosial, bersikap emansipatoris atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

liberatif berpola pikir yang hermenetis dan sering bersikap politis –tapi bukan politikus- atau bahkan seringkali bukan.

Bagi Rahardjo kata intelektual sepadan maknanya dengan cendekiawan walaupun kata cendekiawan bermakna mengarah kepada orang yang berpendidikan tetapi secara implisit bisa ditangkap bahwa makna cendekiawan itu bisa saja bukan seorang sarjana . Esensi cendekiawan bukanlah terletak pada apakah seseorang itu memiliki ilmu atau tidak, tetapi pada komitmennya pada masalah-masalah kemasyarakatan dan realisasinya dalam kehidupan masyarakat yang dibuktikan dengan tindakan-tindakan konkrit . Selanjutnya Abdullah mendefinisikan intelektual Islam adalah mereka yang mendapatkan pendidikan pendidikan keagamaan dan umum yang hampir berimbang. Mereka sesungguhnya telah mempersoalkan apakah masing-masing itu bukanlah sesuatu yang semestinya masih harus “bergerak” dan “mengalir”

Intelektual muslim menurut Bruinessen adalah *academics who often specialize in non Islamic subject but have profound knowledge of and strong commitment to Islam*. Intelektual muslim juga berarti orang yang memiliki spesialisasi, khususnya di bidang Islam dan mempunyai pengetahuan mendalam di bidang ilmu-ilmu kemanausiaa yang disertai dengan komitmen yang kuat kepada Islam. Dalam pada itu intelektual muslim dipandang sebagai orang yang memiliki perilaku cendekia –kemampuan menatap, menafsirkan dan merespons lingkungan hidupnya dengan kritis, kreatif, objektif, analitis dan bertanggung jawab-, beriman dan senantiasa committed

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada *din al-Islam* sebagaipandangan hidupnya. Sedanagkan Azra mendefinisikan intelektual muslim adalah lapisan muslim terdidik yang mempunyai peran khusus dalam mengembangkan nilai-nilai budaya. Karenanya mereka dapat memegang kepemimpinan dalam masyarakat. Namun tidak semua muslim terdidik dapat menjadi intelektual muslim, sebagian mereka hanya menjadi intelegensia karena mereka sangat terikat dengan profesinya sehingga pengetahuan dan pemikirannya bersifat lebih teknis, tidak menjangkau hal-hal di luar profesinya. Ketika mereka keluar dari “kungkungan” sempit seperti itu, dan menunjukkan intelektual dan concern yang lebih luas pada saat itulah mereka dapat disebut sebagai “intelektual” atau “cendekiawan muslim”

Istilah “sejarah intelektual” telah mempunyai kedudukan yang cukup baik di Amerika Serikat meskipun *Guide to Historical Literature*, terbitan *American Historical Association* tidak sering memakai istilah ini melainkan lebih suka memakai “sejarah kebudayaan” (*cultural history*) atau “ide-ide sosial” (*social ideas*). Namun, di dunia Barat istilah yang biasanya dipakai adalah istilah-istilah lain, seperti sejarah ide-ide, *Geistesgechte ideengeschichte* *histoire delapansee*, dan masih banyak lagi istilah-istilah yang lain. Dalam arti yang seluas, sejarah intelektual mempunyai pokok masalah-data apa saja yang ditinggalkan oleh aktivitas pikiran-pikiran manusia. Sejarah intelektual disebut juga sejarah pemikiran yang dalam literatur Inggris ditemukan istilah : *history of thought*, *history of ideas*, *intellectual history* diartikan sebagai *the study of the role of ideas in*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

historical evens and process. Lebih lanjut Stromberg dalam Kuntowijoyo berpandangan bahwa sejarah pemikiran adalah *study the role of ideas in historical events and process*. Sejarah intelektual mencoba mencari kembali dan memahami penyebaran karya pemimpin-pemimpin kebudayaan –ide-ide mereka- pada masyarakat tertentu. Sejarah intelektual juga mencoba memahami hubungan antara ide tertentu pada satu pihak dan di pihak lain “kecenderungan” (*driven*) dan kepentingan (*intrest*) serta faktor-faktor non intelektual pada umumnya dalam sosiologi perorangan dan masyarakat.

Sejarah intelektual dapat dipandang sebagai sejarah wacana atau sejarah pemikiran. Pergolakan wacana adalah sesuatu yang terus berjalan, mengalir dalam *kontinum* dan *konstinuitas* pelbagai arus pemikiran manusia. Karenanya wacana atau pemikiran tidak berada dalam ruang hampa, melainkan berdialektika bahkan berbenturan atau berhadapan dengan realitas kebudayaan, struktur politik, hegemoni dan kesadaran masyarakat akan makna sesuatu yang dipandang sudah mapan. Oleh karena itu sebuah pemikiran tidak dapat terlepas dari setting *social politik* dan budaya yang mengitarinya. Dengan demikian produk pemikiran hukum *Satria Effendi M. Zein* sebagai respon intelektual tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial politik dan budaya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat muslim Indonesia saat itu. Abdullah lebih lanjut mengatakan:

Munculnya gerakan pembaharuan atau apa pun namanya, sering merupakan krisis sosial yaitu ketika harmoni dirasakan terganggu. Betapa pun kecilnya krisis tersebut, suasana yang rutin dalam kehidupan sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagamaan digoyahkan. Munculnya pikiran baru tentang cara menghayati doktrin yang sesungguhnya itu merupakan salah satu pertanda telah terjadinya peralihan dalam kehidupan sosial.

Sejarah sosial intelektual Islam adalah sejarah yang melupakan trend (kecenderungan) politik sebegini besar wilayah Islam. Sejarah sosial intelektual dalam pengertian ini mengonsentrasikan pada perkembangan ilmu-ilmu keagamaan yaitu pendapat-pendapat yang muncul dari para ulama atau pemikir dan penerbitan berbagai karya keilmuan. Dalam sejarah sosial intelektual, kaum intelektual mempunyai kontribusi yang besar bagi kebudayaan. Kelompok intelektual ini mempunyai posisi yang penting dalam masyarakat dan komunitas muslim.

Penggunaan jenis penelitian sejarah sosial intelektual Islam dalam penelitian disertasi ini didasarkan pada alasan sebagaimana dikemukakan oleh Kuntowijoyo: pertama, semua sejarah adalah sejarah pemikiran; kedua, pemikiran hanya mungkin dilakukan oleh individu tunggal; ketiga, sejarah-sejarawan- hanya melakukan rekonstruksi pikiran masa lalu.

Pentingnya mengkaji pemikiran hukum Islam *Satria Effendi M. Zein* dengan kerangka kerja sejarah sosial intelektual didasari oleh sebuah asumsi bahwa perubahan-perubahan struktural dalam kehidupan manusia banyak dipengaruhi oleh ide-ide atau pemikiran. Artinya bahwa dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran *Satria Effendi M. Zein* sebagai tokoh yang menjadi fokus kajian disertasi ini. Harry Tjan Silalahi salah seorang pendiri CSIS Jakarta berpandangan akan pentingnya pemikiran sebagai salah

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu faktor pendorong perubahan. Selanjutnya dikatakan bahwa salah satu kekuatan yang membentuk sejarah adalah pikiran manusia. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mengkait antara pertumbuhan pikiran dan perkembangan sejarah manusia. Di satu pihak setiap pemikiran terjadi dan berkembang di dalam sejarah, di pihak lain sejarah dibentuk dan dikembangkan oleh pemikiran. Sejarah dibentuk oleh pikiran dan pikiran tumbuh menyejarah. Setiap perbuatan manusia menurut Kuntowijoyo selalu dipengaruhi oleh pemikirannya. Dalam sejarah pemikiran ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu pelaku, tugas, dan metodologi. Pelaku pemikiran dalam penelitian disertasi ini adalah *Satria Effendi M. Zein*, sedangkan tugas sejarah pemikiran adalah:

- 1). membicarakan pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian bersejarah
- 2). melihat konteks sejarahnya tempat ia muncul, tumbuh dan berkembang;
- 3). pengaruh pemikirannya pada masyarakat bawah

Tugas sejarah pemikiran tersebut dapat didekati melalui tiga pendekatan yaitu kajian teks, kajian konteks sejarah, dan kajian hubungan antara teks dengan masyarakatnya. Fokus kajian sejarah pemikiran sebagaimana dikemukakan oleh Kuntowijoyo terdiri atas sejarah pemikiran teoritis (politik, filsafat, agama, ekonomi, sosial, hukum, budaya), dan sejarah pemikiran praktis (pengetahuan sehari-hari, pengetahuan *common sense*).

Metode sejarah intelektual (*intellectual history*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Louis Gottchalk ,mendefinisikan metode sejarah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intelektual (*intellectual history*) adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman peninggalan masa lalu terkait dengan ide, gagasan atau pemikiran. Karena itu, peneliti dalam penelitian disertasi ini menafsirkan dan menganalisis hasil pemikiran seseorang dengan pendekatan sejarah yang memperlihatkan perubahan dan perkembangan dalam pemikirannya. Brinton dalam Abdullah dan Surjomihardjo, menjelaskan bahwa, metode sejarah intelektual yang digunakan dalam penelitian mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut : pengumpulan sumber data, kritik dan verifikasi data, serta interpretasi dan penulisan hasil penelitian (*historiografi*). Sumber utama (*primary resource*) data dalam penelitian ini ialah sejumlah tulisan yang diproduksi oleh kedua tokoh yang menjadi obyek penelitian. Tulisan-tulisan tersebut dapat berupa buku, artikel dalam majalah atau jurnal, makalah yang disampaikan dalam seminar, pengajian, forum ilmiah dan kegiatan lain .

Dilihat dari sisi subject matternya penelitian disertasi ini termasuk dalam jenis penelitian budaya. Mudzhar, berpendapat bahwa penelitian budaya merupakan model penelitian yang memiliki konsen terhadap pemikiran, nilai-nilai dan ide-ide budaya sebagai produk berpikir manusia.

Selanjutnya dilihat dari data yang menjadi bahan analisis, penelitian disertasi ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah proses “menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Menurut Singarimbun . dalam penelitian kepustakaan, unsur-unsur yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan tekstual, seperti buku, makalah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jurnal dan sumber-sumber pustaka lainnya. Selanjutnya Nawawi, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan literature bukan hanya buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, melainkan juga berupa bahan-bahan dokumen tertulis lainnya, seperti majalah, koran dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan keperluan penelitian. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari sejumlah dokumen yang berbentuk karya akademik -karya intelektual- yang dihasilkan oleh tokoh yang dijadikan sebagai obyek penelitian disertasi ini sebagai sumber data utama. Selain itu juga didukung oleh dokumen lain -karya akademik atau karya intelektual- yang ditulis oleh para akademisi dan Indonesianis tentang tokoh yang diteliti dalam disertasi ini sebagai sumber data pendukung dan hasil kajian penelitian terkait dengan perjalanan dan dinamika kehidupan tokoh yang menjadi obyek studi ini. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian diverifikasi, baik orisinalitas, kredibilitas maupun relevansinya. Data yang orisinal, kredibel dan relevan dengan fokus penelitian ini kemudian ditafsirkan dan dianalisis. Dalam studi sejarah intelektual, analisis dilakukan terhadap teks atau analisis tekstual (textual analysis) yaitu teknik analisis data terhadap makna satu teks dan analisis intertekstual atau antarteks (*inter-textual analysis*) yaitu teknik analisis dilakukan untuk menghubungkan satu teks dengan teks yang lain agar diketahui relasi dan interelasi yang menunjukkan kemungkinan adanya saling pengaruh-mempengaruhi. Selain itu, digunakan teknik analisis konteks (contextual analysis) yaitu teknik analisis dilakukan untuk meletakkan teks-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teks yang merupakan wujud gagasan, ide dan pemikiran seseorang dalam pergumulannya dengan pemaknaan suatu teks dengan realitas dan menjadi data penelitian dalam konteks sejarah, sosial, politik dan budayanya. Dalam hal ini, analisis terutama dilakukan terhadap produk pemikiran beliau yang memiliki pengaruh dalam sejarah intelektual Islam Indonesia.

C. SUBJEK PENELITIAN

Subjek penelitian dalam disertasi ini adalah tokoh intelektual muslim di bidang hukum keluarga Islam di Indonesia yaitu *Satria Effendi M. Zein* terkait dengan perjalanan dan dinamika kehidupan intelektual dan interaksinya dengan realitas social kemasyarakatan yang mengitarinya.

Selain itu penelitian ini juga menganalisis dampak yang diakibatkan oleh pemikiran dan aktivitas yang dilakukan oleh tokoh tersebut yang menjadi lokomotif gerakan hukum modern dan para pengikutnya dalam memelihara dan melanjutkan gagasan atau pemikiran yang menjadi idealitas dan cita-cita tokoh yang disebut sebagai lokomotif gerakan pembaharuan pemikiran hukum keluarga Islam Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis situasi kekinian dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan dalam konteks posisi relasi hukum keluarga dan maqasid syariah serta posisi analisis yurisprudensi *Satria Effendi M. Zein* dalam penguatan kultur fiqih di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

D. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian disertasi ini yang mengambil jenis penelitian sejarah intelektual adalah sebagai berikut yaitu pemilihan topik kajian, pengumpulan sumber (*heuristic*), verifikasi sumber (kritik tentang keabsahan sumber), interpretasi (*analsis* dan *sintesis*) dan penulisan (historiografi). Langkah-langkah penelitian dalam disertasi ini sebagai berikut :

- 1). menentukan persoalan bidang keilmuan yang dianggap penting;
- 2). memilih tokoh;
- 3). mengidentifikasi kelebihan, keberhasilan, dan kehebatan tokoh;
- 4). menentukan fokus studi;
- 5). menentukan instrumen studi;
- 6). melaksanakan studi;
- 7). pengecekan keabsahan data, analisa data, dan menuliskan hasil studi;
- 8). menarik kesimpulan.

Untuk mengetahui keabsahan temuan penelitian lapangan, peneliti melakukan pengecekan data dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu:

1. Memperpanjang kehadiran, artinya peneliti menambah volume, intensitas atau waktu untuk meneliti apakah temuan data di lapangan bersifat kebetulan atau memang benar-benar terjadi.
2. Observasi yang diperdalam.
3. Triangulasi, artinya mengecek keabsahan temuan penelitian ini dengan menggunakan beragam metode, seperti mengontrol temuan observasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan wawancara dan sebaliknya serta membandingkan sekaligus mengkonfirmasi data yang diperoleh dari informan dengan informan lainnya.

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yakni hasil kerja peneliti didiskusikan untuk diketahui data apa yang perlu digali lebih lanjut dan hal apa yang perlu dieliminasi, sehingga akhirnya data penelitian yang terjaring benar-benar data yang representatif.

Pengkombinasian antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan diharapkan memperoleh kesimpulan yang lebih utuh dan lebih memadai terhadap sasaran yang dikaji, sekaligus dapat menghindari bias yang terlalu lebar.

Dalam pelaksanaan penelitian disertasi ini, langkah-langkah penelitian yang dilaksanakan peneliti sebagai berikut:

1. menentukan masalah penelitian yang terkait dengan bidang keilmuan fiqih yang dianggap penting untuk diteliti dan dikembangkan dalam rangka memperkokoh keilmuan fiqih sebagai satu disiplin ilmu yang mandiri;
2. memilih dan menentukan tokoh yang relevan dengan masalah penelitian. Tokoh yang dijadikan sebagai subyek sekaligus obyek penelitian adalah *Satria Effendi M. Zein* yang menurut pandangan peneliti sebagai tokoh yang fenomenal, unik dan berkontribusi sangat signifikan dalam tatanan pengembangan ilmu fiqih dan ushul fiqih, terutama dalam mereformasi pemikiran hukum keluarga Islam di Indonesia;
3. mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, keberhasilan, dan kehebatan tokoh;
4. menentukan fokus studi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. menentukan instrumen studi;
6. melaksanakan studi lapangan-pengumpulan data;
7. pengecekan keabsahan data, dan menuliskan hasil studi lapangan;
8. melakukan kritik terhadap hasil studi lapangan dan menarik kesimpulan.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

- 1). tahap orientasi;
- 2). tahap eksplorasi; dan
- 3). tahap studi terfokus.

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data dari tiga teknik pengumpulan data yang dikenali dalam *life story* yaitu teknik kajian dokumentasi yang digunakan untuk mencatat karya-karya yang dihasilkan tokoh yang menjadi objek kajian atau tulisan-tulisan akademisi dan peneliti lain yang berkaitan dengan tokoh yang dikaji. Kajian dokumentasi sebagai teknik pengambilan data penelitian berusaha memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang ada. Sedangkan teknik dokumenter dinyatakan sebagai cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam konteks ini, peneliti akan mengumpulkan semua data yang terdokumentasikan dan memiliki relevansi dengan fokus penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik dokumentasi juga dimaksudkan untuk melacak dokumen pribadi tokoh yang terdiri atas dua jenis dokumen pribadi berdasarkan permintaan (*solicited*) dan dokumen pribadi yang tidak berdasarkan permintaan (*unsolicited*). Selain itu, sejumlah dokumen bibliografis, baik yang bersifat primer maupun sekunder yang berisi tulisan, ulasan, opini, komentar mengenai ketokohan *Satria Effendi M. Zein* juga dijadikan sebagai sumber informasi yang bersifat komplementer dan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam penelitian ini. Dokumen *bibliografis* relatif lebih tersedia dan mudah diakses di sejumlah perpustakaan, arsip nasional dan pusat dokumentasi lainnya. Bahkan, sejumlah dokumen bibliografis tersedia dalam bentuk CD-ROM (*Compact Disc Read Only Memory*) dan sejumlah situs internet. Selain teknik tersebut, juga digunakan teknik pengumpulan data melalui teknik genealogi intelektual dan genealogi sosial. Teknik genealogi intelektual berusaha mencari keterkaitan garis intelektual *Satria Effendi M. Zein* dengan tokoh, ulama dan kaum intelektual yang mempengaruhi terhadap pembentukan intelektualitas *Satria Effendi M. Zein* baik langsung maupun melalui perantara dari hasil bacaannya terhadap karya para ulama dan kaum intelektual. Sedangkan genealogi sosial berusaha mencari keterkaitan dan lingkungan pergaulan sosial yang secara makro adalah sistem sosial masyarakat Indonesia *ketika Satria Effendi M. Zein* melakukan interaksi sosial dalam realitas sosial yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat Indonesia bahkan dengan masyarakat internasional. Kegiatan dalam memperoleh data yang berbentuk dokumen karya *Satria*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Effendi M. Zein, peneliti mendatangi beberapa pusat kajian dan perpustakaan antara lain Perpustakaan Utama UIN Jakarta, Perpustakaan Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan UIN Suska Riau, dan Perpustakaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di Propinsi Riau. Selain itu peneliti juga mengumpulkan dokumen sekunder yang fokus kajiannya kepada tokoh yang dijadikan sebagai fokus kajian dalam penelitian disertasi ini baik untuk keperluan penyusunan kajian riset pendahuluan dalam rangka memposisikan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya, juga untuk melengkapi ketersediaan sumber data dalam rangka peneliti memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan terpadu mengenai perjalanan tokoh yang menjadi fokus kajian dalam penelitian disertasi ini. Dengan demikian data dan informasi yang diperoleh dari berbagai tempat tersebut akan saling melengkapi untuk keperluan penelitian disertasi ini.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Langkah selanjutnya, setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisa data. Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan data sehingga data dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerjanya berdasarkan data tersebut. Analisis data berguna untuk mereduksi kumpulan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui proses pendeskripsian secara logis dan sistematis sehingga fokus studi dapat ditelaah, diuji, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijawab secara cermat dan teliti. Analisis data pada studi tokoh ini dilakukan sejak awal penelitian dan setelah pengumpulan data dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penemuan teori dan memudahkan analisis data. Data yang terkumpul, dianalisis secara mendalam dengan teknik analisis wacana kritis (critical analysis discourse). Memaparkan bahwa, karakteristik analisis wacana adalah sebagai berikut : pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (action). Dengan pemahaman semacam ini peneliti mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi, dan bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal. Kedua, mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana dipandang diproduksi, dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Ketiga, menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu.

Analisis data kualitatif dalam studi tokoh secara kritis dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- 1) menemukan pola atau tema tertentu;
- 2) mencari hubungan logis antara pemikiran sang tokoh dalam berbagai bidang sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikirannya tersebut;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) mengklasifikasikannya dalam arti membuat pengelompokan pemikiran tokoh sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai bidang yang sesuai;

4) mencari generalisasi gagasan yang spesifik. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis yaitu: 1) peneliti diharapkan tidak membuat interpretasi yang melebihi informasi; 2) peneliti tidak boleh melupakan keterbatasan studi; 3) kode etik mengharuskan peneliti melaporkan masalah validitas internal yang dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh; 4) data akan menjadi penting kalau peneliti mampu melakukan analisis secara maksimal, sehingga hasilnya memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan dapat diterima.

Sesuai karakteristik studi tokoh yang bersifat kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif akan menganalisa data secara deskriptif naratif. Analisis data dapat dilakukan dengan lima yaitu:

- 1) analisa domain (domain analysis);
- 2) analisis taksonomi (taxonomy analysis);
- 3) analisis kompensional (*compentional analysis*). Menurut Mungin kegiatan analisis ini dapat dimulai dengan menggunakan beberapa tahap, yaitu:
 - 1) penggelaran hasil observasi;
 - 2) pemilihan hasil observasi partisipasi;
 - 3) menemukan elemen-elemen kontras;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) analisis tema kultural (discovering cultural themes analysis);
- 5) analisis komparasi konstan (constant comparative analysis).

Studi tokoh ini akan dilengkapi dengan eksplorasi analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis memiliki beberapa model analisis yang berkembang saat ini. Setiap model analisis memiliki fokus pendekatan yang berbeda dalam menganalisis suatu wacana. Antara lain, model *Roger Fowler*, *Theo van Leeuwen*, *Sara Mills*, *Teuw van Dijk*, dan *Norman Fairclough*. Namun dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah pengembangan secara mendalam model analisis *Norman Fairclough* yang relevan dengan studi tokoh dalam mainstream transformasi sosial. Untuk itu, ada baiknya bila kajian tentang ruang lingkup kajian, juga dipaparkan guna melihat bangunan asumsi dalam karya ini.

Sebagaimana dikutip dalam paradigma *George Ritzer*, studi tokoh ini berada pada kuadran empat tingkat dalam kerangka paradigma yang dibuat oleh *Ritzer*. Paradigma ini dapat digambarkan sebagai berikut: 1) kuadran I disebut juga dengan makro-objektif; 2) kuadran II disebut dengan makro-subjektif; 3) kuadran III disebut dengan mikro-objektif; 4) kuadran IV disebut dengan mikro-subjektif. Banyak ahli yang masih berselisih paham dalam penerapan *metode life history*. Hal ini terjadi karena model baku yang ditawarkan dalam *life history* berbeda pada tiap ahli yang mengklaim telah menggunakannya. Namun, perselisihan pandangan ini bukanlah sesuatu yang lantas menggugurkan pandangan ini. Justru dari banyaknya perdebatan itulah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membawa pendekatan *life history* semakin dalam untuk menganalisis dan melihat fenomena sosial yang terjadi.

Sebagaimana telah menjadi kelaziman pada penelitian *kualitatif, life history* oleh Koentjoroningrat, digunakan sebagai metode untuk melihat bagaimana reaksi, tanggapan, interpretasi, pandangan dari dalam, terhadap diri masyarakat tertentu (*outokritik*). Dengan metode *life history*, persoalan yang sedang dipelajari, dianalisis secara detail dari orang, kelompok atau masyarakat tertentu untuk mendapatkan gambaran yang biasanya tak dapat dijelaskan oleh pelaku yang sedang diteliti. Selanjutnya untuk menganalisis kaitan antara teks dengan masyarakat digunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi digunakan karena peristiwa-peristiwa, pesan-pesan, ataupun fokus masalah yang diteliti akan diperlakukan seperti adanya. Landasan fenomenologi menurut Edmund Husserl tidak terbatas pada yang empirik, akan tetapi lebih dari itu karena mencakup fenomena-fenomena lain seperti persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan subjek tentang sesuatu di luar objek, sesuatu yang transenden, di samping yang aposterik. Banyak peneliti menggunakan cara mereka sendiri dalam menganalisis fenomena sosial dengan pendekatan *life history*. Oscar Lewis misalnya menggunakan *life history*, dengan menyematkan istilah yang disebutnya “rekonstruksi hari kemarin” (*reconstruction of days*). Cara ini digunakan Lewis untuk mengetahui detail kegiatan dari fenomena yang sedang diteliti untuk dianalisis kecenderungan-kecenderungannya secara mendalam. Dengan cara ini, dalam kunjungan wawancara setiap hari atau beberapa hari dalam satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai dua minggu, informan ditanyai secara detail apa yang dialaminya pada hari sebelumnya, dari pagi sampai bangun tidur hingga malam saat akan tidur. Bahkan, walaupun si informan bermimpi, ia juga akan ditanyai mengenai mimpinya itu.

Oscar Lewis membagi empat pendekatan untuk mengungkapkan pengalaman secara utuh berkenaan dengan *life history*, yaitu: 1) pendekatan tematis (*typical approach*); 2) pendekatan *otobiografi*; 3) pendekatan masalah khusus; 4) pendekatan *construction of days*. Penelitian dengan menggunakan pendekatan *life story*, dipakai untuk menggambarkan secara kronologis dinamika pengalaman hidup atau kejadian-kejadian yang dialami seseorang atau masing-masing anggota suatu keluarga tertentu. Namun, pemilihan anggota keluarga atau satu keluarga yang dijadikan sebagai informan, tidaklah dipilih sebagaimana pemilihan sampel dalam metodologi kuantitatif. Pemilihan informan dalam anggota keluarga haruslah mereka yang benar-benar mengerti dengan permasalahan yang sedang dikaji dan dianggap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang dihadapi di dalam penelitian dan representatif informasi yang diberikannya.

Selanjutnya, Koentjoroningrat. Merinci hal-hal yang seharusnya diingat saat seorang peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan *life history* yaitu:

- 1) perlu dilakukan pengumpulan informasi mengenai calon subjek penelitian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) informan yang telah didapatkan lalu diseleksi untuk didapatkan beberapa orang saja agar dapat dilakukan penelitian secara mendalam melalui teknik wawancara;

3) beberapa orang itu kemudian diseleksi lagi untuk diwawancarai mengenai pengalaman hidup mereka secara kronologis;

4) mereka diwawancarai mengenai peristiwa tertentu dan selama satu sampai dua minggu diwawancarai untuk merekonstruksi kejadian-kejadian hari kemarin yang dialaminya;

5) mereka juga dites psikologis dengan menggunakan protective test;

6) dari mereka dikumpulkan sebanyak mungkin data dan dokumentasi biografis;

7) hasil wawancara dari tape ditranskripsi, dan apabila ada bahasa lokal, maka bahasa itu ditransfer ke dalam bahasa penelitian atau bahasa ilmiah, ataupun juga ke dalam bahasa masyarakat yang lazim digunakan;

8) seluruh data disusun secara kronologis dan diredaksi;

9) dimana perlu wawancara ulang, untuk mengisi beberapa bagian penelitian yang kurang lengkap, maka hal itu dilakukan untuk melengkapi data dan keterangan yang terlupakan;

10) redaksi akhir dilakukan sekaligus sebagai persiapan naskah life history untuk dipublikasikan.

Kerangka analisis data lainnya yang peneliti gunakan dalam penelitian disertasi ini adalah analisis hermeneutik yang terkait dengan pemaknaan dan penafsiran teks yang terkait dengan konteks analisis yurisprudensi Keputusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para hakim dalam berbagai tingkatannya, yang dianalisis oleh *Satria Effendi M. Zein*, dengan pendekatan *Ushulliyah*, baik yang berkaitan dengan *ta'aqqulli*, dan *taa'bbudi*, *qothi'i* dan *zhonni*, *manthuq* dan *mafhum*, *mutlak* dan *mukayyiud*, *mujmal* dan *mubayyan*, *nasikh* dan *mansukh*, serta .

Analisis hermeneutik dalam penelitian ini merujuk pada pandangan yang dikemukakan oleh Hardiman sebagai berikut :

Hermeneutik menyibukkan diri dengan problematika teks, meski kemudian pengertian “teks” itu diperluas menjadi dunia kehidupan social. Pembaca teks harus mampu berempati secara psikologis ke dalam isi teks dan pengaranya, pembaca harus mampu “mengalami kembali” pengalaman-pengalaman yang dialami pengarang yang termuat di dalam teks itu.”

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Analisis pemikiran cemerlang *Satria Effendi M. Zein* mulai terlihat ketika beliau mengajar di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah) di bawah kepemimpinan *Harun Nasution*. Saat itu Pascasarjana identik dengan pola dan cara berpikir rasional yang dikembangkan *Harun Nasution*. Begitu gencarnya kecenderungan rasionalisasi dalam memahami ajaran Islam, sering kali ahli hukum Islam (*syari'ah*) dianggap sebagai kelompok yang tidak bisa diajak untuk mengembangkan penalaran. Sampai suatu saat, pernah mengatakan, bahwa orang Fakultas Syari'ah sulit diajak berpikir modern (maju dan rasional). Dalam suasana seperti inilah *Satria Effendi* masuk dan diterima di program Paska sarajana. Maka dapat dibayangkan, apabila cara berpikir orang syari'ah konvensional yang dipakai saat itu, *Harun*, sebagai pimpinan Pascasarjana, belum tentu berkenan menerima kehadiran *Satria Effendi M. Zein*.

Dalam kondisi seperti itulah *Satria Effendi M. Zein*, berusaha menjembatani pemikiran hukum Islam konvensional dengan pemikir rasional. Tidak heran kalau bahan ajar dan literatur yang disajikan pada program Pascasarjana IAIN berusaha mengakomodir pemikiran hukum Islam yang memiliki kecenderungan analisis yang relatif rasional. Dalam materi *Usul Fikih*, misalnya, kita menemukan materi yang berbicara tentang kedudukan akal dan wahyu dalam hukum Islam, konsep *ta'aqquli* dan *ta'abbudi* dan sudah tentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

konsep *maqasid alsyari'ah* yang mengarah kepada pembahasan filosofis disyari'atkan-nya hukum Islam.

Melalui pembukaan wacana hukum Islam yang rasional dan dinamis, *Satria* dikenal sebagai ahli hukum Islam memperhatikan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Banyak gagasan tentang hukum Islam dan perubahan sosial ditulis oleh beliau dalam berbagai seminar yang dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta. Kesan umum dari berbagai tulisan beliau adalah, bahwa hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan relevan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Untuk mengukuhkan dan memperkuat gagasan tersebut, *Satria Effendi M. Zein*, banyak bicara tentang *illat mansusah* dan *illat mu'tabarah*, dan sering merujuk kasus ijtihad *tatbiqi* dari *Umar bin Khattab*. Berkat gagasan dan pemikirannya itu, dapat mengantarkan ahli hukum Islam (Indonesia) untuk berinteraksi dengan wacana modernitas. Deskripsi pemikiran *Satria Effendi M. Zein* tentang hukum Islam bersifat *dinamis*, *adaptif*, dan *relevan* dengan perubahan dan perkembangan masyarakat di atas, dapat dibaca dalam berbagai tulisannya.

Salah satu model kajian hukum Islam yang ditawarkan oleh *Satria Effendi* adalah menggunakan studi kasus. Metode analisis *yurisprudensi* ini dengan model (*metode*) studi kasus mengkaji perkara hukum dalam bidang hukum Islam pada umumnya dan keluarga Islam khususnya yang benar-benar terjadi dalam masyarakat dan menganalisis perkara itu dari segi pendapat-pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih. Model kajian hukum Islam seperti yang dilakukan oleh *Satria Effendi M. Zein*, ini seolah memberi contoh bagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang ahli ilmu hukum Islam membaca dan menganalisis masalah-masalah hukum Islam yang benar-benar terjadi dalam masyarakat, seperti perkara-perkara hukum keluarga Islam yang pernah diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia kemudian Ia menyimpulkan hasil analisisnya.

Dalam melakukan analisis yurisprudensi di atas, terkadang beliau menyetujui suatu keputusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding atau tingkat kasasi, tetapi terkadang beliau juga tidak menyetujui suatu keputusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi. Bahkan terkadang beliau memberi saran alternatif yang seharusnya dapat dilakukan oleh suatu keputusan pengadilan dan alternatif itu tidak pernah disinggung oleh Pengadilan Agama tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dalam perkara-perkara yang bersangkutan.

Studi kasus sebagai sebuah model metode kajian hukum, mempelajari hukum yang dihadapkan kepada persoalan hukum (perkara) riil, kemudian diharapkan untuk dapat menganalisisnya dari segi hukum dan menyimpulkan status hukumnya. Kelebihan model metode studi kasus terutama karena sifatnya yang utuh sebagai suatu persoalan hukum dengan segala jenis keterkaitannya dengan masalah lain di luar hukum. Selain itu, metode ini juga melakukan kajian sinkronisasi hukum dari berbagai peraturan perundangundangan mengenai hukum masalah hukum yang bersangkutan

Pembahasan masalah fikih dengan model perbandingan *Muqaronah fi al-mazaahib*, bukanlah suatu yang asing, terutama pada periode modern ini. Berbagai literatur fikih disajikan dalam bentuk studi perbandingan dengan memperhatikan apa yang menjadi inti persoalannya (*mansya al-khilaf*). Kitab *Bidayat al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mujtahid karya *Ibn Rusyd* (W. 595 H.) dianggap sebagai kitab pertama yang disajikan dalam bentuk perbandingan mazhab ini. Setelah itu, bermunculan berbagai kitab fikih yang bercorak *muqaranah* ini. Salah satu kitab yang sering dikutip oleh *Satria Effendi* adalah kitab *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arbaah* karya *Abdu al-Rahman al-Jaziri* (W. 1359 H.), *Fiqhu al-Sunnah* karya *Sayid Sabiq*, (W. 2000 H), dan kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya *Wahbah al- Zuhaili*. (W. 1436 H/2015 M).

Upaya untuk membangun fikih lintas mazhab terlihat jelas dalam analisis *Satria Effendi* dalam berbagai masalah hukum keluarga. Adakalanya ia mengungkap pendapat ahli fikih dari berbagai mazhab secara *qauli* tetapi juga terkadang ia mengungkap pendapat mereka secara *manhaji*. Terhadap kedua cara ini akhirnya beliau harus memberikan semacam *preferensi* atau *tarjih*, mana di antara pendapat para *fukaha* terdahulu-nya yang dapat diterima dan dijadikan sebagai pendapat yang terpilih. Namun kelihatannya cara *tarjih* yang dilakukan oleh beliau mempunyai “kelebihan”, dibandingkan dengan cara *tarjih* ahli fikih lainnya.

Salah satu kriteria *tarjih* yang digunakan beliau adalah sejauh mana pendapat itu mengacu pada *maqasid al-syariah*. Beliau menegaskan, bahwa apabila hakim melihat adanya pendapat para ulama atau fuqaha yang bertentangan dengan *kemaslahatan* dan *tujuan syariat*, hakim boleh memilih pendapat yang lain, selama sejalan dengan tujuan syariat. Pandangan beliau tentang *tarjih* berdasarkan *maqasid*, diterapkan secara konsisten ketika menganalisis akibat cerai karena tidak mempunyai keturunan atau karena adanya penyakit. Beliau men-*tarjih*-kan pendapat *Al-Zuhri* (W. 741). dan ulama lain yang sependapat dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau, karena lebih sesuai dan sejalan dengan tujuan syariat (*Maqasyid al-Syari'ah*).

Namun demikian, salah satu kelemahan yang dapat dicatat di sini di antaranya adalah dalam semua pembahasannya, *Satria Effendi M. Zein*, hampir tidak pernah merujuk kepada peraturan perundang-undangan tentang hukum keluarga yang berlaku di negara-negara Muslim di dunia modern sekarang ini, di luar Indonesia. Padahal perbandingan seperti itu, amat diperlukan, agar supaya para pemikir hukum Islam tidak sendirian di dalam melakukan terobosan-terobosan pemikiran hukumnya. Inilah yang dapat disebut dengan kajian *komparatif horizontal*. Sedangkan yang telah dilakukan oleh *Satria Effendi Effendi M. Zein*, adalah kajian *komparatif vertikal*, yaitu membandingkan masalah hukum yang dihadapi dengan apa yang terdapat dalam kitab fikih.

Persoalan-persoalan hukum Islam dan hukum keluarga Islam yang dibahas *Satria Effendi* dalam berbagai karyanya, sebagian adalah masalah lama yang sudah banyak tertulis rujukan-nya dalam kitab-kitab fikih. Akan tetapi sebagian masalah lainnya, seperti soal akad nikah melalui telepon, masalah harta gono-gini, masalah status uang tanggungan asuransi sebagai harta waris, masalah uang santunan sebagai harta waris, dan lain-lain adalah masalah-masalah baru yang sering kali belum ada rujukannya secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih.

Dalam menganalisis kasus-kasus seperti tersebut, *Satria Effendi* selalu terlebih dahulu mencari dan menyajikan dalil *Nash* yang ada, baik Al-Qur'an maupun hadis, kemudian membandingkan pendapat-pendapat ulama yang ada yang dikutip dari berbagai sumber, setelah itu ia melakukan *qiyas* dan menguji *maslahat* serta *maqasyid syari'ah* yang ada dalam masalah tersebut, barulah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian ia menyimpulkan-nya. Di sinilah letak kedalaman dan kontribusi pemikiran *Satria Effendi* mengenai hukum Islam dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun dalam kehidupannya sehari-hari secara pribadi *Satria Effendi* dikenal oleh para koleganya sebagai pengikut (ber-mazhab) mazhab *Syafi'i*, tetapi dalam analisisnya ia sangat dinamis memilih pendapat mazhab yang dinilainya paling kuat argumentasinya.

Satria Effendi hampir dalam setiap analisisnya berbicara tentang *maqasyid al-syari'ah* dan *al-maslahat*, dua topik penting dalam kajian ilmu usul fikih. Cara analisis seperti ini tentu saja sangat tepat, karena seorang mujtahid tidak dapat berijtihad tanpa memahami secara mendalam filsafat dan teori hukum Islam yang biasanya dikaji dalam kitab-kitab usul fikih. Kebanyakan ulama Indonesia ketika mempelajari hukum Islam, lebih mengedepankan aspek fikihnya daripada aspek usul fikihnya. Dengan kata lain, *Satria Effendi* sesungguhnya sedang mengeritik secara tidak langsung, cara mempelajari hukum Islam di Indonesia.

Dalam menganalisis berbagai putusan hakim di peradilan agama, *Satria* berusaha untuk secara konsisten menerapkan teori tujuan hukum dan konsep *kemaslahatan* tersebut. Dari lima unsur utama yang harus dijaga dalam *maqasid al-syariah*, kelihatannya beliau menerapkan prinsip menjaga keturunan dan harta sebagai inti dan sekaligus pisau analisisnya.

B. SARAN

Upaya untuk menilai karakteristik dan corak pemikiran *Satria Effendi* tentang hukum Islam dan sekaligus metodologi-nya, memang tidak mudah, karena di samping tulisan beliau yang masih berserakan, juga tidak adanya buku yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus mengkompilasi fatwa dan pendapat hukum beliau, kecuali buku *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* sekadar membantu membuat *mapping* atau pemetaan terhadap karya yang sangat berharga dari seorang tokoh dan ahli hukum Islam di Indonesia saat ini.

Penulis menyarankan, justru yang harus dijadikan sebagai pertimbangan bagi para ahli hukum Islam di Indonesia adalah konsistensi beliau untuk melihat berbagai masalah dengan sudut pandang tujuan hukum. Bagi para ahli hukum tentu tidak terlalu asing dengan model penafsiran teleologis, yang memfokuskan pengkajian teks peraturan dengan memperhatikan apa yang ada di balik teks, yakni konteks. Adanya kontekstualisasi ajaran dasar Islam yang telah digagas oleh *Satria Effendi*, meskipun baru langkah awal, merupakan gagasan yang perlu dijadikan perhatian kita bersama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Penduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.
- Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Yasa Abu Bakar, MA, *Mimbar Hukum*, Nomor 40 Tahun 1998
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974, sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Anshori Abdul. Ghofur,, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2005.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 2005
- Elvi Lusiana, *100+ Kesalahan dalam Pernikahan*, Jakarta: Qultum Media, 2011.
- Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve; Jakarta, 1994
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju.
- J. Satrio, 1991 *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawin Indonesia*, (Jakarta . Ghalia Indonesia, 1980
- Kementerian Agama RI, *Menelusur Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013.
- M. Atho Mudzhar, 1998. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahmuda Junus, 1989. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta : Pustaka Mahmudiyah.
- Mardani, *Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi, dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muhammad Ali as- Sabuni. 1972. *Rawai' al Bayan :Tafsir Ayat al-Ahkam min Alquran*. Kuwait : Dar Alquran al-Karim.
- Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: ghalia Indonesia, 1988.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Peremberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *Panduan Pengajuan Itsbat Nikah*, Jakarta: Australia Indonesia Partnership, 2012.
- Soekanto, Soejono., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 3, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Susilo, Budi., *Prosedur Gugatan cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2013.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Tihami & Sohari Sahrani, (mengutip Zakiyah Darajat, dkk, *Ilmu Fikih*), *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.
- WahBah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyono Darmabrata, 2003. *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, Gitama Jaya
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1984.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

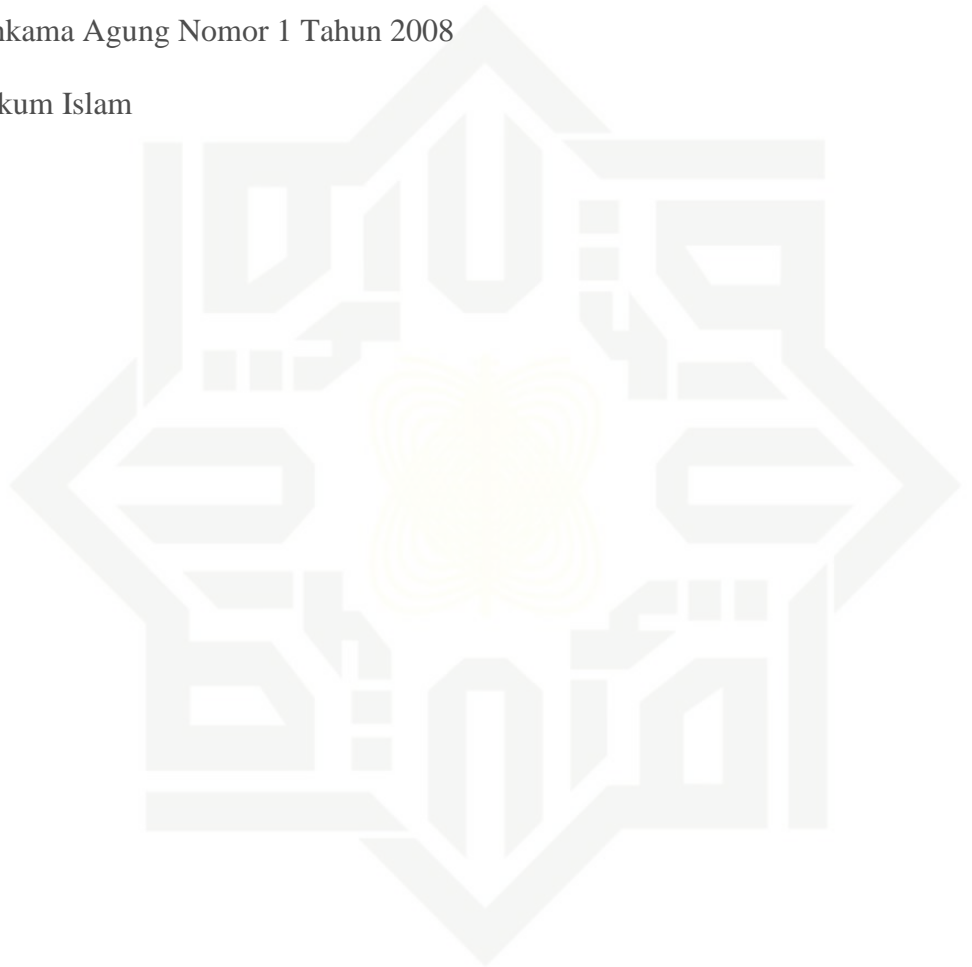
Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Kompilasi Hukum Islam



UIN SUSKA RIAU



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Ahmad Roza'i Akbar

ID Number : 31790515817

Date of Birth : October 12, 1970

Sex : Male

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 51

Structure & Written Expressions : 54

Reading Comprehension : 45

Overall Score : 500

Expiry Date : December 2, 2020



English Proficiency Test Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

The scores achieved by the test taker are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 281128 PO BOX 1094
Telp. 0852 7144 0823 Fax. 0761 858832

Email : info@ptsp.uin-suska-riau.ac.id

b. Penguipian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



The Head of Language Development Center

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mahyudin Syukri, M.Ag

NIP. 19720421 200604 1 003



UIN SUSKA RIAU



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحوذية الاسلامية

SERTIFIKAT

ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Ahmad Roza'i Akbar

Nomor ID : 31790515817

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 12 Oktober 1970

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

45 : الاستماع
45 : القواعد
46 : القراءة
453 : النتيجة

Berlaku Hingga : 4 Februari 2021



ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are generated by the Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28138 PO BOX 1094 HB: 0852 71 44 0823

Email : info@pusat-bahasa.uin-suska-riau.go.id

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Malayudin Syukri, M. A.

The Head of Language Development Center

2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

I. Data Pribadi

1. Nama : H. Ahmad Roza'i Akbar
 2. Tempat dan Tanggal Lahir : Bengkalis, 12 Oktober 1970
 3. Jenis Kelamin : Laki – laki
 4. Agama : Islam
 5. Status Pernikahan : Sudah Menikah
 6. Warga Negara : Indonesia
 7. Alamat : Jl. Husni Thamrin Gg. Pinang No. 3B Simpang Tetap, Darul Ikhsan, Dumai Barat, Dumai
 9. Nomor Telepon / HP : 085356609891
 10. e-mail : ahmadrozaiaakbar02@gmail.com
 11. Kode Pos : 28824

II. Pendidikan Formal :

Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
SDN Sungai Alam, Bengkalis	–	Sekolah Dasar
SMPN 003 Bengkalis	–	Sekolah Menengah Pertama
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pekanbaru	Agama (A1)	Sekolah Menengah Atas
IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru	Fakultas Syariah, Jurusan Peradilan Agama	Strata 1
Universitas Islam Riau	Hukum Tata Negara	Strata 2
UIN Sultan Syarif Qasim Riau	Hukum Keluarga Islam	Strata 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IV. Riwayat Pengalaman Kerja

Periode			Instansi / Perusahaan	Posisi
2006	-	2012	Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai	Ketua Umum
2013	-	2017	Asosisasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia	Ketua Umum
2015	-	2017	Pembina Program Keluarga Sakinah Kota Dumai	Ketua Umum
1999	-	2013	Sekolah Tinggi Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai	Ketua
2014	-	Sekarang	Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai	Rektor